Tanah Berdarah Di Bumi Merdeka

Menelusuri Luka-Luka Sejarah 1965 - 1966 di Blora

Dalhar Muhammadun

Pengantar :
Pramoedya Ananta Toer

YAYASAN ADVOKASI TRANSFORMASI MASYARAKAT - ATMA

PAW

ELSAM

ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

TANAH BERDARAH DI BUMI MERDEKA

Menelusuri Luka-Luka Sejarah 1965-1966 di Blora

Penulis:
Dalhar Muhammadun

Tim Investigasi:
Yunus Bakhtiar Rifa'i
Mahmudi Abduh
Kunarto Marzuki
Lulus Marionan
M. Supriyanto
M. Hamdun
Mulgiyanto

TANAH BERDARAH
DI BUMI MERDEKA

Menelusuri Luka-Luka Sejarah 1965-1966 di Blora

xiv + 127 halaman

Penulis:
Dalhar Muhammadun

Editor:
Johny Simanjuntak
Sukendri Siswanto
Eddie Riyadi Terre

Foto sampul:
Gilang Mahardhika

Diterbitkan oleh:
Yayasan Advokasi Transformasi Masyarakat (ATMA)
Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW)
Perkumpulan ELSAM

Jl. Ir. Sutami 88c, Jurug, Solo, Jawa Tengah 57125
Telp/Facs. (0271) 638 307

Cetakan pertama, Maret 2004
ISBN 979-98433-0-8

Keharusan untuk tidak membuka luka lama
sering menjadi alasan untuk tidak mengingatnya.
Tetapi menyangkal masa lalu tidak akan
menyembuhkan luka lama itu.
Orang perlu mengingatnya karena mereka
belum bisa melupakannya.
Luka-luka itu masih ada,
segar dan menyakitkan.
Masyarakat harus melakukan sesuatu
untuk menyembuhkannya.

(Guetemala's Search for Truth)

N U
LESBUMI

Pengantar

SAYA berbesar hati karena ada tulisan sejarah lokal dari tempat saya dilahirkan. Penulisan sejarah lokal perlu digiatkan supaya sejarah nasional pun mempunyai dasar-dasar, bahan-bahan atau pijakan yang lebih kuat. Penulisan sejarah lokal itu saya anjurkan untuk dijadikan sebagai budaya menulis secara umum.

Dalam persoalan menulis naskah ini, khususnya Peristiwa 1965, adalah suatu keberanian. Tanpa keberanian, tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi. Karena itu, buku ini sesuai dengan semangat yang menulisnya yakni para pemuda. Dan sebagaimana sering saya nyatakan, pemuda, angkatan muda tanpa keberanian adalah ternak semata karena faalnya dalam hidup beternak diri semata.

Saya harapkan, buku ini bisa menjadi bacaan lokal dan umum. Saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Penilaian atas karya ini terserahlah pada publik. Selamat membaca.

Bojonggede, 6 Januari 2004

Pramoedya Ananta Toer

N U
LESBUMI

Dari Penerbit

KEHADIRAN buku ini penting bagi pengembangan wacana, setidaknya di tingkat lokal, terhadap Tragedi Kemanusiaan tahun 1965-1966 sebagai dampak dari Gerakan 30 September (G-30-S). Melalui buku ini kami berharap masyarakat pembaca dapat mengambil makna, bukan saja pada peristiwa penangkapan dan pembantaian terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi juga latar belakang kejadian yang berlangsung jauh sebelumnya. Dengan demikian, upaya mengungkap kebenaran sejarah gelap bangsa Indonesia itu tidak hanya berdasarkan kejadian-kejadian yang berlangsung di Jakarta dan informasi yangberkembang di sana, tetapi juga memperhatikan kejadian-kejadian di daerah.

Berdasarkan hasil investigasi yang kemudian dituangkan dalam tulisan di buku ini, terungkap bahwa peristiwa berdarah yang memakan korban ratusan bahkan ribuan jiwa di wilayah Blora tahun 1965/1966, ternyata tidak serta merta disebabkan oleh Peristiwa G-30-S di Jakarta. Namun, konflik antarpartai di wilayah itu memang sudah muncul sejak lama. Selain itu, kehadiran tentara di Blora saat

Itu juga sangat berpengaruh terhadap besarnya korban pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Semua itu, tentu mengundang pertanyaan, kalau peristiwa pembunuhan terhadap tujuh jendral TNI Angkatan Darat di Jakarta dialamatkan kepada PKI sebagai dalang dan pelakunya, lalu siapa dalang dan pelaku pembunuhan massal yang terjadi di daerah-daerah? Mengapa pula yang menjadi sorotan selalu pada peristiwa berdarah di Jakarta sedangkan tragedi kemanusiaan di daerah-daerah itu tidak banyak diungkap? Kegelisahan terhadap minimnya pengungkapan fakta sejarah di tingkat lokal yang mampu ikut mewarnai wacana publik nasional, antara lain alasan utama yang mendorong penerbitan buku ini.

Semoga paparan sederhana yang ditampilkan dalam buku ini mampu menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya mengungkap sejarah lokal guna memperkaya sejarah nasional.

Solo, Maret 2004

Yayasan ATMA
LPAW
Perkumpulan ELSAM

Prakata

1965 adalah tahun yang selalu terngiang di benak masyarakat Nusantara, setelah tahun 1945, tahun kelahiran Bangsa Indonesia. Sebuah peristiwa besar terjadi di tahun 1965, di mana ratusan ribu –bahkan mungkin jutaan– anak bangsa terbunuh. Sebuah tragedi yang sampai saat ini masih terasa pedih di hati para korban yang menyandang predikat miring *'Eks-Tapol'*.

Sampai saat ini, tragedi kemanusiaan 1965-1966 masih dianggap sebagai keniscayaan sejarah. Setidaknya ada tiga hal yang mendasari anggapan tersebut. *Pertama,* memang selama rentang waktu yang begitu panjang, citra yang dibangun oleh rezim Orde Baru dalam konteks peristiwa 1965-1966 merupakan kemenangan dari patriot atas pengkhianat bangsa. *Kedua,* sebanding dengan itu, penguasa politik Orde Baru juga mengingatkan kepada masyarakat Muslim sebagai elemen terbesar di Republik ini bahwa peristiwa 1965-1966 merupakan kemenangan Muslim atas Kafir. *Ketiga,* pada tingkat tertentu, masyarakat kita sendiri masih menerima dengan bangga akan

Pencitraan negatif tersebut. Karenanya tidak salah jika peristiwa yang menafikan nilai-nilai kemanusiaan itu berada pada situasi yang paling 'sepi' di antara peristiwa-peristiwa politik lainya. Padahal peristiwa tersebut memiliki latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks dan panjang serta melibatkan hampir seluruh elemen bangsa di Republik ini.

Ditambah lagi dengan tindak kekerasan politik dan politik kekerasan yang selalu direproduksi oleh rezim Orde Baru, dalam rangka memangkas kekuatan kritis dan memperkokoh hegemoni penguasa. Negara sudah memanfaatkan situasi politik yang semestinya merupakan kondisi yang wajar dalam situasi pencarian jati diri negara-bangsa seperti Indonesia, di mana seharusnya negara berperan sebagai fasilitator yang mampu menghadirkan ruang publik yang bebas, guna terciptanya dialog antarkekuatan politik yang ada. Akan tetapi, terjadi hal yang berbeda, negara (*malah*) melakukan proses penyemaian *keprajuritan* sampai lapisan yang paling bawah dalam masyarakat. Sehingga itu mempersubur sifat permusuhan dalam diri masyarakat guna memvonis dan mengeksekusi kelompok lain yang dianggapnya sebagai penyakit sosial dengan mengatasnamakan identitas sosial, baik itu agama, ideologi, politik, suku, etnis, golongan ataupun gender.

Memutus akar dari 'lembaga kekerasan' yang bersumber dari tragedi 1965-1966, merupakan pekerjaan rumah bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena perjuangan penegakan nilai-nilai demokrasi dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa dibebankan kepada sebagian elemen Bangsa saja, melainkan harus diletakkan sebagai tanggung jawab bersama. Proses 'duduk bersama' guna menyelesaikan persoalan bangsa ini, mensyaratkan banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah dengan dibukanya kembali tragedi 1965-1966 -- sambil tidak melupakan latar belakang puluhan tahun sebelumnya--

sebagai wacana publik, dengan tidak hanya mengacu pada tafsir tunggal yang dikeluarkan rezim penguasa.

Penulisan sejarah dengan judul *Tanah Berdarah di Bumi Merdeka, Menelusuri Luka-Luka Sejarah 1965-1966 di Blora* ini --sekalipun bersifat lokal yaitu Kabupaten Blora, Jawa Tengah-- merupakan jawaban atau langkah awal guna memutus akar budaya kekerasan, terutama kekerasan politik dan politik kekerasan. Tentu saja muncul pembacaan baru, karena ditemukannya fakta-fakta baru. Ini semua bukan merupakan 'kebenaran baru' yang paling berhak atas kebenaran. Karena ia harus *duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi* dalam proses dialektika dengan wacana publik lain yang akan muncul di mana dan kapan saja. Sehingga kebenaran yang muncul bukanlah kebenaran atas dasar 'kesepakatan' yang hegemonik.

Lokalitas cakupan dalam penulisan sejarah ini mengandung maksud untuk menemukan fakta lokal (Blora) yang tidak tercampuri fakta lokal (daerah) lain dan untuk menemukan faktor yang saling mempengaruhi, terutama titik balik Peristiwa G-30-S 1965 di Jakarta, tanpa harus terjebak dalam 'sisi rumit' peristiwa itu sendiri.

Guna menjaga obyektivitas kajian, segala sesuatu yang terjadi dalam rentang sejarah yang dilalui dan akhirnya sampai pada Peristiwa 1965 dan akibat-akibatnya harus dilihat sebagai fakta yang masing-masing mempunyai alasan dan motivasi tersendiri. Para pelaku sejarah tersebut harus tetap diletakkan pada konteks *bagian dari bangsa Indonesia* yang sedang bergelut dengan sejarah dan zamannya sendiri.....

Konsekuensi lain dalam penulisan sejarah lokal ini adalah keharusan untuk menggunakan sebanyak mungkin data lisan sebagai sumber primer, sekaligus untuk membuktikan bahwa penulisan sejarah tidak hanymonopoli kelompok *elite* yang tersentuh dan tercatat dalam dokumentasi data tertulis yang sangat terbatas. Untuk memperkaya materi kajian, telaah pustaka sebagai sumber sekunder

Akan selalu digunakan terutama dalam rangka kritik terhadap data lisan.

Hal lain yang perlu juga tersampaikan bahwa penulisan sejarah ini bermula dari pergumulan bersama dalam merintis ruang berfikir dan bertindak, meletakkan penghargaan kemanusiaan dan pluralitas sebagai sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, juga merupakan usaha bersama dalam mengais-ngais sisi suram sejarah kemanusiaan di Indonesia, yang berpuncak pada tragedi kemanusiaan 1965-1966, dan menjadikannya sebagai 'kaca benggala' bagi kehidupan bersama.

Penulisan ini juga merupakan prosesi uji coba menawarkan *produk lokal* dalam rangka menyuburkan prakarsa di tengah hantu masyarakat global yang membelenggu. Kritik dan saran adalah pupuk dan gunting kebun untuk sekuncup bunga yang ingin tumbuh di sudut halaman yang sempit sekalipun.

Ucapan terima kasih menjadi kewajiban utama penulis untuk semua Tim Investigasi Data yang dengan sabar *njumputi* ingatan para korban, pelaku, dan saksi, untuk dinilai dan diletakkan pada tempatnya. Terima kasih juga kepada para narasumber yang melampaui 35 orang, mereka yang menemani *ngobrol* dan diskusi di warung kopi serta keluarga Pramoedya Ananta Toer. Lebih khusus lagi ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh komunitas Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora, Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat (Syarikat) Yogyakarta, Yayasan Advokasi Transformasi Masyarakat (ATMA), dan Perkumpulan ELSAM Jakarta, beserta seluruh mitra dan jaringannya.

Blora, Maret 2004

Dalhar Muhammadun

Daftar Isi

Pengantar		**v**
Dari Penerbit		**vii**
Prakata		**ix**
Daftar Isi		**xiii**
Bab I	**Blora Tempo Doeloe**	**1**
Bab II	**Sejarah Perlawanan Rakyat Blora**	**5**
Bab III	**Dendam 1948 dan Kemenangan PKI 1955**	**11**
Bab IV	**Menuju Blora 1965**	**25**
	Persaingan Antarpartai	25
	Perang Isu	28
	Konsolidasi Internal Partai	33
Bab V	**1965 - 1966, Tabir Terkelam Sejarah Blora**	**39**
	Dampak G-3-0S di Blora	39
	Reaksi Terhadap Peristiwa G-30-S di Blora	41
	Pembentukan Wadah Baru	46
	Penangkapan	53
	Pembunuhan dan Eksekusi	61

Bab VI Adu Kutut, Adu Jago, dan Ekonomi-Politik **69**
Adu Kutut Menjadi Adu Jago 71
Motivasi Ekonomi dan Politik 77
Bab VII Luka yang Tersisa **81**
Kayat bin Kasto Kasban: Pengawal Presiden yang Tukang Dawet 81
Pak dan Bu Sabar: Sabar dalam Pengharapan 86
Kang Leman: "Sekarang Saya Dilupakan" 92
Bab VIII Penutup **95**

Bahan Bacaan **101**

Daftar Singkatan **103**

Lampiran **107**
Daftar Nama Anggota Hansip Bamunas BP Komando Distrik Militer 0271 107
Daftar Pengurus Partai dan *Underbouw* Partai Politik di Kabupaten Blora Tahun 1965 110
Daftar Narasumber Lisan 112
Dokumen Foto-Foto 118

Tentang Penulis **124**

Profil Lembaga **125**

Bab I

Blora Tempo Doeloe

SEPANJANG sejarahnya, Blora merupakan wilayah yang terdiri dari hamparan hutan jati berkualitas tinggi dan tanah kering, tandus serta berkapur. Hanya tersedia sedikit lahan pertanian subur yaitu di wilayah Blora Selatan di sekitar sungai Bengawan Solo, meliputi Kecamatan Kedungtuban, Menden (Kradenan), dan Randublatung. Potensi hutan yang melimpah, mestinya bisa dijadikan komoditas pengganti bagi mayoritas penduduknya yang berpencaharian petani. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Hasil hutan hanya dimanfaatkan oleh VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) dan Pemerintah Hindia Belanda, sedangkan masyarakat Blora sendiri tetap miskin. Petani mengerjakan lahan

pertanian yang tandus, sementara para pekerja wajib *blandong*[1] hanyalah buruh kasar dengan gaji kecil.[2]

Gambaran kemiskinan masyarakat Blora sebagaimana dikutip Warto dari tulisan Bekking (penulis Belanda) dalam bukunya yang terbit tahun 1865 sebagai pernyataan seorang pelancong:

> "... di wilayah Karesidenan Rembang (Blora merupakan bagian dari Karesidenan Rembang: pen.) tidak pernah dijumpai gerobak yang membawa atau mengangkut hasil pertanian, tidak ada petani kaya dengan pakaian yang bagus dan menampilkan air muka cerah tanpa beban penderitaan. Para petani umumnya menggunakan caping sebagai tutup kepala. Banyak di antara mereka, baik laki-laki maupun perempuan, bertelanjang dada dengan menampilkan wajah memelas sebagai cerminan dari kemiskinan yang mereka derita".

Lebih jauh pelancong itu menuturkan:

> "Lihatlah bagaimana orang Jawa jatuh ke dalam penderitaan yang menyedihkan. Di daerah ini ditemukan pabrik-pabrik kecil yang tidak berarti, seperti misalnya pabrik gula, nila, tembakau dan kopi. Tanaman wajib yang diberlakuan di sana telah merugikan sebagian besar penduduk dan sebaliknya telah mendatangkan

---

[1] Blandong atau blandongan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi dan pengelolaan hutan, yaitu penebangan kayu, pengangkutan kayu ke tempat-tempat penampungan di tepi sungai atau di pantai, penanaman dan pemeliharaan hutan, serta kegiatan pengapungan kayu hasil tebangan ke pusat penampungan kayu negara.

[2] Lihat Warto, *Blandong, Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang Abad-19* (Surakarta; Yayasan Pustaka Cakra, 2001).

keuntungan besar bagi pemerintah Hindia dan para kontraktor. Meskipun penduduk memiliki waktu yang cukup untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan, namun untuk meningkatkan kesejahteraannya mereka umumnya menunjukkan kebiasaannya yang lamban dan malas sehingga kemiskinan dan kekurangan menjadi bagian hidup mereka sehari-hari".[3]

Penderitaan masyarakat Blora semakin bertambah ketika pemenuhan kepentingan ekonomi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menuntut adanya jalur transportasi baru, yaitu jalur kereta api untuk mengangkut hasil pertanian dan hasil hutan. Tahun 1891 dibangun jalur kereta api Wirosari-Blora dan tahun 1896 dibangun jalur Rembang-Blora. Kota kecil Wirosari dan Rembang inilah pintu masuk menuju Semarang. Selain untuk pemenuhan kepentingan ekonomi Belanda, jalur baru ini juga untuk mengatasi daerah terisolir dan daerah bergolak.[4] Pembangunan jalur kereta api ini membutuhkan banyak tenaga kerja murah dan sekali lagi rakyat Blora yang harus menanggungnya.

Penyusuran Bengawan Solo yang dilakukan oleh seorang ahli teknik Geologi berkebangsaan Belanda bernama Andrian Stoop, bulan Januari 1893, dimulai dari Ngawi menuju Ngareng Cepu, membawa Kabupaten Blora memasuki periode baru, yaitu masa eksploitasi minyak bumi. Penemuan sumur-sumur minyak di berbagai tempat di sekitar Cepu disambut oleh Pemerintah Hindia Belanda

---

[3] *Ibid.*, hlm. 25-26.

[4] Noyo Gimbal melakukan perlawanan terhadap Belanda pada akhir Abad 19, yaitu pada masa Kabupaten Blora dipimpin oleh Raden Mas Cokronegoro. Sementara Samin Surosentiko melakukan perlawanan pada tahun 1890-1907. Setelah tersedianya alat transportasi kereta api, koran dari Semarang mulai bisa dibaca di Blora.

dengan mengeluarkan Konsensi (penguasaan) Tambang Minyak kepada perusahaan-perusahaan swasta dari negeri Belanda dengan masa konsesi selama 75 tahun. Menjelang Perang Dunia II, Pemerintah Hindia Belanda sudah memberikan kontrak dengan persyaratan waktu lebih singkat dan pungutan-pungutan Gubernemen yang lebih tinggi dari konsensi sebelumnya. Kontrak berjenis 5A tersebut sebanyak 43 konsensi dengan jumlah luas tanah seluruhnya 395.524 Ha.[5]

Eksploitasi yang dilakukan bangsa kulit putih terhadap kekayaan alam Blora, yang diwujudkan dengan eksploitasi hasil hutan dan minyak bumi, maupun eksploitasi terhadap masyarakat Blora sendiri melalui kerja paksa *blandong* dan kerja paksa lainnya, pada gilirannya telah memunculkan berbagai reaksi masyarakat. Sebagian mengekspresikan penderitaan dan kemiskinannya dengan melakukan kejahatan, seperti pencurian, perampokan, pembakaran desa dan lain sebagainya. Sebagian yang lain berhasil merumuskan kebencian kolektif mereka terhadap dominasi asing (penjajah), sehingga muncullah kelompok-kelompok yang berhasil membangun kesadaran bersama di bawah pimpinan tokoh tertentu. Terjadilah apa yang bisa dikategorikan sebagai gerakan perlawanan.[6]

---

[5] Lihat Tim Penyusun, *100 Tahun Perminyakan di Cepu*. (Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi PPT Migas, 1994).

[6] Lihat, Warto (2001), hlm. 207-212.

Bab II

Sejarah Perlawanan Rakyat Blora

PERLAWANAN pertama terhadap Belanda yang tercatat dalam sejarah Blora adalah apa yang dilakukan Naya Gimbal. Sekalipun belum ada data pasti tentang *Kraman Naya Gimbal*, tetapi Prof. Dr. Suripan Sadi Hutomo berani memperkirakan bahwa Naya Gimbal merupakan prajurit rakyat di bawah pimpinan Raden Tumenggung Aryo Sosrodilogo. Tokoh ini adalah pemimpin perlawanan rakyat Rembang yang berlangsung sejak 28 November 1827 dan berakhir 7 Maret 1828. Sekalipun sudah mengalami banyak kemenangan dan berhasil menguasai daerah Baurena, Padangan, Bancar, Kragan, Sedan, Lasem, dan Tambakbaya, serta mampu mengepung kota Blora, Rembang dan Tuban, tetapi kemenangan tersebut akhirnya lepas kembali karena kelengahan. Raden Tumenggung Aryo Sosrodilogo

kembali berkumpul dengan pasukan induk Pangeran Diponegoro dan akhirnya menyerah kepada Belanda pada 3 Oktober 1828. Tertangkapnya dua orang tokoh tersebut, memaksa Naya Gimbal yang bernama asli Naya Sentika, pulang ke kampung halaman dan mencoba mengobarkan perlawanan baru.

Api perlawanan yang dikobarkan Naya Gimbal berupa penyerangan terhadap desa-desa di wilayah Blora yang dianggap berpihak pada Belanda. Perlawanan ini disebabkan perasaan tertekan dan kemiskinan serta tuntutan berbagai kerja wajib yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan yang dilakukan Naya Gimbal membuat resah Bupati Blora Raden Mas Tumenggung Cokronegoro (1886-1908).[7] Ia mengirim pasukan di bawah pimpinan Pangeran Sumenep untuk menumpas kelompok Naya Gimbal. Dalam peperangan itu Pangeran Sumenep kalah dan kembali pulang ke Blora.

Kekalahan Pangeran Sumenep mengantarkan Raden Mas Cokronegoro kepada Kompeni Belanda untuk meminta bantuan bala tentara dari Semarang. Naya Gimbal tidak sanggup melawan pasukan Raden Mas Cokronegoro yang dibantu pasukan Kompeni Belanda dan akhirnya menyerah. Ia dibawa menghadap Residen Rembang dan selanjutnya dihukum mati dengan dipaku dalam *tong* dan dibuang ke laut. Atas jasa penumpasan Naya Gimbal, Raden Mas Cokronegoro mendapat penghargaan dari Gubernur Jendral.[8]

Berbeda dengan Naya Gimbal yang mengadakan perlawanan dengan mengangkat senjata, Samin Surosentiko melakukan

---

[7] Pasca Perjanjian Gianti (1755), jabatan bupati-bupati Kabupaten Blora didasarkan pada blesit Pemerintah Hindia Belanda sehingga Pemerintanar Kabupaten Blora saat itu adalah tangan panjang Pemerintah Hindia Belanda.

[8] Lihat Suripan Sadi Hutomo, *Tradisi dari Blora* (Semarang, Citra Almamater, 1996), hlm. 41-55. Tidak disebutkan nama Gubernur Jendral saat itu.

perlawanan jenis lain. Ia memilih cara 'pembangkangan sosial' dengan pemboikotan pembayaran pajak dan menolak berbagai jenis kerja wajib untuk kepentingan Belanda.[9]

Perasaan tertindas yang terakumulasi menjadi kesadaran bersama dan dikelola oleh seorang pemimpin seringkali menjadi gerakan perlawanan yang kuat dan tidak mudah untuk dimusnahkan. Demikianlah yang terjadi pada Samin Surosentiko dan para pengikutnya. Samin Surosentiko berhasil menjadi seorang guru dan mampu mengintegrasikan ajaran spiritual dan ajaran politik. Implementasi ajaran Samin dalam hal perlawanan terhadap pemerintah Kolonial Belanda adalah dengan jalan '*nggendheng*' (istilah Jawa yang berarti menggunakan logika yang berbeda dengan logika masyarakat umum).

Kuatnya pengaruh ajaran Samin ditunjukkan oleh laporan Residen Rembang yang menyatakan bahwa pada tahun 1903, jumlah orang Samin sebanyak 772 orang dan pada tahun 1907 sudah berkembang menjadi 5.000 orang. Dari sisi cakupan teritorial, ajaran Samin yang berasal dari Klopodhuwur Blora akhirnya meluas sampai ke wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Madiun, Jember, Banyuwangi, Purwodadi, Pati, Rembang, Kudus, Brebes, dan lain-lain.

Pada 8 November 1907, Samin Surosentiko diangkat oleh para pengikutnya sebagai *Ratu Adil* dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam. Namun 40 hari setelah penobatan itu, Samin ditangkap Raden Pranolo (Asisten Wedono Randublatung Blora) dan ditahan di *tobong* bekas pembakaran batu *gamping* untuk selanjutnya dibawa ke

[9] Menurut Pramoedya Ananta Toer, sebelum Belanda mampu menguasai Aceh, -uah satu daerah di Residen Rembang, perlawanan masyarakat Samin tidak sebatas pembangkangan sosial, tetapi juga dengan perlawanan fisik. (Wawancara dengan Pramoedya, 6 Januari 2004).

Rembang. Setelah diinterogasi di Rembang, Samin bersama delapan pengikutnya dibuang ke Sumatera Barat. Tahun 1914 Samin Surosentiko meninggal di Padang.[10]

Memasuki abad ke-20, tercatat sebuah peristiwa di wilayah Kawedanan Ngawen, yaitu terbunuhnya Wedana Ngawen dalam peristiwa *Geger Munggur* tahun 1916. Penyebab terbunuhnya Wedana Ngawen adalah kemarahan masyarakat Punggursugih akibat adanya *cikar* yang keluar masuk desa Punggursugih. Cikar itu biasa digunakan mengangkut *kapuk* dari dan ke gudang kapuk yang ada di dalam desa. Gudang tersebut milik seorang keturunan Cina. Karena cikar dihadang penduduk setempat dengan alasan merusak jalan desa yang belum beraspal, maka sang pemilik melapor kepada Wedana Ngawen. Wedana Ngawen mengirim seorang *opas* tetapi tidak digubris penduduk sehingga Wedana Ngawen marah dan berusaha menangkap para pembangkang. Kedatangan Wedana Ngawen yang didampingi Mantri Polisi tidak membawa hasil. Sebaliknya, secara spontanitas masyarakat menyerang Wedana Ngawen hingga tewas. Jenasah Wedana dimasukkan ke saluran air (*got*) setelah sebelumnya dilempari batu.

Kematian Wedana Ngawen secara mengenaskan itu membuat Belanda marah. Sore harinya, beberapa truk serdadu Belanda datang ke Punggursugih untuk menangkap anggota SI (Sarekat Islam) yang dianggap sebagai pelaku dan perencana pembunuhan.

Dalam peristiwa Geger Munggur ini, Mardjoeki (Ketua SI) dan beberapa anggotanya; Pasripin, Suradjan, Marto Mbako, Ikhsan, dan lainnya, berhasil ditangkap Kompeni Belanda. Beberapa tokoh

[10] *Ibid.*, hlm. 11-38.

diasingkan ke Digoel dan beberapa yang lain dihukum antara 8 sampai 10 tahun.[11]

Kira-kira 10 tahun setelah peristiwa Geger Munggur, terjadi penangkapan terhadap Kartowidjojo dan menantunya, Sorkarman. Dua orang ini adalah tokoh Sarikat Islam Merah yang dikemudian hari berubah menjadi Sarekat Rakyat di Randublatung, Blora. Sarekat Rakyat di Randublatung pada tahun 1925, sudah mempunyai banyak pengikut. Dan karena dianggap membahayakan kepentingan Belanda, dua tokoh Sarekat Rakyat ini ditangkap dan dibuang ke Digoel.[12]

---

[11] Herman, *Menuju Dalam Perjalanan, Sejarah Perjuangan di Kabupaten Blora* (Dewan Harian Cabang Angkatan '45), hlm. 24 – 28.

[12] *Ibid.*, hlm. 29.

Bab III

Dendam 1948 dan Kemenangan PKI 1955

HAMPIR semua referensi dan para sejarawan selalu menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Madiun tahun 1948 adalah pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) atas Republik Indonesia. Pemberontakan itu akhirnya dapat ditumpas oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia). Di wilayah Kabupaten Blora, penumpasan PKI dilakukan oleh TNI Siliwangi, Brigade Ronggolawe dan pasukan-pasukan lain. Pertanyaan besar yang muncul kemudian: Dengan kekalahan tahun 1948, mengapa pada Pemilu 1955 di wilayah Kabupaten Blora, PKI masih mendapatkan kemenangan yang fantastis? Data yang dihimpun Arbi Sanit tentang hasil Pemilu

Anggota DPR tahun 1955[13] di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa PKI Kabupaten Blora memperoleh 80.996 suara, PNI (Partai Nasional Indonesia) 74.224 suara, gabungan antara NU (Nahdlatul Ulama), Partai Masyumi, dan PSII (Partai Serikat Islam Indonesia) 42.091 suara, sementara partai-partai lain mendapat 22.744 suara.[14] Hasil Pemilu untuk Konstituante --di Blora dilaksanakan pada bulan September tahun 1955-- tidak berbeda jauh dengan konfigurasi perolehan Pemilu bulan Desember 1955.[15]

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, perlu diingat bahwa sebelum tahun 1945, perselisihan antarkelompok ideologi di Indonesia belum dominan. Hal ini karena Bangsa Indonesia masih mempunyai musuh bersama yaitu Pemerintah Kolonial Belanda. Setelah dominasi Belanda mulai melemah barulah perselisihan antarkelompok ideologi di Indonesia mulai mengemuka. Perlu dicatat juga bahwa sektor-sektor strategis di Blora (sumber dan penyulingan minyak bumi) selalu menjadi wilayah perebutan, baik antara Belanda, Jepang maupun kelompok-kelompok tertentu sesama bangsa Indonesia.

Jika ditarik ke belakang, dengan menyerahnya Belanda kepada Jerman pada Perang Dunia II (pemerintahannya mengungsi ke London) dan pengeboman Pearl Harbour pada 8 Desember 1941 oleh tentara Jepang, meluaslah peperangan sampai ke Asia. Kondisi demikian merupakan ancaman bagi Pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia yang saat itu sudah terputus dari pemerintah induknya. Di satu sisi Belanda harus mempertahankan sumber minyak

---

[13] Pemilu ini di Blora dilaksanakan bulan Desember 1955.

[14] Arbi Sanit, *Badai Revolusi, Sketsa Kekuatan PKI di Jateng dan Jatim.* (Pustaka Pelajar. 2000), hlm. 251.

[15] Wawancara dengan Sulistijono tanggal 18 Januari 2003.

sebagai bahan bakar perang. Di sisi lain, Jepang pasti juga akan berusaha menguasai sumber minyak sebagai kebutuhan pokok untuk menunjang ekspansi ke wilayah Asia. Untuk menghambat laju tentara Jepang maka tentara Belanda menggunakan taktik bumi hangus jika terpaksa meninggalkan sumber minyak yang dikuasainya.

Pada 1 Maret 1942, kesatuan darat dari tentara keenam belas yang dipimpin Letnan Hitoshi Mikmaru berhasil mendaratkan 120.000 tentara Jepang di tiga tempat di Pulau Jawa. Salah satu titik penurunan tentara Jepang adalah di Kragan, Rembang. Tentara dari daerah ini diarahkan untuk menguasai sumber minyak terbesar Belanda, yaitu di Cepu dan Surabaya. Hanya dalam tempo tujuh hari, pada 8 Maret 1942, Jepang memaksa Belanda untuk menyerah dan melimpahkan seluruh sumber minyak, sekalipun dalam keadaan rusak berat akibat taktik bumi hangus Belanda.[16]

Ketika datang ancaman dari Sekutu, usaha mempertahankan sumber minyak kembali dilakukan Jepang. Bentuk pertahanan itu antara lain berupa pembentukan kelompok *Seinenta I* yang beranggotakan para pemuda yang bekerja di perusahaan minyak tersebut. Menjelang akhir kekuasaan Jepang, tenaga kerja perminyakan Cepu diperkirakan mencapai 8.000 orang tenaga tetap[17], belum termasuk tenaga *romusha* (kerja paksa). Separuh dari anggota Seinenta I itu adalah kaum muda yang sudah mendapat pelatihan kemiliteran secara baik, sehingga bila dipersenjatai, sudah siap untuk bertempur.

---

[16] Tim Penyusun, *100 Tahun Perminyakan di Cepu* (Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi PPT Migas, 1994), hlm. 64-65.

[17] Pada waktu perusahaan minyak Cepu bernama Perusahaan Tambang Minyak Negara (PTMN) antara tahun 1945-1950, jumlah tenaga kerja perusahaan tersebut kurang lebih 12.000 orang.

Ini merupakan pencerminan adanya *Seinendan* dalam barisan pemuda minyak. Selain pertahanan yang berbasis tenaga kerja perminyakan, kalangan militer yang merupakan orang Indonesia (*Haiho*) juga ikut mempertahankan wilayah perminyakan.[18]

Setelah Jepang takluk kepada Sekutu, pengalihan kekuasaan atas perusahaan minyak Cepu dari tangan Jepang kepada pimpinan buruh setempat tidak menimbulkan banyak masalah. Pihak buruh diwakili Soekiban, tokoh Laskar Minyak yang kelak pada tahun 1948 berpihak kepada PKI.[19]

Sebagai tindak lanjut dari apa yang disebut Proklamasi Negara Soviet di Madiun, pada 18 September 1948, FDR/PKI (Front Demokrasi Rakyat/PKI) melakukan perebutan kekuasaan atas wilayah Karesidenan Semarang dan dilanjutkan dengan daerah Karesidenan Pati.[20] Pada 24 September 1948, Kudus dikuasai FDR/PKI. Pati dikuasai tanggal 25 September 1948 dan menyusul untuk kota-kota Blora, Rembang, Randublatung, Purwodadi, dan Cepu. Khusus wilayah Cepu, pasukan pro-PKI terdiri dari kesatuan Brigade Sudiarto, Laskar Minyak, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Buruh Kereta Api, Buruh Kantor Telepon, buruh PLN (Perusahaan Listrik Negara), buruh Kehutanan dan lain-lain.[21]

---

[18] *Ibid.*, hlm. 67.

[19] Menurut Herman dalam bukunya *Menuju Dalam Perjalanan*, penyerahan diwakili oleh pemuda buruh bernama Soekiban dari Laskar Minyak yaitu kelaskaran buruh minyak yang pada tahun 1948 berpihak pada PKI.

[20] Herman mengupas peristiwa ini secara lebih rinci.

[21] Panitia Penelitian Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Blora, *Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Blora* (Pemerintah Kabupaten Tingkat II Blora. 1987), hlm. 44.

Perebutan kekuasaan yang dilakukan FDR/PKI ini tentu saja mendapatkan perlawanan sengit dari pasukan TNI. Di antara serangkaian pertempuran yang terjadi antara TNI dan tentara pro-PKI, pertempuran paling dahsyat terjadi di kota Cepu. Dalam pertempuran ini, saling berhadap-hadapan antara pasukan pro-PKI dibantu Laskar Minyak yaitu buruh perminyakan yang pernah mendapatkan pelatihan kemiliteran dari Jepang melawan TNI, yang terdiri dari Brigade Ronggolawe, Kompi Bantuan Pimpinan Letnan Rianto, dan Brigade II/Siliwangi yang telah menguasai Madiun, Batalyon Daeng yang telah menguasai Maospati, Batalyon Kemal Idris dari Randublatung dan pasukan-pasukan lain dari sekitar Cepu.

Pertempuran di Cepu berlangsung seru selama delapan hari. Selama itu, silih berganti terjadi perpindahan kekuasaan sebanyak empat kali. Pada siang hari kota Cepu dikuasai TNI dan pada malam hari, beralih ke pihak pro-PKI. Pertempuran yang amat ketat ini tidak lepas dari keberadaan Laskar Minyak dan buruh-buruh lain, yang merupakan penduduk asli Cepu sehingga lebih menguasai medan. Di pihak lain, pasukan TNI jelas lebih terorganisir dengan persenjataan yang lebih lengkap.

Kota Cepu baru dapat dikuasai sepenuhnya oleh TNI pada 8 Oktober 1948. Pasukan pro-PKI mundur meninggalkan kota sambil melakukan pembakaran kilang-kilang minyak dan beberapa bangunannya. Sementara itu, bertemunya Mayor Kemal Idris, Mayor Daeng dan pimpinan Brigade Ronggolawe di kota Cepu, dipergunakan sebaik-baiknya oleh TNI untuk melakukan koordinasi dengan target operasi lanjutan menuju kota Blora.

Melalui Randublatung, Batalyon Kemal Idris lebih dulu memasuki Blora pada 13 Oktober 1948 tanpa menghadapi perlawanan. Disusul Batalyon Daeng yang memasuki Blora melalui Jiken. Setelah Blora dapat dikuasai, Batalyon Kemal Idris melanjutkan gerakan menuju

Pati, sementara Batalyon Daeng beralih kedudukan sebagai *bezetting troep* (tentara pendudukan) guna mengadakan pembersihan dan konsolidasi sampai memasuki wilayah Todanan.

Sewaktu menguasai Kabupaten Blora, sekalipun tidak lebih dari satu minggu yaitu pada akhir September 1948, PKI telah menyusun pemerintahan dengan sangat sederhana. Yang ditunjuk sebagai Bupati Blora pada saat itu adalah Boedisoejitro, sedangkan jabatan Patih diserahkan pada Soekiban, tokoh Laskar Minyak. Jabatan lain yang dibentuk PKI adalah Ketua Pengadilan, Jaksa dan lain-lain. Biasanya pimpinan Laskar Pesindo pro-PKI dijadikan Komandan Komando Militer.

Konflik politik bersenjata tahun 1948 di Kabupaten Blora, sekalipun tidak memakan waktu panjang, cukup banyak menimbulkan korban. Di antara para korban Peristiwa '48 itu setidaknya ada 7 tokoh terkenal, antara lain: Mr. Iskandar, Abu Umar, Gunandar, Kolonel Sunandar, Komisaris Besar Polisi Agil Kusumadya, Reksodiputro, dan Sumodarsono.

Mr. Iskandar adalah tokoh PNI yang juga menjabat sebagai Bupati Blora[22] sejak tahun 1945. PKI menculik Mr. Iskandar di Rumah Sakit Umum Pati karena saat itu ia sedang menjalani rawat inap. Mr. Iskandar dibawa bersama seorang dokter bernama Soesanto yang merawatnya, serta Camat Margorejo Pati bernama Oetoro. Tiga orang ini dibawa ke Blora dan dibunuh di Dukuh Pohrendeng, Tamanrejo, Tunjungan.

Abu Umar adalah anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) perwakilan dari Partai Masyumi dan satu-satunya anggota

---

[22] Sebelum menjadi Bupati Blora tahun 1945, Mr. Iskandar adalah *Presiden Landraad* (Ketua Pengadilan Negeri Blora) sejak zaman Belanda.

KNIP yang mengusulkan dibubarkannya TNI Masyarakat.[23] Setelah ditangkap PKI, ia dibawa dan dibunuh di Pohrendeng juga. Satu lagi yang dibunuh PKI di Dukuh Pohrendeng yaitu Kepala Kantor Pajak Bumi bernama Gunandar. Lima orang tersebut di atas ditemukan tewas mengenaskan di dalam sebuah sumur di tepi rel kereta api di Dukuh Pohrendeng.

Sumodarsono, anggota Komite Nasional Indonesia Daerah (sekarang DPRD) dari Partai Masyumi, juga ditangkap dan dibunuh PKI di hutan Mantingan, sebelah Utara Blora. Sementara Reksodiputro, anggota Laskar BPRI (Barisan Pejuang Rakyat Indonesia) yang lalu pindah menjadi Laskar Sabilillah, meninggal secara misterius di dalam sumur. Diduga, Reksodiputro dibunuh oleh PKI juga.

Dua orang lagi ditemukan tewas dibunuh di hutan sebelah utara Desa Wulung Randublatung. Mereka adalah Kolonel Sunandar, Komandan Resimen XXVIII Divisi Siliwangi yang berkedudukan di Pati dan AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) Agil Kusumadyo, Kepala Polisi Karesidenan (sekarang Kapolwil) Pati berkedudukan di Pati. Keduanya ditemukan tewas mengenaskan di sebuah sumur dengan masih menggunakan pakaian dinas lengkap.

Nama-nama lain yang tercatat sebagai korban PKI pada 1948 adalah Sampan dan Markoem dari Randublatung. Sampan adalah anggota BPII (Badan Permusyawatan Islam Indonesia) sementara Markoem anggota Masyumi. Keduanya dibunuh dan dikubur di sebuah sumur di hutan, sebelah Utara Desa Wulung, Randublatung.

---

[23] Pembentukan TNI Masyarakat dilakukan Mr. Amir Syarifuddin sewaktu menjadi Menteri Pertahanan.

Pada 24 September 1948, PKI menguasai Ngawen dan berhasil menangkap 7 orang anggota Polisi. Tujuh orang tersebut yaitu: Agen Polisi Kelas II Soewardjan, Agen Polisi Kelas III Slamet, Agen Polisi Samsoedin, Agen Polisi Kelas III Martodidjojo, Agen Polisi Kelas II Boediman, Agen Polisi Kelas III Soekardi, dan Brigpol Soeratman. Lima orang yang disebut terakhir tewas di dalam lubang bekas WC (sekarang Kantor Kecamatan Ngawen) pada 31 September 1948, sedang Soewarjan dan Slamet bisa meloloskan diri.

Hari pertama PKI menguasai Cepu, tentara pro-PKI dengan dikawal Laskar Minyak melakukan penangkapan terhadap aparat pemerintah dan tokoh-tokoh partai, terutama PNI dan Masyumi. Di antara mereka yang tertangkap di Cepu yaitu: Agen Polisi Kelas II Hoetomo, Agen Polisi Kelas II Mardjali, Seno, Kliwon, dan seseorang yang tidak diketahui namanya. Kelima orang ini ditahan di desa Karangboyo, lebih kurang selama 5 hari. Setelah dibawa menuju Wonosari, lima orang ini dipertemukan dengan tahanan lain yaitu Soeloer dan Zaenal. Soeloer adalah guru Taman Siswa dan seorang aktivis PNI, sementara Zaenal adalah pejabat pabrik minyak. Setelah dibawa ke desa Suwareh (rumah Carik Suwareh), tujuh orang ini disiksa dengan menggunakan serangga (*krangkang*).

Di desa Suwareh, datang lagi dua tawanan yaitu Sarpin, kepala Polisi Sambong dan Soedhowo, Camat Sambong. Walhasil, sembilan orang yang ditangkap PKI digiring ke hutan dekat desa Suwareh untuk menyaksikan eksekusi terhadap Sarpin dan Soedhowo dengan menggunakan pedang.

Selang beberapa hari kemudian, tujuh orang yang tersisa dibawa menuju Blora melewati Sambong dan hutan Cabak. Di hutan Cabak inilah Soeloer dan Zaenal dibunuh. Bahkan, yang melakukan pembunuhan terhadap Soeloer adalah bekas muridnya sendiri

bernama Soewarjo. Lima orang lainnya akhirnya bergabung dengan tahanan lain di Blora.

Korban tewas lainnya saat berlangsung pertempuran (artinya tidak semua semata-mata dieksekusi pihak PKI) antara lain Letnan Soekardji dari TNI Ronggolawe. Adik mantan Kepala Desa Kamolan itu terkena peluru ketika terjadi pertempuran antara Tentara Merah dan TNI Ronggolawe di Bodeh-Kepoh, Randublatung. Tersebut juga nama Sawagi, pimpinan penyulingan minyak yang terbunuh oleh PKI.[24]

Berdasarkan uraian tersebut, setidaknya tercatat 22 (dua puluh dua) orang tewas di tangan tentara pro-PKI, selama terjadi Peristiwa 1948 di wilayah Kabupaten Blora (tidak menutup kemungkinan adanya korban lain yang tidak tercatat). Korban lain adalah korban penangkapan terhadap lebih kurang 368 orang dari berbagai wilayah di Kabupaten Blora. Korban penangkapan tersebut terdiri dari aparat pemerintah (Polisi, Kepala Pengadilan, dll.), tokoh-tokoh partai politik terutama PNI dan Masyumi, dan tokoh-tokoh lain yang berseberangan dengan haluan PKI. Ratusan tahanan yang berhasil ditahan PKI, dikumpulkan di Markas Pesindo di muka pasar Blora (saat ini asrama Polisi Perintis) dengan mendapatkan siksaan yang tidak manusiawi.

Seiring dengan terdesaknya tentara pro-PKI atas TNI, para tahanan digiring menuju Rembang dengan berjalan kaki dan sesampainya di Mantingan, diangkut dengan kereta api. Ketika posisi tentara pro-PKI di Rembang juga terdesak, tahanan dari Blora dan Rembang dikirim menuju Pati dengan kereta api juga. Di kota inilah para tahanan PKI berhasil dibebaskan oleh Kesatuan Mundinglaya/ Siliwangi.

---

[24] Panitia Penelitian Sejarah dan Hari Jadi Blora, *op.cit.*, hlm. 45.

Tidak ditemukan data pasti tentang jumlah korban di pihak PKI. Hanya saja, dari beberapa sumber diperoleh keterangan bahwa dalam Peristiwa 1948 di Kabupaten Blora, terdapat beberapa tokoh PKI yang tertangkap. Mereka antara lain: Wiji pimpinan Pesindo, Soekiban, dan Moelyadi dari Laskar Minyak, Gondo Saelan, Wukir, dan Sumarno. Para pentolan PKI itu menerima hukuman eksekusi di hadapan masyarakat banyak di lapangan Ngareng, Cepu dan lapangan Kepolisian/Bayangkara Blora. Korban lain adalah masyarakat sipil Cepu yang turut berperang untuk tentara pro-PKI.

Drama politik berdarah tahun 1948 yang dimulai dari Madiun, merupakan sejarah pahit bagi PKI di Kabupaten Blora. Akibat peristiwa tersebut, dalam beberapa tahun PKI 'tiarap' dari berbagai macam kegiatan. Ketika terjadi pembentukan DPRDS (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara) dan DPD (Dewan Pemerintah Daerah) Kabupaten Blora pada 1950, PKI tidak mendapatkan bagian untuk mendudukkan wakilnya. Baru pada 1953, Pengurus CS (Comite Seksi) PKI Kabupaten Blora mengajukan permohonan melalui surat tertanggal 28 Desember 1953, No. 1/Sek/53.[25]

Hari Selasa tanggal 23 Maret 1954, DPRDS dan DPD Kabupaten Blora mengadakan sidang yang di antaranya membahas permohonan PKI tersebut. Baru saja masalah itu diangkat, sudah terjadi pro dan kontra tentang relevan tidaknya masalah tersebut dibahas. Pihak pertama berpendapat bahwa masalah tersebut masih relevan untuk dibahas, karena DPRDS adalah pencerminan dari rakyat dan golongan. Dalam hal ini PKI berhak untuk menempatkan wakilnya di DPRDS. Sedangkan pihak yang kontra, antara lain diwakili Sumbaji

[25] Keterangan lain menunjukan bahwa mulai tanggal 19 Maret 1953 PKI Blora sudah berhasil membangun organisasinya kembali.

Dipoyuwono dari DPD berargumentasi pada peristiwa pemberontakan tanggal 18 September 1948 yang telah berhasil ditumpas oleh pemerintah sebagai alasan untuk menolak keterlibatan PKI sebagai anggota DPRDS.[26]

Perdebatan mengenai diterima atau tidaknya PKI sebagai anggota DPRDS semakin alot dan akhirnya diselesaikan melalui pemungutan suara dua tahap yang hasilnya:

I.a. Diterima atau tidak	: 23 Suara
b. Masalah ditanyakan ke Propinsi	: 1 Suara
c. Blangko (absen)	: 2 Suara
II.a. Diterima menjadi anggota DPRDS	: 8 Suara
b. Tidak diterima	: 15 Suara
c. Blangko (absen)	: 3 Suara

Dengan hasil tersebut, maka rapat DPRDS memutuskan bahwa permohonan PKI Blora untuk menjadi anggota DPRDS tidak dapat diterima.[27]

Pasca Peristiwa Madiun 1948 sampai tahun 1955, tidak ditemukan data yang signifikan yang mampu menggambarkan aktivitas PKI dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Umum 1955[28] di Kabupaten Blora. Kesulitan memperoleh data ini, di satu sisi karena tidak adanya narasumber yang mengalami masa-masa itu, apalagi yang mengetahui kebijakan dan aktivitas internal PKI. Di sisi lain, dokumentasi sejarah terutama yang berhubungan dengan PKI sangat terbatas. Sekalipun demikian, sebagaimana disebutkan di muka, bahwa pada Pemilu

---

[26] Panitia Penelitian Sejarah dan Hari Jadi Blora, *op.cit.*, hlm. 63.

[27] *Ibid.*, hlm. 64.

[28] Suara yang dianggap sah dalam Pemilu 1955 untuk wilayah Kabupaten Blora sebanyak 220.055 suara.

1955, PKI Kabupaten Blora telah berhasil mencapai kemenangan dengan perolehan 38 % suara. Partai lain, PNI 33 %, NU, Partai Masyumi dan PSII 19 % dan partai-partai lain 10 %.[29]

Sekadar mencari faktor-faktor yang mengantarkan kemenangan PKI di Kabupaten Blora dalam pemilu 1955, perlu ditunjukkan bahwa pada akhir masa pemerintahan Jepang, buruh minyak di Cepu diperkirakan berjumlah 8.000 orang. Jumlah ini meningkat pesat dan tahun 1950 mencapai 12.000 orang. Dalam waktu yang sama -- terutama tahun 1948-- Pesindo adalah salah satu organisasi kepemudaan terkuat saat itu. Besarnya jumlah buruh minyak (Laskar Minyak) di Cepu dengan dukungan Pesindo dan organisasi-organisasi buruh lain di sekitar Cepu yang sebagian besar sehaluan dengan PKI telah terbukti memberi perlawanan keras dan mampu mempertahankan wilayah Cepu untuk beberapa waktu dalam pertempuran melawan TNI. Perlawanan keras yang terjadi di Cepu itu tidak pernah terjadi di wilayah-wilayah lain dalam rangkaian operasi penumpasan pemberontakan Madiun.

Perlu dicatat juga bahwa kekalahan PKI tahun 1948 tidak berarti kemandegan organisasi-organisasi yang berafiliasi kepadanya. Baru dua hari setelah Amir Syarifuddin, pimpinan pemberontakan Madiun, tertangkap, Sekutu sudah kembali menyerang Republik dalam peristiwa Agresi II sehingga konsentrasi TNI lebih pada mempertahankan kemerdekaan. Kondisi ini menjadikan penanganan terhadap pemberontakan Madiun tidak berlanjut pada fase-fase yang bisa lebih merugikan PKI. Di wilayah Blora, beberapa pimpinan organisasi yang terlibat Peristiwa Madiun dapat ditangkap dan dieksekusi, tetapi seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya,

---

[29] Diolah dari tabel data Arbi Sanit, *op.cit.*, hlm. 251.

kuatnya ikatan dan doktrin ideologi anggota membuat PKI selalu bisa tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang sedang terjepit sekalipun. Anggota Pesindo dan para buruh yang terdiri dari masyarakat Blora dari berbagai wilayah mempermudah tetap terjaganya *ritme* konsolidasi dan propaganda ideologi. Dan karena masih utuhnya infrastruktur dan suprastuktur PKI di Blora, bisa digunakan sebagai pijakan menuju kemenangan dalam pemilu 1955.

Senada dengan gambaran di atas, menurut analisis Sulistijono, kemenangan PKI dalam pemilu 1955 tidak lepas dari besarnya organisasi-organisasi buruh semisal Laskar Minyak dan Pesindo, yang masih bisa melanjutkan aktivitas organisasinya sekalipun tahun 1948 banyak pemimpinnya yang tertangkap. Anggota Laskar Minyak dan Pesindo yang berhaluan sosialis, merupakan warga Blora dari berbagai wilayah, dan menjadi salah satu *simbol* perlawanan/kelompok yang paling ekstrem terhadap penjajah. Selain itu, menurut orang-orang PKI atau yang sehaluan, korban Peristiwa 1948 adalah orang-orang yang dianggap terlalu kooperatif terhadap Belanda atau Jepang. Sebagian dari mereka adalah pegawai Pemerintah Kolonial yang dengan mudah menjadi pejabat Republik setelah dikumandangkannya proklamasi.[30]

Meminjam tesis Arbi Sanit dalam bukunya *Badai Revolusi, Sketsa Kekuatan PKI di Jateng dan Jatim*, sangat jelas ditunjukkan bahwa dalam sebuah masyarakat yang miskin, PKI menemukan lahan subur untuk berkembang. Hal ini karena PKI mempunyai program-program yang realistis dan populis bagi masyarakat yang masuk dalam status sosial ini. Dalam konteks Jawa Tengah dan Jawa Timur, masyarakat miskin adalah para petani yang tidak memiliki lahan dan modal yang memadai,

[30] Wawancara dengan Sulistijono.

bukan hanya kelompok buruh seperti yang dicontohkan ajaran komunis dari negeri asalnya. Kondisi ekonomi dan sosiokultural inilah, di mana masyarakat petani dan buruh adalah mayoritas yang selalu dalam kondisi miskin, menjadikan PKI mendapatkan dukungan signifikan masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk Kabupaten Blora saat itu.

Dengan kemenangan yang diperoleh pada Pemilu 1955, maka pasca Pemilu 1955, PKI berhasil menempatkan wakilnya di Lembaga Legislatif, bahkan menduduki jabatan Ketua DPRD. Dalam DPD (Dewan Pemerintah Daerah) Kabupaten Blora, PKI memperoleh wakil sebanyak dua orang, sementara partai-partai lain, baik PNI, NU maupun Partai Masyumi, masing-masing satu wakil.[31]

[31] Tim Penyusun, *Mengabdi Kekaryaan, Perjalanan Sejarah Golongan Karya Kabupaten Blora.* (DPD II Golongan Karya Kabupaten Blora, 1993), hlm. 5, selanjutnya disebut *Mengabdi Kekaryaan.*

Bab IV

Menuju Blora 1965

Persaingan Antarpartai

Dalam rangka menyongsong pelaksanaan pemilihan umum yang direncanakan tahun 1965, suhu politik di Kabupaten Blora mulai memanas sejak tahun 1962-1963. Persaingan antarpartai politik dengan melibatkan massa dalam jumlah besar mulai gencar dilakukan, baik oleh masing-masing partai induk maupun oleh *underbouw* atau organisasi-organisasi mantel. Kegiatan-kegiatan yang bersifat *show of force* selalu mengisi momen-momen penting, misalnya hari besar nasional, hari ulang tahun partai, hari besar keagamaan ataupun rapat-rapat organisasi.[32] Khusus untuk peringatan hari ulang tahun partai, tidak selalu dipusatkan di kota Blora tetapi sering juga dilaksanakan di kecamatan-kecamatan sehingga mobilisasi massa juga dengan

[32] Wawancara dengan Amin Sukaji, Darno Wiwoho, dan Isnawoto.

melibatkan massa dari kecamatan lain. Sebagai contoh, menjelang tahun 1965, peringatan HUT (Hari Ulang Tahun) PKI Kota Blora dilaksanakan di Cepu.[33]

Tingginya semangat kepartaian saat itu, yang banyak dipengaruhi oleh pidato-pidato Presiden Soekarno, dengan sendirinya menjadikan masing-masing simpatisan partai turut andil dan merespon berbagai kegiatan yang dilakukan partainya.[34] Tiga partai besar yaitu PKI, PNI, dan NU selalu bersaing ketat untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Sementara Masyumi sudah tidak mengambil bagian lagi karena telah dibubarkan beberapa tahun sebelumnya.

Salah satu wujud persaingan antarpartai, adalah kompetisi dalam hal penampilan *marching band*. Masing-masing partai di Kabupaten Blora mempunyai kelompok *marching band*. PKI diwakili oleh *marching band* Pemuda Rakyat, PNI sekalipun hanya memiliki satu *set* alat tetapi mempunyai dua grup *marching band* yaitu Gerakan Pemuda Marhaenis dan Gerakan Wanita Marhaenis, demikian juga NU. Ansor, IPNU/IPPNU (Ikatan Pelajar NU/Ikatan Pelajar Puteri NU) maupun Fatayat, masing-masing memiliki grup *marching band*.[35] Kreativitas sering muncul ketika keinginan untuk tampil lebih sempurna terhalang oleh keterbatasan sarana. Ini ditunjukkan oleh PNI yang saat itu memiliki keterbatasan peralatan *marching band* dan relatif kalah dibanding dengan *marching band* partai lain. Guna mengatasi

---

[33] Wawancara dengan Warasyanto.

[34] Seperti aktivitas para guru yang aktif melakukan kampanye dan menggalang massa untuk mendukung partai tertentu, di antaranya PKI yang akhirnya berhasil membentuk PGRI Non-Vaksentral. Proses yang sama dilakukan para guru yang berafiliasi pada partai NU dan akhirnya membentuk Pergunu (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama).

[35] Wawancara dengan Amin Sukaji, Darno Wiwoha dan Warasyanto.

kekurangan ini, mereka menggunakan alat musik *kenthongan* yang disesuaikan dengan irama *marching band* dan untuk melatihnya didatangkan seorang pelatih dari Demak.[36]

PNI, sebagai partai 'penguasa' yang pada Pemilu 1955 berhasil mendapatkan suara 33%, mampu menempatkan kader-kadernya di hampir semua jabatan pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai desa. Sehingga, dalam setiap kegiatan PNI paling sukses dalam hal pengumpulan massa. Peran para pamong desa ini menjadi faktor yang sangat menentukan.[37]

Persaingan dalam memperebutkan sektor-sektor strategis lainnya, yaitu posisi-posisi politik, sosial dan ekonomi juga terjadi dengan jalan pembentukan organisasi-organisasi buruh. Pengorganisasian dan pembentukan organisasi-organisasi buruh ini dalam waktu yang relatif panjang, memunculkan kesan bahwa instansi atau perusahaan tertentu merupakan bagian dari kekuasaan partai tertentu juga. Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Permigan), Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), Kantor Telepon, PLN, dan Rumah Sakit Umum banyak didominasi orang-orang PKI. PNI banyak menguasai PT Perhutani dan jabatan-jabatan di pemerintahan. Sementara NU hanya mampu menduduki Departemen Agama.[38]

Senada dengan ketatnya persaingan di lembaga-lembaga pemerintahan dan perusahaan pelayanan umum itu, persaingan antar ormas *underbouw* partai ataupun organisasi mantel lainnya juga berlangsung ketat dan berimbang. Organ-organ itu mengambil wilayah garapan dunia kepemudaan, perempuan, kesenian, petani maupun sektor buruh dan profesi lainnya.

---

[36] Wawancara dengan Darno Wiwoho.

[37] Wawancara dengan Isnawoto dan Suwondo.

[38] Wawancara dengan Isnawoto dan Suwondo.

Beberapa organisasi pernah ada di Blora antara lain: Pemuda Rakyat, Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), BTI (Barisan Tani Indonesia), IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia), PGRI Non-Vaksentral (Persatuan Guru Republik Indonesia Non-Vaksentral), SOBSI dan Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Organisasi-organisasi tersebut diidentifikasi berafiliasi kepada PKI.[39] PNI memiliki *underbouw* GPM (Gerakan Pemuda Marhaenis), GWM (Gerakan Wanita Marhaenis), GSNI (Gerakan Siswa Nasionalis Indonesia), Pertani (Persatuan Tani Nasional Indonesia), LKN (Lembaga Kesenian Nasional), DMI (Djamiatul Muslimin-Nasional Indonesia) serta organisasi buruh SOKSI dan KBKKBM (Kesatuan Buruh Kehutanan Kesatuan Buruh Marhaenis). Sementara NU mempunyai organisasi-organisasi Gerakan Pemuda Ansor, Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, Lesbumi (Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia), Sarbumusi (Serikat Buruh Muslimin Indonesia), Pertanu (Persatuan Tani NU), dan Pergunu (Persatuan Guru NU). Organisasi-organisasi yang tumbuh dalam jumlah besar dan dalam waktu bersamaan ini tetap mempunyai pendukung riil sampai tingkat yang paling bawah, yaitu desa.[40]

Perang Isu

Semangat berkompetisi antar partai politik yang terjadi di wilayah Blora sebelum tahun 1965, sekalipun tidak setajam di Jawa Timur,

---

[39] Sebagian besar dari organisasi tersebut, secara formal bukan berafiliasi secara struktural kepada PKI, tetapi ada kesamaan garis-garis perjuangan (organisasi mantel).

[40] Wawancara dengan Iskandar Abdul Halim, Amin Sukaji, Darno Wiwoho, Isnawoto, dan Suwondo.

juga memasuki wilayah perang opini dan isu. Tuntutan untuk melaksanakan *land reform* (reformasi agraria) dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) menjadi isu utama yang digunakan PKI untuk menarik simpati masyarakat. Dalam setiap kesempatan, baik saat rapat umum ataupun rapat-rapat kecil lainnya, *land reform* dan UUPBH selalu dijadikan materi kampanye. Hal ini karena PKI menganggap bahwa hanya dengan melaksanakan undang-undang tersebut, kesejahteraan rakyat, terutama rakyat yang tidak memiliki lahan dan modal, bisa tercapai.[41] Selain menggunakan media rapat umum, PKI juga menggunakan media kesenian, yaitu dengan pementasan-pementasan berupa teater ataupun kesenian tradisional lainnya. Tema-tema "Tuan Tanah" secara tidak langsung menyindir para tuan tanah sebagai penghalang dilaksanakannya *land reform* dan UUPBH.[42] Secara lebih spesifik sindiran di atas mengarah pada PNI, karena banyak orang PNI yang memiliki tanah luas dan bisa dikategorikan sebagai tuan tanah. Sindiran PKI ini juga bisa mengarah kepada para kyai dan haji yang dianggap mempolitisir para santrinya sebagai pekerja di sawah.[43] Sekalipun isu-isu seputar *land reform* disampaikan secara gencar, tetapi di wilayah Blora tidak ditemukan data yang signifikan yang bisa membuktikan terjadinya aksi sepihak, yaitu perebutan tanah secara paksa yang dilakukan PKI. *Land reform* sebagai materi kampanye ternyata tidak hanya didominasi oleh PKI. PNI dengan intensitas yang lebih kecil juga menggunakan isu tersebut.[44]

---

[41] Wawancara dengan Ahmad Mubarok dan Raden Mas Prapto.

[42] Wawancara dengan Ahmad Mubarok.

[43] Wawancara dengan Iskandar Abdul Halim.

[44] Wawancara dengan Darno Wiwoho, Sulistijono, dan Iskandar Abdul Halim.

Nahdlatul Ulama, sebagai satu-satunya partai besar yang berbasis agama, menggunakan identitas agama sebagai isu untuk menarik dukungan sekaligus sebagai proteksi atas ajaran atau paham yang dianggap bisa mengganggu posisi agama. Pilihan demikian menjadikan wilayah isu yang dipakai partai ini, selain nilai-nilai agama melalui dakwah-dakwahnya, juga memberi porsi yang cukup besar terhadap isu tentang ancaman yang bisa muncul dari ajaran-ajaran yang dianut partai lain, terutama PKI. Kuatnya opini bahwa PKI adalah *atheis* mengarah pada *atheisme* sebagai sasaran tembak yang terus dibidik dan menjadi isu yang efektif guna penguatan ideologi partai. Sekalipun tidak ditemukan bukti-bukti atau saksi langsung yang lebih faktual tentang *atheisme* PKI, semisal isu adanya pementasan kesenian yang bertema *Matine Gusti Allah* (Matinya Tuhan) atau yang semacamnya --padahal berita tentang hal ini sangat umum didengar dan disampaikan masyarakat-- ternyata tidak mampu menghapus *klaim* bahwa PKI identik dengan *atheis*. Fenomena demikian dipengaruhi faktor arus informasi dari luar daerah, terutama Jawa Timur maupun daerah-daerah lain. Kerasnya pertarungan ideologi, sampai pada pendiskreditan ideologi dan mencari titik lemah kelompok lain, dan kuatnya penilaian warga NU bahwa perilaku orang-orang PKI jauh lebih radikal (*progresif revolusioner*) dibanding kelompok lain, ditambah dengan tidak adanya program PKI yang menyentuh sisi agama,[45] memperkuat persepsi negatif warga NU terhadap PKI. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, sampai batas akhir keberadaannya PKI di Kabupaten Blora tidak pernah bekerja-sama atau membuat kesepahaman dengan NU.[46]

---

[45] Wawancara dengan Ahmad Mubarok. Karena PKI adalah partai politik maka agama tidak harus secara langsung diurus oleh partai politik.

[46] Wawancara dengan Darno Wiwoho.

Bagi sebagian warga NU, ancaman bagi NU tidak hanya datang dari PKI, tetapi PNI merupakan 'partai lain' yang perlu diwaspadai. Materi kampanye yang disampaikan para juru kampanye PNI yang menyebutkan bahwa "Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia", seperti disampaikan sewaktu rapat umum PNI di alun-alun Blora, sudah mampu membuat opini bahwa PNI dekat dengan PKI.[47] Di sisi lain, perbedaan basis kultural PNI dan NU, yaitu *'abangan'* dan *'santri'*, menimbulkan sekat di antara keduanya.

Berbeda dengan dua partai lainnya, isu-isu yang digunakan PNI lebih mengikuti garis-garis kebijakan yang disampaikan pimpinan nasional saat itu, yaitu Soekarno. Tema utama yang disampaikan dalam rapat-rapat umum, terutama sosialisasi wacana tentang pentingnya *Character Building* sebagai pondasi bagi berdirinya suatu bangsa. Oleh sebab itu, bahaya *Kapitalisme* dan *Imperialisme Internasional* dijadikan sebagai isu utama dalam setiap kampanye dan rapat-rapat umum. Hal lain yang juga menjadi isu kampanye adalah ide-ide tentang *Marhaenisme*, yaitu perlunya masyarakat mandiri dan berpendidikan, terutama pendidikan dan pengetahuan tentang politik. Karena apabila rakyat tidak faham politik, ia akan digilas oleh politik. Selaras dengan NU, PNI juga mendiskreditkan PKI karena keatheisannya.[48]

Isu-isu yang berkembang di media publik, seperti radio atau koran, bahkan informasi dari mulut ke mulut, yang datang dari Jakarta ataupun daerah lain, juga berpengaruh terhadap suhu politik lokal Blora. Wacana yang berkembang tentang perlunya mempersenjatai rakyat sipil melalui pembentukan Angkatan V, yang menurut

---

[47] Wawancara dengan Zubaidi. Zubaidi tidak ingat, kapan rapat umum itu dilaksanakan.

[48] Wawancara dengan Darno Wiwoho dan Isnawoto.

keterangan resmi diorientasikan untuk 'Pengganyangan Malaysia', namun bagi warga NU dan PNI ditafsirkan sebagai persiapan PKI untuk melakukan pemberontakan. Demikian juga dengan gencarnya desakan pelaksanaan *land reform* dan UUPBH, dianggap sebagai pembenaran dan tanda-tanda ancaman aksi sepihak yang direncanakan PKI.[49]

Masing-masing partai juga melakukan penafsiran yang berbeda terhadap Pancasila. NU sebagai partai yang berbasis agama cenderung menafsirkan Pancasila dengan muatan-muatan yang kental dengan nuansa agama. PNI lebih menafsirkan Pancasila dengan nuansa gotong royong, sedangkan PKI cenderung menggunakan pendekatan nilai-nilai sosialis. Cap-cap tertentu bagi orang-orang PKI pun dikembangkan. Orang-orang NU dan PNI mempunyai istilah '*Wong 48*' yang ditujukan kepada sebagian orang PKI. Cap ini secara tidak langsung mengingatkan pada 'pengkhianatan PKI' pada Peristiwa Madiun tahun 1948, sehingga membuat sentimen negatif kepada kelompok ini.[50]

Di tengah-tengah persaingan antarpartai yang semakin mengeras, baik kompetisi dalam bentuk *show of force* maupun perang isu yang saling mendiskreditkan, pada 13 Januari 1965 terjadi penyerangan dan pembunuhan terhadap jemaah sholat subuh di Kanigoro, Blitar, Jawa Timur. Berita yang menyebar dari peristiwa ini dengan samar-samar sampai ke Blora dan semakin menguatkan argumentasi bagi

---

[49] Wawancara dengan Amin Sukaji. Untuk menggambarkan tingkat perkembangan isu di daerah, Darno Wiwoho menceritakan juga bahwa pada waktu itu rencana pergantian menteri yang terjadi di Jakarta sekalipun sudah menjadi bahan pembicaraan orang-orang partai di tingkat desa.

[50] Wawancara dengan Amin Sukaji, Darno Wiwoho, dan Isnawoto.

warga NU bahwa PKI adalah atheis dan mengancam eksistensi agama.[51]

Kerasnya pertarungan isu yang dilontarkan masing-masing partai guna menarik simpati para pendukung dan persaingan *show of force* yang tidak berujung, serta upaya proteksi yang terkadang berlebihan atas ancaman partai lain, semakin mempertebal sekat-sekat kepartaian.[52]

Konsolidasi Internal Partai

Tingginya semangat kepartaian pada beberapa tahun menjelang 1965, dan besarnya pendukung aktif partai politik saat itu, secara langsung atau tidak langsung merupakan hasil dari kebijakan Presiden Soekarno yang memilih politik sebagai panglima, di samping konsolidasi internal partai yang dijalankan secara serius oleh semua partai. Pembahasan mengenai konsolidasi internal partai di wilayah Kabupaten Blora pada awal tahun 60-an, tidak bisa lepas dari pembahasan tentang media-media, yang secara efektif telah digunakan untuk proses ideologisasi. Begitu juga mengenai kerasnya persaingan antarpartai yang menimbulkan sentimen antarkelompok. Masing-masing partai mempunyai cara tersendiri untuk melakukan proses ideologisasi bagi para anggotanya, berbentuk lembaga kaderisasi [illegible] maupun memanfaatkan media-media lain yang lebih efektif dan bersifat massal.

---

[51] Wawancara dengan Zubaidi. Zubaidi tidak bisa menjelaskan secara lebih detail tentang peristiwa Kanigoro tersebut.

[52] Tentang perbandingan antara sebelum 30 September dan sesudahnya, Darno Wiwoho, Amin Sukaji dan Isnawoto sependapat bahwa apa yang terjadi adalah perubahan dari "*Adu kutut manjadi adu jago*".

PKI banyak dinilai sebagai partai yang paling progresif di Blora. Partai ini secara intensif melakukan pengkaderan sampai di tingkat desa. Proses pengkaderan dikemas secara sistematis dalam bentuk *short course* (kursus singkat) politik atau sekolah politik dengan menggunakan kurikulum sesuai tingkatan peserta. Pelaksanaan kursus politik ini dikelola dengan manajemen yang relatif modern pada zamannya, karena sudah berbentuk forum-forum dialog dan menggunakan studi kasus. Materi kursus politik ini mencakup prinsip-prinsip ideologi komunis dan beberapa undang-undang yang diberlakukan pemerintah. Intensitasnya cukup tinggi. Dalam satu waktu bisa berlangsung kursus politik di beberapa tempat yang berbeda. Hasil dari proses kaderisasi yang serius dan intensif ini membuat kader-kader PKI relatif lebih militan dan lebih banyak memahami perundang-undangan dibanding dengan kader partai lain.[53]

Selain konsolidasi yang diformulasikan dalam bentuk kursus politik, konsolidasi internal partai secara masal dilaksanakan dengan mengadakan rapat-rapat umum. Pengumpulan massa dalam acara-acara tertentu, misalnya peringatan Hari Buruh setiap tanggal 1 Mei, biasanya menghadirkan para orator yang mampu melakukan indoktrinasi nilai-nilai perjuangan partai dalam rangka proses ideologisasi.[54]

---

[53] Wawancara dengan Raden Mas Prapto, Isnawoto, Wiji Mulyono dan Sulistijono. Lebih jauh Sulistijono menjelaskan bahwa menjelang pemilu 1965, PKI di Blora sudah memiliki Sekolah Politik (SP), yaitu kursus nonformal yang disesuaikan dengan tingkatan kepengurusan para kader semisal tingkat desa, kecamatan ataupun kabupaten. Sekolah politik ini bertujuan supaya tidak ada kesalahan pemahaman tentang partai yang didukungnya.

[54] Wawancara dengan Suwondo.

Pementasan-pementasan kesenian dengan menampilkan tema seputar *Tuan Tanah*, *show of force* yang digarap dengan serius, penampilan *marching band* dalam karnaval yang diikuti massa dalam jumlah besar, serta pelatihan bela diri --khususnya pencak silat-- cukup efektif sebagai media propaganda dan konsolidasi internal partai. Ciri khas lain yang dimiliki PKI adalah kegigihan para kadernya mengajak orang lain untuk bergabung dalam organisasi-organisasi yang berada di bawah payung PKI dengan cara memaparkan program kerja partai yang nyata dan bisa dinilai serta dirasakan masyarakat awam. Gencarnya kampanye yang dilakukan PKI dengan target utama peningkatan dukungan masyarakat, di kemudian hari menjadikan banyak anggota ormas *underbouw* PKI, terutama orang-orang BTI, tidak tahu bahwa dirinya masuk menjadi bagian dari PKI.[55]

Konsolidasi internal partai NU memanfaatkan kultur sosial yang sudah ada. Secara informal, simpul-simpul para kyai di desa-desa, baik di *langgar* ataupun masjid, menjadi komunitas yang di dalamnya berlangsung proses kaderisasi dengan pola yang sangat beragam. Sebagian besar kyai mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada para santrinya, tetapi banyak juga yang mengajarkan ilmu-ilmu *kanuragan*, memberi *gemblengan* fisik dan 'mengisi' benda-benda tertentu, misalnya pemukul dari rotan, dengan doa-doa. Interaksi yang intensif antara kyai-santri, ketergantungan santri kepada kyai dalam memecahkan persoalan mereka, serta adanya sebagian santri yang di waktu malam tidur di *langgar* atau masjid, membuat proses ideologisasi dengan sendirinya terjadi sekalipun lebih bersifat tradisional-kekeluargaan. Di banyak wilayah di Kabupaten Blora, seperti Banjarejo, Tunjungan,

[55] Wawancara dengan Amin Sukaji, Isnawoto, Warasyanto dan Badri.

Ngawen dan Blora kota, kemunculan simpul-simpul masyarakat NU selalu dimulai dari peran dan keberadaan beberapa orang kyai.[56]

Para santri senior yang telah menguasai ilmu-ilmu kekebalan tertentu, baik yang didapat dari Blora sendiri maupun dari kota-kota lain, biasanya diberi kesempatan mempraktikkannya dalam atraksi kekebalan yang sering diadakan di Blora. Atraksi ini antara lain berupa memanjat tangga pedang, menggoreng telor di atas kepala, sepakbola api, memecah batu di atas tubuh, atraksi ditindih kayu besar (*lesung*), dibakar dalam api dan atraksi-atraksi lain yang semuanya bertujuan untuk menarik pengunjung dan membangun kebanggaan kelompok. Pola konsolidasi dengan pendekatan fisik ini merupakan jawaban dari opini yang terlanjur beredar di masyarakat bahwa PKI sudah mulai mempersiapkan gerakan-gerakan radikal yang bisa membahayakan keselamatan orang-orang NU.[57]

Selain itu, kegiatan-kegiatan keagamaan dengan mengumpulkan massa dalam jumlah besar, terutama pengajian umum, merupakan media konsolidasi internal partai yang hanya dimiliki partai NU. Forum-forum pengajian umum bahkan pengajian dalam rangka acara keluarga, semacam *khitanan* dan perayaan pengantin yang dilaksanakan dengan intensitas tinggi, tidak hanya dibebani dengan agenda dakwah keagamaan, tetapi juga mengusung isu-isu politik *ala* NU yang paling aktual sekalipun.[58]

Sementara itu, sebagai partai penguasa, PNI di Blora dalam melakukan konsolidasi internal partai sering menggunakan

---

[56] Wawancara dengan Amin Sukaji dan Kyai Ja'far Shodiq.

[57] Wawancara dengan Kyai Ja'far Shodiq. Narasumber adalah pelaku atraksi pada tahun 1965.

[58] Wawancara dengan Amin Sukaji.

pendekatan kekuasaan, karena sejumlah jabatan strategis partai seperti Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PNI, Ketua GWM, Ketua Pertani, dan jabatan partai lain dijabat rangkap oleh para pejabat pemerintah. Pamong desa sebagai jabatan yang sangat disegani masyarakat desa, rata-rata dijabat oleh orang PNI dan cukup efektif untuk memobilisir massa. Demikian juga dengan materi isu yang diambil dari ide-ide cemerlang Bung Karno, yang waktu itu menguasai wacana pemikiran kebangsaan, semakin mempermudah PNI dalam menanamkan ideologi kepada para pendukungnya.[59]

Secara umum, bentuk konsolisasi internal PNI --proses ideologisasi *Marhaenisme*-- adalah dengan melibatkan para kader dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan PNI atau ormas-ormasnya. Sedangkan kegiatan yang bersifat indoktrinasi, dilakukan dalam forum-forum pengkaderan dengan skala yang lebih kecil jika dibandingkan dengan yang dilakukan PKI.[60] Hanya sebagian kecil kader PNI yang mendapat kesempatan mengikuti *penggodokan*[61] dalam rapat umum yang dihadiri Presiden Soekarno di Senayan Jakarta. Mereka berangkat dari Blora dengan mengendarai angkutan truk.[62]

---

[59] Wawancara dengan Isnawoto dan Suwondo.

[60] Wawancara dengan Cuk Suwarno. Di daerah Randublatung, untuk mengimbangi kursus politik yang diadakan PKI, PNI juga mengadakan pengkaderan bertempat di rumah dinas Perhutani Randublatung.

[61] Penggodokan adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang PNI untuk kegiatan mendengarkan pidato yang disampaikan dalam rapat-rapat umum dan dihadiri tokoh-tokoh PNI termasuk Bung Karno.

[62] Wawancara dengan Darno Wiwoho. Darno tidak menjelaskan secara pasti, kapan acara tersebut dilaksanakan.

Bab V

1965 - 1966, Tabir Terkelam Sejarah Blora

Dampak G-30-S di Blora

Memasuki tahun 1965, suhu politik di Blora tidak jauh bergeser dari bulan-bulan sebelumnya. Persaingan antarpartai politik dengan segala *varian*nya tetap berlangsung, tetapi sampai sejauh itu, tidak pernah terjadi konflik fisik yang berarti antara partai satu dengan partai lainnya.[63]

Bahkan, ketika terjadi penculikan dan pembunuhan para jendral di Jakarta, di Blora tidak terjadi gejolak yang berarti. Baru pada 2-3 Oktober 1965, berita yang mencengangkan itu sampai di Blora melalui

---

[63] Wawancara dengan Darno Wiwoho, Amin Sukaji, Iskandar Abdul Halim, Isnawoto, Sungudi, Ahmad Mubarok, Badri dan Suwondo. Tidak ada indikasi terjadinya konflik fisik sebelum 30 September 1965.

siaran radio.[64] Berita yang sebelumnya diterima orang-orang tertentu, dalam waktu cepat segera menyebar dan menjadi bahan pembicaraan semua orang. Waktu itu belum jelas siapa sebenarnya para pelaku penculikan dan pembunuhan itu. Ketidak-jelasan ini menimbulkan pro dan kontra.[65]

Walaupun sebagian masyarakat --terutama warga NU--sudah mulai berani memperkirakan bahwa pelaku penculikan dan pembunuhan adalah PKI,[66] namun pada minggu pertama bulan Oktober 1965, belum ada pergerakan massa kecuali munculnya suasana mencekam karena masing-masing kelompok menunggu kepastian berita dan instruksi dari pimpinan partai masing-masing. Para pimpinan partai di tingkat Kabupaten mengalami hal yang sama, tidak ada kejelasan tentang apa yang harus dilakukan. Maka yang dilakukan hanya menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat.[67]

Baru setelah tanggal 5 Oktober, berita demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Jakarta dengan salah satu tuntutannya adalah pembubaran PKI, suasana di Blora ikut mengarah pada permusuhan secara terbuka terhadap PKI.[68] Bagi masyarakat NU Blora, tuntutan Ketua Umum PBNU, Idham Cholid, terhadap pemerintah untuk membubarkan PKI, dan disampaikan secara terbuka melalui berita

---

[64] Darno Wiwoho mendapatkan berita tentang penculikan dan pembunuhan di Jakarta sekitar tanggal 2-3 Oktober 1965. Waktu itu ia sedang memimpin rapat GSNI di Gedung GNI Blora dan didatangi Tarso Mangun Joyo (Wedana Blora/Tokoh PNI). Tarso menceritakan apa yang terjadi sambil membawa radio.

[65] Wawancara dengan Isnawoto. (Isnawoto tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari pro dan kontra).

[66] Wawancara dengan Sungudi.

[67] Wawancara dengan Darno Wiwoho dan Isnawoto.

[68] Wawancara dengan Darno Wiwoho.

radio, semakin meyakinkan mereka bahwa PKI memang harus dimusuhi dan dibubarkan.[69]

Tuntutan masyarakat untuk membubarkan PKI --imbas dari tuntutan serupa dari daerah-daerah lain– semakin memanaskan suhu politik Blora. Mobil patroli polisi terus berkeliling di jalan-jalan di Blora, menyampaikan imbauan dengan menggunakan pengeras suara. Suwondo (anggota PGRI Non-Vaksentral) mengatakan bahwa polisi menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk bersikap tenang. Namun menurut Ahmad Mubarok (Ketua IPPI), polisi mengumumkan bahwa pelaku kudeta di Jakarta adalah PKI.[70]

Reaksi terhadap Peristiwa G-30-S di Blora

Munculnya pernyataan resmi pemerintah melalui Pangkostrad/ Pangkopkamtib (Panglima Komando Strategis Angkatan Darat/ Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) Mayjen Soeharto, menyikapi Peristiwa 30 September 1965 --yang dimulai dengan ditemukannya kuburan para jendral tanggal 4 Oktober 1965 dan pemakaman para jendral tanggal 5 Oktober 1965, bersamaan dengan peringatan hari ABRI-- membawa babak baru pada konstalasi politik di Blora. Semua partai, ormas dan kelompok-kelompok masyarakat di luar PKI bertemu pada satu kesamaan sikap yaitu 'menghabisi' PKI. Dalam suasana yang mencekam, muncul perasaan lega karena pelaku Peristiwa Gerakan 30 September 1965

[69] Wawancara dengan Suwaji. (Suasana memanas terasa sampai Kecamatan Kedungtuban, kecamatan paling ujung, arah Tenggara dari Blora).

[70] Wawancara dengan Suwondo dan Ahmad Mubarok.

yang membawa korban tokoh-tokoh sentral Angkatan Darat itu sudah teridentifikasi.[71]

Dalam perkembangan selanjutnya, Pembina Kompi Hansip (Pertahanan Sipil) Bamunas[72] yaitu Soegeng Hoetomo dan Djasmani dipanggil Komandan Kodim (Komando Distrik Militer) Blora -- selaku Pelindung Hansip Bamunas-- untuk mengadakan *screening* (penjaringan) terhadap anggota Hansip Bamunas, kalau-kalau ada yang terlibat G-30-S.[73] Dari sejumlah anggota yang diperiksa, menurut ingatan salah satu anggota Hansip Bamunas, terseleksi satu orang yang dianggap terlibat PKI.

Pertengahan Oktober 1965, suhu politik di wilayah Kabupaten Blora sudah benar-benar memanas. Penangkapan[74] terhadap sejumlah tokoh PKI sudah dimulai.[75] Sebagai contoh, Darno Wiwoho sebagai aktivis GSNI, bersama tokoh-tokoh ormas kepemudaan lainnya, beramai-ramai mendatangi rumah Darmawan di desa Mlangsen, untuk menangkap tokoh PKI tersebut. Namun, usaha pengejaran dan penangkapan tersebut tidak membawa hasil karena Darmawan sudah melarikan diri.

Contoh lain adalah pengakuan Amin Sukaji, yang menjelaskan bahwa sebelum diberlakukannya Darurat Militer di wilayah Jawa

---

[71] Perasaan yang dirasakan Darno Wiwoho dan Sungudi saat itu, ketika sudah mendapat kejelasan bahwa pelaku G30S adalah PKI.

[72] Pembahasan tentang pembentukan Kompi Hansip Bamunas akan diuraikan kemudian.

[73] *Mengabdi Kekaryaan*, hlm. 16.

[74] Istilah yang digunakan saat itu adalah Pencidukan, Penggarukan atau Penangkapan.

[75] Wawancara dengan Darno Wiwoho, Isnawoto, Ahmad Mubarok dan Suwondo.

Tengah oleh Pangdam (Panglima Daerah Militer) VII/Diponegoro tanggal 26 Oktober 1965, sudah terjadi gerakan-gerakan pengejaran terhadap anggota PKI. Terbukti setelah penetapan Darurat Militer tersebut --di Blora dikenal dengan istilah SOB-- pengejaran terhadap anggota PKI yang biasanya dilakukan pada waktu malam hari dari pukul 20.00 sampai 05.00, tidak bisa dilakukan lagi. Ini menunjukkan bahwa pengejaran dan penangkapan terhadap anggota PKI di Blora sudah dimulai sebelum tanggal 26 Oktober 1965.

Pelaku pengejaran terhadap anggota dan simpatisan PKI berasal dari semua elemen masyarakat, baik warga NU, anggota PNI, ormas, dan aparat keamanan (Kodim dan Polisi). Anggota dan simpatisan PKI yang berhasil *diciduk* dan ditangkap diserahkan kepada aparat keamanan terutama Kodim.[76]

Awal November 1965, Hansip Bamunas ditarik masuk ke Markas Kodim 0721 Blora dan secara aktif dijadikan Badan Pembantu (di-BP-kan) di Kodim Blora dengan dilengkapi senjata.[77] Namun demikian, keterlibatan Hansip Bamunas atau personil Hansip Bamunas dalam pengejaran dan penangkapan anggota PKI bukan berarti baru dimulai pada waktu itu. Hal ini karena penangkapan anggota dan simpatisan PKI, sejak pertengahan Oktober 1965, juga sudah melibatkan anggota Hansip Bamunas.[78]

Pada 10 November 1965 --atau tanggal lain yang tidak jauh dari tanggal itu-- bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, di Gedung Rajawali (sekarang Gedung Sasana Bhakti), diselenggarakan *briefing*

---

[76] Wawancara dengan Sungudi.

[77] *Mengabdi Kekaryaan*, hlm. 16.

[78] Wawancara dengan Darno Wiwoho, Amin Sukaji, Sungudi, Ahmad Mubarok, dan Suwondo.

(pemberian petunjuk singkat)[79] yang dihadiri oleh Komandan Kodim dan tokoh-tokoh masyarakat Blora lainnya.[80] Saat acara *briefing* di dalam gedung belum selesai, massa pemuda yang berkumpul di depan gedung dan seputar alun-alun mulai tidak terkendali dan menyebar di Jalan Pemuda serta Jalan Mr. Iskandar serta melakukan perusakan terhadap toko-toko milik Tionghoa, anggota Baperki. Di antara sejumlah toko yang dibakar adalah toko milik Kuan yang terletak di sebelah timur Kantor Pemda sekarang. Sementara toko-toko lainnya, seperti toko Ijo di Jalan Mr. Iskandar, hanya dirusak dan dikeluarkan barang dagangannya.[81]

Menurut kesaksian Sungudi, Amin Sukaji dan Darno Wiwoho yang ikut dan menyaksikan peristiwa itu, pada waktu terjadi kerusuhan, sejumlah tentara dari RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat)[82] dan Kodim menjaga sejumlah toko. Dalam penjagaan itu, ada sejumlah toko yang seakan-akan dijaga dan diamankan dari amukan massa, namun ketika sejumlah anak muda melarikan diri karena takut suara tembakan yang dikeluarkan tentara, justru

---

[79] Menurut Sungudi, materi dari *briefing* adalah "Pengkhianat bangsa harus ditumpas!"

[80] Keterangan bahwa *briefing* tersebut diselenggarakan pada tanggal 10 November 1965 diperoleh dari Iskandar Abdul Halim yang saat itu menjadi panitia penyelenggara dan Yudi Sancoyo (saat itu masih pelajar SMP) yang waktu itu mencari bapaknya yang ikut hadir.

[81] *Mengabdi Kekaryaan*, hlm. 20 dan wawancara dengan Darno Wiwoho dan Amin Sukaji.

[82] Informasi lain menunjukkan bahwa kedatangan RPKAD masuk Blora setelah sebelumnya memasuki Kudus dengan cara terjun payung di alun-alun Kudus dan dilanjutkan *long march* (berjalan kaki) menuju kota Jepara, mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat Jepara.

kelompok-kelompok massa tersebut diperintahkan untuk kembali ke Jalan Mr. Iskandar, di mana perusakan toko sedang berlangsung.[83]

Mengenai kerusuhan di Blora tanggal 10 November 1965, pada malam sebelumnya juga sudah beredar isu tentang rencana perusakan dan pembakaran. Sungudi malam itu sudah mendengar kabar tentang rencana kerusuhan beserta peta sasaran dan sudah dipersiapkan minyak tanah untuk pembakaran. Sementara, Zubaidi mengetahui rencana kerusuhan pada pagi hari sebelum dimulainya *briefing*.[84]

Tanggal 11 November 1965, kerusuhan sudah meluas ke wilayah Kecamatan Tunjungan (sebelah barat Kecamatan Blora kota). Sasaran pertama adalah rumah Patmo (simpatisan PKI) di desa Tutup, Kecamatan Tunjungan. Rumah yang terletak di pinggir jalan tersebut, dirusak dan barang-barangnya dikeluarkan. Hari berikutnya perusakan menimpa rumah dan toko Nyah Jhoe, seorang Tionghoa anggota Baperki, menyusul rumah Prapto (simpatisan PKI). Kedua rumah itu juga terletak di desa Tutup, Kecamatan Tunjungan. Perusakan lebih parah lagi menimpa rumah Chum Bie (anggota Baperki) di desa Blingi, Sukorejo, Tunjungan. Rumah dan toko tersebut habis dibakar.[85] Pembakaran juga menimpa rumah Kardi, guru desa Burak, Kecamatan Ngawen.[86] Berdasarkan informasi,

---

[83] Karena takut oleh suara tembakan tentara, Darno Wiwoho lari dari Jalan Mr. Iskandar menuju Jalan Nusantara melewati lorong sebelah selatan rel kereta api. Namun, ketika sampai di Jalan Nusantara, Darno Wiwoho diperintahkan untuk kembali ke Jalan Mr. Iskandar oleh sejumlah personil RPKAD. Kesaksian Amin Sukaji menyebutkan bahwa di depan sebuah toko di Jalan Mr. Iskandar, aparat keamanan mengeluarkan tembakan peringatan ke atas, sementara aparat yang lain memerintahkan massa untuk melanjutkan aksinya.

[84] Wawancara dengan Sungudi dan Zubaidi.

[85] Wawancara dengan Kyai Ja'far Shodiq, Cuk Suharno, dan Isnawoto.

[86] Wawancara dengan Ahmad Suji.

perusakan atau pembakaran juga terjadi di Kecamatan Jepon, Cepu, Randublatung, Todanan dan daerah lain.

Pembentukan Wadah Baru

Kerusuhan yang terjadi secara sporadis di berbagai wilayah di Blora setelah acara *briefing* dan penangkapan anggota dan simpatisan PKI di berbagai tempat yang tidak terkoordinir membuat situasi politik di Blora semakin memanas. Kondisi ini dianggap sudah mengganggu keamanan di wilayah Blora, sehingga Dandim Blora Mayor Inf. Srinardi berinisiatif mengumpulkan tokoh-tokoh orpol (organisasi politik) dan ormas (organisasi masyarakat) yang berseberangan dengan PKI untuk membicarakan dan mensikapi keadaan tersebut. Berdasarkan hasil pertemuan para tokoh dan Dandim (Komandan Kodim), diputuskan pembentukan kesatuan keamanan yang bernama Hanra (Pertahanan Rakyat) Garuda Pancasila atau lebih dikenal dengan istilah Hanra Garuda Pancasila.[87] Penyusunan personil kepengurusan Hanra Garuda Pancasila, dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, yaitu di Kantor Kawedanan Blora dan dilanjutkan di Markas Kodim 0271 Blora.[88]

Sebagai kesatuan sipil yang lahir dan dibentuk bersamaan dengan terjadinya konflik besar pasca Peristiwa 30 September, Hanra Garuda Pancasila mendapat respon luas dari masyarakat, orpol maupun ormas kepemudaan. Dalam waktu singkat, anggota Hanra Garuda Pancasila menjadi sangat besar dan beragam, baik dilihat dari sisi organisasi asal maupun jumlah anggota. Menurut Iskandar Abdul

---

[87] *Mengabdi Kekaryaan*, hlm. 21.

[88] Wawancara dengan Iskandar Abdul Halim.

Halim, keanggotaan Hanra Garuda Pancasila diambil dari partai politik dan ormas selain PKI. Di antara organisasi kepemudaan partai politik adalah GP Ansor dan Pemuda Marhaenis, sedangkan dari ormas kepemudaan lainnya adalah Pemuda Muhammadiyah.

Dukungan sejumlah organisasi itulah yang menjadikan Hanra Garuda Pancasila menjadi organisasi yang sangat besar. Tercatat sebagai Pelindung Hanra Garuda Pancasila adalah Dandim 0721 Mayor Inf. Srinardi dan pembinanya adalah Endro Adiwijoyo dan Iskandar Abdul Halim. Anggota terbesar adalah dari Banser Ansor yang jumlahnya mencapai ratusan.

Lebih lanjut, Hanra Garuda Pancasila yang bermarkas di Jalan Pemuda Nomor 15 (sekarang Apotek Sukowaras) dilatih dasar-dasar kemiliteran oleh Kodim 0721 Blora bersama anggota RPKAD yang pada waktu itu bertugas 'mengamankan' wilayah Kabupaten Blora. Dalam menjalankan tugas membantu TNI dalam Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, sebagaimana tercatat dalam buku *Mengabdi Kekaryaan,* pasukan Hanra Garuda Pancasila telah berperan dalam:

1. Pelantikan Dan Kie Kecamatan se-Kabupaten Blora oleh Dan Yon dan Panca Tunggal (Muspida);
2. Memberikan informasi kepada TNI tentang tokoh-tokoh PKI yang bersembunyi;
3. Membantu pelaksanaan operasi pembersihan sisa-sisa Gerakan 30 September;
4. Turut membantu Kodim 0721 untuk mengadakan pengejaran dan pelacakan anggota/simpatisan PKI;
5. Membentuk Kiwal (Kompi Pengawal) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora; dan
6. Menjaga para tahanan politik anggota PKI.

Salah satu bentukan dari Hanra Garuda Pancasila adalah kesatuan Kiwal (Kompi Pengawal). Kesatuan ini dibebani tugas tunggal yaitu menjaga keselamatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora. Rekruitmen keanggotaan Kiwal diambil dari pegawai di berbagai instansi pemerintah Kabupaten Blora. Tercatat sebagai pengurus Kiwal adalah Moenandar (mantan Camat Kedungtuban), Heri Prawito dan Hendro Munyuk. Kesatuan ini dipimpin oleh Moenandar. Sekalipun tugas utamanya menjaga keselamatan Bupati, namun dalam perkembangan berikutnya Kiwal juga ikut dalam penumpasan PKI.[89]

Yon Ved Be 17 (Batalyon Veteran dan Demobilisasi Brigade 17), yang lebih dikenal dengan Brigade 17, juga ikut dalam penumpasan PKI tahun 1965. Pasukan Brigade 17 terdiri dari bekas Pelajar Pejuang Bersenjata, di antaranya adalah Tentara Pelajar. Kesatuan tersebut terdiri dari satu batalyon untuk tingkat propinsi Jawa Tengah dan satu kompi untuk setiap kabupaten. Pelantikan Brigade 17 ini dilakukan oleh Pepekuper Jawa Tengah/DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang saat itu dijabat oleh Pangdam Mayjen Soekotjo. Adapun Komandan Kompi Blora dijabat oleh Djeni Soenarto dengan 50 pasukan yang meliputi Cepu dan Randublatung. Setelah berhasil menumpas PKI, para anggota Brigade 17 mendapat tanda penghargaan dari Pepekuper Jawa Tengah/DIY.[90]

Sebagaimana disebutkan di atas, Hansip Bamunas[91] telah terlibat pada masa awal penangkapan anggota dan simpatisan PKI karena

---

[89] *Mengabdi Kekaryaan*, hlm.17.

[90] *Ibid.*

[91] Dari Radio Peking Cina, keberadaan Hansip Bamunas di Blora sering menjadi berita utama dengan menyebut kesatuan ini sebagai "Tentara Kuning yang sedang mengamuk." Wawancara dengan Sungudi, Darno Wiwoho, Isnawoto dan lain-lain.

keberadaanya memang sudah ada sebelum Peristiwa 30 September 1965. Hansip Bamunas adalah satu kesatuan pertahanan sipil yang dibentuk oleh sebuah organisasi para pengusaha swasta di Blora yang bernama Bamunas. Terdapat beberapa versi yang menjelaskan tentang kepanjangan Bamunas. *Pertama*, Badan Musyawarah Nasional,[92] *kedua*, Badan Musyawarah Pengusaha Swasta Nasional,[93] dan *ketiga*, Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta.[94] Bamunas merupakan organisasi pengusaha-pengusaha swasta di daerah Kabupaten Blora termasuk di dalamnya agen-agen minyak, kontraktor, penggergajian kayu, pedagang pasar dan pengusaha-pengusaha swasta lainnya.

Kepengurusan Bamunas dipegang oleh Djasmani, Ilyas, dan Soegeng Hoetomo. Ketiganya adalah EXPRA (Eks-prajurit) sekaligus pengusaha/agen minyak di kota Blora. Belum diketahui secara pasti kapan pembentukan organisasi Bamunas ini. Namun dalam perjalanannya, Bamunas telah membentuk kesatuan pertahanan sipil yang bernama Hansip Bamunas pada awal tahun 1965. Berdirinya Hansip Bamunas ini atas prakarsa Dandim Blora Mayor Inf. Srinardi, karena pada waktu itu semua kantor instansi pemerintah sudah memiliki kesatuan-kesatuan hansip yang tergabung di Markas Pertahanan Sipil Sektor XI Sub Sektor: 091101 Blora. Pada awal pembentukannya, Hansip Bamunas yang bermarkas di Markas Kodim Blora ini, beranggotakan para karyawan perusahaan di mana para pemilik perusahaan tersebut tergabung dalam Bamunas. Setiap perusahaan diambil dua personil. Jumlah Hansip Bamunas setelah mendapat tambahan anggota baru pasca 30 September 1965

---

[92] Wawancara dengan Sungudi.

[93] *Mengabdi Kekaryaan*, hlm. 15.

[94] Wawancara dengan Iskandar Abdul Halim.

mencapai satu kompi yang terdiri dari tiga pleton. Tercatat sebagai pembina Hansip Bamunas adalah Djasmani dan Soegeng Hoetomo dengan pelindung Dandim 0721 Blora Mayor Inf. Srinardi.[95]

Untuk menambah profesionalisme dalam bertugas, Hansip Bamunas dilatih dasar-dasar kemiliteran oleh Kodim 0721 Blora selama tiga bulan penuh di berbagai lokasi, di antaranya alun-alun Blora dan hutan desa Ngampel. Materi latihan meliputi: pemakaian pakaian dinas (baju dan celana PDL berwama coklat, helm, dan sepatu militer), PBB (Peraturan Baris Berbaris), serangan regu, serangan pleton/lambung, latihan menembak, dan ketabahan mental sebagai anggota hansip. Latihan selama tiga bulan tersebut ditutup oleh Dandim Blora tanggal 25 September 1965.[96] Dalam menjalankan tugasnya, anggota Hansip Bamunas masih mendapatkan gaji dari perusahaan yang mengirimnya.[97]

Pembentukan Hansip Bamunas dilakukan untuk mengisi kekosongan pasukan Batalyon 452 (sekarang Batalyon 410) yang sedang bertugas dalam Operasi Dwikora di Kalimantan, di bawah pimpinan Brigjen Soeparjo dan merupakan tindakan preventif atas aksi sepihak PKI.[98]

Pasca Peristiwa 30 September, keanggotaan Hansip Bamunas mengalami penambahan. Soeleman, anggota Hansip Bamunas yang dikirim dari perusahaan penggergajian kayu milik seorang Thionghoa

---

[95] Mengabdi Kekaryaan, hlm. 15-16.

[96] *Ibid.*

[97] Wawancara dengan Soeleman.

[98] Wawancara dengan Yudi Sancoyo. Brigjen Soeparjo adalah wakil dari operasi 30 September 1965 dan bertugas sebagai penjaga Istana Kepresidenan. Pada hari itu, ia mestinya bertugas di Kalimantan.

yang bertempat di depan Markas Kodim, mengatakan bahwa sebelum Peristiwa 30 September, jumlah anggota Hansip Bamunas yang mengikuti pelatihan kemiliteran selama tiga bulan tidak lebih dari 30 orang.[99] Sejumlah dokumen foto yang merekam sebagian kegiatan Hansip Bamunas --setelah mengikuti pelatihan militer selama tiga bulan-- juga menunjukkan bahwa anggota Hansip Bamunas hanya berjumlah kurang lebih 33 orang.[100]

Gambaran tersebut menunjukkan, tidak semua anggota Hansip Bamunas --yang pada akhirnya berjumlah 70 orang atau lebih-- bergabung dengan kesatuan ini sejak awal dibentuknya. Menurut Ahmad Sungep (anggota Hansip Bamunas), Peristiwa 30 September yang terjadi di Jakarta memunculkan reaksi spontan kelompok-kelompok agama di Blora --terutama Ansor dan Pemuda Muhammadiyah-- untuk turut membela agama dan negara dari ancaman PKI dengan bergabung menjadi anggota Hansip Bamunas.[101] Selain dari kelompok agama, anggota Hansip Bamunas juga terdiri dari para veteran dan eks-prajurit. Anggota Hansip Bamunas yang lain yaitu Na'iman Samanhudi, mengatakan bahwa satu kesalahan besar yang dilakukan Soegeng Hoetomo (selaku Pembina Hansip Bamunas) adalah memasukkan anak-anak Gapero (Gabungan Pemuda Royal, sebuah geng anak-anak muda di sekitar Blora kota tahun 60-an) sebagai anggota Hansip Bamunas setelah terjadi Peristiwa 30 September 1965.[102] Anggota baru Hansip Bamunas ini tidak

---

[99] Wawancara dengan Soeleman.

[100] Lihat *Mengabdi Kekaryaan*, hlm. 18-19.

[101] Wawancara dengan Ahmad Sungeb. Pendapat ini senada dengan pendapat yang disampaikan anggota Hansip Bamunas lain yaitu Ja'far Shodiq.

[102] Wawancara dengan Na'iman Samanhudi.

mendapat pelatihan militer secara penuh. Mereka hanya mengikuti pelatihan militer tahap dua dengan waktu pelatihan yang lebih pendek.

Kompi Hansip Bamunas disusun dengan struktur organisasi yang lengkap, di antaranya Komandan dan Wakil Komandan Kompi, Bagian Administrasi, Pergudangan, PHB, Pengibar Bendera, Penabuh Genderang, Pokpen Mahir (Kelompok Penembak Mahir), Humas, Komandan Pleton, Komandan dan Wakil Komandan Regu serta Anggota.[103] Di samping struktur tersebut, menurut salah satu anggota Hansip Bamunas, di dalam kesatuan tersebut ada sebuah regu khusus yang disebut RCR (Regu Central Rahasia) yang beranggotakan lebih kurang 10 orang.

Dalam tugas lapangan lainnya, juga masih dilakukan pembagian tugas. Ada yang bertugas mengejar anggota dan simpatisan PKI, menjaga tahanan, mengawal tahanan sampai lokasi pembunuhan dan ada yang khusus bertugas melakukan eksekusi. Pembagian tugas yang cukup ketat ini menjadikan beberapa anggota Hansip Bamunas tidak mengetahui secara penuh apa yang dilakukan anggota kesatuan Hansip Bamunas lainnya.[104]

---

[103] *Mengabdi Kekaryaan*, hlm. 143-144.

[104] Salah satu narasumber, mantan anggota Hansip Bamunas mengatakan bahwa tidak semua anggota Hansip Bamunas mengetahui secara utuh tentang kegiatan yang dilakukan kesatuan ini. Ia juga menyalahkan anggota lain yang tidak mampu menyimpan rahasia korps, karena yang lebih berhak menceritakan tentang Hansip Bamunas adalah Komandan Hansip Bamunas. Dari keterangan ini, terkesan bahwa manajemen yang digunakan untuk para anggota Hansip Bamunas adalah manajemen tertutup sehingga ada di antara para anggota yang tidak sepenuhnya mengetahui kegiatan anggota lain. Demikian juga keberadaan Regu Central Rahasia, kemungkinan regu ini tidak hanya satu kelompok.

Karena intensitas kerja yang cukup tinggi, maka anggota Hansip Bamunas bertugas dengan sistem *aplus* (bergiliran). Sungudi mengatakan bahwa anggota Hansip Bamunas yang bertugas setiap malam sebanyak tujuh orang. Sementara Yudi Sancoyo yang waktu itu bertempat tinggal di samping rumah dinas Komandan Kodim, mengetahui bahwa setiap malam Dandim menyediakan nasi bungkus sebanyak 24 bungkus untuk para anggota Hansip Bamunas.

Penangkapan

Telah diutarakan di muka bahwa penangkapan, terutama terhadap para tokoh PKI sudah dimulai pada pertengahan Oktober 1965. Awal penangkapan ini sering dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak keamanan. Masing-masing kelompok masyarakat membuat inisiatif sendiri sehingga penangkapan berlangsung sporadis. Pola penangkapan semacam ini menimbulkan kekacauan di masyarakat, yang pada akhirnya meledak dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi di Blora kota dan merembet ke wilayah kecamatan lain seperti Tunjungan.[105]

Pendapat Suwondo menguatkan bahwa penangkapan sudah dimulai sejak pertengahan Oktober 1965. Hal ini didasarkan atas fakta penangkapan pada dirinya yang terjadi pada 11 November 1965 dan

---

[105] Wawancara dengan Darno Wiwoho. Keterangan tambahan didapat dari Sabar (anggota Pemuda Rakyat Purwodadi). Pada 8 Oktober 1965, Sabar melarikan diri dari Purwodadi karena istrinya yang Gerwani sudah ditangkap tentara dan massa. Pada tanggal tersebut kondisi Cepu, Blora dan Ngawen yang sempat disinggahinya masih relatif tenang. Bahkan, Sabar berkesimpulan bahwa tanggal tersebut di wilayah Blora belum terjadi penangkapan.

ketika ia masuk tahanan, sudah banyak anggota PKI yang ditahan.[106] Sekalipun lemah, Ahmad Sungeb mengatakan bahwa penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI baru dilakukan setelah tanggal 10 November 1965 (peristiwa kerusuhan). Pendapat Ahmad Sungeb yang demikian bisa jadi karena ia baru mulai ikut penangkapan pada saat ini.[107]

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai awal mula penangkapan, intensitas penangkapan menjadi lebih tinggi setelah terjadinya kerusuhan di Blora. Kerusuhan yang dimulai dari wilayah Blora kota, dikhawatirkan akan semakin meluas sehingga memunculkan inisiatif untuk memperkuat pengamanan di Blora kota dan sekitarnya. Inisiatif yang datang dari Dandim Blora dengan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat --baik partisan maupun non partisan-- ini diwujudkan dengan mendirikan wadah-wadah baru dan memaksimalkan wadah yang sudah ada. Dengan wadah-wadah inilah kemudian masyarakat, terutama melalui Hansip Bamunas dan Hanra Garuda Pancasila, berperan aktif dalam melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI, termasuk para *underbouw*nya.

Intensitas penangkapan setelah terjadi koordinasi antar-lembaga menjadi sangat besar dengan pola penangkapan yang beragam. Suwondo (anggota PGRI Non-Vaksentral) ditangkap pada 11 November 1965 dengan tuduhan menyimpan 300 buah bambu runcing. Penangkapan terhadap Suwondo dilakukan oleh Hansip Bamunas, Hanra Garuda Pancasila, dan Polisi. Setelah dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Blora, Suwondo diinterogasi dan dipaksa

[106] Wawancara dengan Suwondo.

[107] Wawancara dengan Ahmad Sungeb.

mengakui apa yang dituduhkan kepadanya. Karena tidak mengakui tuduhan tersebut, oleh seorang Polisi bernama Mintoyo, Suwondo dipukul dengan menggunakan popor senjata hingga semua gigi depan Suwondo tanggal.[108]

Pola penangkapan yang berbeda dialami oleh Badri (dituduh sebagai anggota Pemuda Rakyat). Waktu itu, 14 November 1965, Badri sedang *ngantri* air di sebuah sumur di dusun Ketangar (saat ini ditempati SPBU Karangjati). Ia ditangkap oleh perangkat desa (*bayan*). Menurut pengakuan Badri, ia difitnah oleh saudaranya sendiri (anggota PNI) yang tidak dipilihnya dalam pencalonan Kepala Dusun. Setelah dibawa ke rumah Ketua PNI Desa Karangjati, Badri dibawa ke Kantor Polisi dan ditahan di Gedung Garuda. Ia mengaku sama sekali tidak melawan saat ditangkap. Tanggal 24 Februari 1966, ia dikirim ke Nusakambangan sampai 23 Oktober 1970.[109]

Narasumber lain yang juga mengalami perlakuan tidak menyenangkan di dalam tahanan adalah Suparmin. Meskipun hanya empat bulan ditahan, namun ia mengaku dipukuli punggungnya dan kedua lututnya dipukul dengan popor senjata hingga luka parah. Bekas luka-luka tersebut masih tampak jelas sampai saat ini. Suparmin ditangkap karena dituduh sebagai anggota Lekra. Peralatan *reog* (kesenian rakyat) yang dipimpinnya tertempel gambar *Palu Arit*, logo PKI. Menurut pengakuannya, gambar tempelan tersebut ditempel oleh Kepala Desa Biting dalam sebuah 'Festival' yang juga diikuti grup *reog* milik Kepala Desa Biting itu. Pementasan dalam festival itu menjadi pementasan terakhir sebelum ia ditangkap aparat keamanan setingkat Koramil. Dalam persaingan antar-grup *reog*, Suparmin

[108] Wawancara dengan Suwondo.

[109] Wawancara dengan Badri.

mengaku grup *reog* yang dipimpinnya selalu menang sehingga mengundang iri dari grup *reog* lain, termasuk grup *reog* Kepala Desa Biting. Motif iri hati inilah yang menurut Suparmin menjebloskannya ke dalam tahanan waktu itu.[110]

Pengalaman lain disampaikan Warasyanto, anggota GSNI yang tertarik pada Lekra dan akhirnya masuk IPPI serta Pemuda Rakyat. Warasyanto ditangkap setelah terjadi perusakan terhadap rumah-rumah simpatisan PKI di Desa Tutup. Pelaku penangkapan adalah anggota Hansip Bamunas. Penangkapan ini karena ia kuliah di Universitas Rakjat (Unra). Kampus Unra sekarang digunakan SLTP Negeri II. Seluruh mahasiswa Unra ditangkap pihak keamanan karena dianggap aktivis PKI. Warasyanto ditangkap bersama 10 orang warga desa Tutup. Tiga orang dieksekusi, tiga orang ditahan di Nusakambangan dan sisanya ditahan di Blora. Orang-orang yang ditahan di Blora akhirnya dibebaskan, termasuk dirinya yang hanya ditahan selama tiga bulan. Pembebasan dirinya tidak lepas dari budi baik seorang anggota Hansip Bamunas yang bernama Wiyono yang juga warga desa Tutup.[111]

Narasumber lain yaitu Ahmad Mubarok. Ia adalah ketua IPPI Cabang Blora tahun 1963-1964. Kronologi penangkapannya dimulai sewaktu ia mendatangi pasar malam yang berlokasi di *Klenteng* di Jalan Pemuda. Tersebar fitnah bahwa ia mendatangi pasar malam itu untuk melakukan pembakaran. Menurut pengakuannya, fitnah itu bersumber dari Joyo Raharjo, anggota PNI dan Bestal, anggota IPNU. Ia ditangkap oleh anggota Hansip Bamunas dan dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi dan selanjutnya ditahan di gedung Garuda. Waktu

[110] Wawancara dengan Suparmin.

[111] Wawancara dengan Warasyanto.

diinterogasi, ia sempat dipukul punggungnya dengan kayu sebesar lengan oleh seorang anggota CPM bernama Kus. Ahmad Mubarok menjalani masa tahanan selama empat tahun di kantor CPM Blora.[112]

Salamun, penduduk Desa Berbak, Kecamatan Ngawen, menceritakan bahwa ia ditangkap oleh Polisi dan rakyat secara beramai-ramai ketika masih bekerja di sawah. Ia tidak tahu alasan apa yang menyebabkan penangkapan atas dirinya. Tetapi ia menyebutkan bahwa pada tahun 1953 sampai 1963 ia bekerja di perusahaan minyak di Palembang. Di tempatnya bekerja inilah ia mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) Kesatuan Buruh Kerja Indonesia (KBKI). Waktu pulang kampung, ia mendapatkan KTA dari PNI ASU (Ali Surahman). Setelah ditangkap, Salamun dibawa ke Kantor Polisi Ngawen untuk selanjutnya digiring dengan berjalan kaki sampai ke Blora (lebih kurang 12 km) dengan dikawal polisi.[113]

Mengenai cara penangkapan, menurut para pelaku adalah seperti apa yang diceritakan seorang anggota Hansip Bamunas. Ia menerangkan bahwa rencana penangkapan sudah dipersiapkan dengan pola yang rapi. Sebelum operasi penangkapan dimulai, para petugas dari Hansip Bamunas dibekali dengan data identitas target atau sasaran, bahkan sampai urusan teknis sudah dipersiapkan. Gambaran penangkapan dimulai dari pengetukan pintu rumah sasaran. Beberapa petugas lainnya mengawasi sekitar rumah agar sasaran tidak melarikan diri.[114]

---

[112] Wawancara dengan Ahmad Mubarok.

[113] Wawancara dengan Salamun.

[114] Wawancara dengan anggota Hansip Bamunas. Narasumber ini enggan menyebutkan siapa yang memberi data tersebut.

Para anggota Baperki yang sebagian besar terdiri dari etnis Tionghoa, tidak luput dari penangkapan yang dilakukan para petugas maupun masyarakat umum. Sekalipun demikian, sebagian besar dari mereka akhirnya dibebaskan. Salah seorang anggota Hansip Bamunas memberi kesaksian bahwa hanya ada satu orang dari etnis Tionghoa yang dieksekusi, yaitu dari Kecamatan Kunduran. Hal ini karena mereka menyuap aparat keamanan. Pendapat ini dikuatkan oleh Ahmad Mubarok, Badri, dan korban lainnya yang menjelaskan bahwa banyak tahanan, baik Tionghoa maupun yang lain, akhirnya dibebaskan dari hukuman mati karena menyuap pihak keamanan. Pada saat itu ada istilah *Dul Genuk*, yaitu istilah yang ditujukan kepada aparat keamanan yang sering meminta uang suap dari para tahanan.[115]

Banyaknya anggota PKI yang terjaring dalam *penggarukan*, dibutuhkan banyak tempat untuk menampung para tahanan. Tempat-tempat yang dipakai sebagai ruang tahanan antara lain: Gedung Rajawali (sekarang Gedung Sasana Bhakti), Kantor Pengadilan (selatan alun-alun Blora), Lembaga Pemasyarakatan Blora (waktu itu bertempat di pertigaan sebelah Barat Pendopo Kabupaten), Gedung Garuda, Gedung GNI (sekarang Kantor DPUK), gudang di sebelah Barat rumah dinas Bupati Blora Jalan Pemuda, dan gedung bekas STM di Jalan Perumahan Rakyat (sekarang Jalan Arumdalu).[116]

Sumber lain menyebutkan bahwa tempat-tempat penahanan tidak hanya di sekitar Kota Blora. Menurut Suparmin (anggota PNI desa Biting, Sambong), tahanan PKI di wilayah Sambong juga ditempatkan di kantor Kecamatan, Kantor Koramil, dan dua rumah warga di

---

[115] Wawancara dengan Ahmad Mubarok, Badri, dan anggota Hansip Bamunas.

[116] Wawancara dengan Darno Wiwoho, Amin Sukaji, Sungudi, Yudi. Sancoyo, Badri, Sulistijono, Naiman Samanhudi, Ahmad Mubarok, Ahmad Sungeb dan Warasyanto.

sekitar kecamatan. Untuk wilayah Kawedanan Cepu, tahanan ditempatkan di Gedung Baperki (sekarang SMKN Cepu). Sementara Isnawoto mengatakan bahwa para tahanan juga ditempatkan di Kantor Kecamatan masing-masing atau rumah warga sekitar.[117]

Penangkapan yang sudah dilembagakan dan di bawah koordinasi pihak keamanan, dengan melibatkan kesatuan Hansip Bamunas, Hanra Garuda Pancasila, Perangkat Desa, Polisi, Kodim, RPKAD, dan tokoh-tokoh ormas serta kelompok masyarakat lainnya, akhirnya berhasil menangkap anggota dan simpatisan PKI dalam jumlah ribuan. Badri yang ditahan di Gedung Garuda mengungkapkan bahwa tahanan yang ditempatkan di gedung tersebut mencapai 1000 orang lebih. Suparmin yang ditahan di Kecamatan Sambong memperkirakan bahwa jumlah tahanan lebih dari 500 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak. Sementara tahanan di tempat lain menyebutkan bahwa di setiap gedung yang ditempati dipenuhi dengan tahanan tanpa bisa memperkirakan berapa jumlahnya. Dari ketujuh tempat tahanan di Blora kota --dilihat dari ukuran luas relatif sama- - ditambah dengan tempat-tempat penahanan di kecamatan lain, diperkirakan jumlah tahanan anggota PKI dan para simpatisannya untuk seluruh wilayah Kabupaten Blora melebihi angka 10.000 orang.[118]

Para tahanan yang ditempatkan di seluruh tempat tahanan di Blora kota mendapatkan perlakuan tidak manusiawi oleh para petugas. Perlakuan tersebut berupa *penggundulan* dan setiap pagi atau sore *diarak* menuju sungai-sungai terdekat untuk mandi atau memenuhi kebutuhan lainnya. Para tahanan yang bertempat di Gedung Rajawali, LP Blora,

---

[117] Wawancara dengan Suparmin dan Isnawoto.

[118] Wawancara dengan Badri, Suparmin dan korban-korban lain.

Kantor Pengadilan dan GNI *diarak* menuju sungai Lusi. Gambaran tentang iring-iringan tersebut disampaikan Zubaidi dengan menyebutkan bahwa, ketika barisan pertama –barisan berlapis tiga- - sudah sampai di sungai, tahanan yang lain baru keluar dari tempat penahanan. Padahal jarak antara Gedung Rajawali sampai sungai Lusi lebih kurang satu kilometer. Para tahanan tersebut berjalan sambil menunduk karena sering diolok-olok oleh masyarakat yang kebetulan ada di pinggir jalan. Iring-iringan tersebut dikawal petugas keamanan, sehingga tidak ada yang mencoba melarikan diri. Zubaidi juga menyebutkan bahwa setiap hari jumlah barisan terus berkurang karena sudah dieksekusi.[119]

Banyaknya anggota dan simpatisan PKI yang tertangkap, tidak lepas dari pola interogasi yang memaksa tahanan untuk menyebutkan anggota dan simpatisan PKI di wilayah masing-masing.[120] Di samping itu, sering kali ada orang yang melaporkan kepada aparat keamanan tentang tokoh-tokoh tertentu yang dianggap terkait dengan PKI. Identifikasi keanggotaan PKI yang hanya didasarkan pada laporan orang per orang, membuka peluang terjadinya pencampuradukan antara kepentingan penumpasan PKI dengan permusuhan antarpribadi masyarakat. Terutama setelah paruh kedua masa penangkapan, banyak terjadi penangkapan terhadap seseorang yang lebih didasarkan pada konflik kepentingan antarpribadi. Orang lain yang bekerja pada satu kantor/instansi, yang menjadi pesaing dalam peningkatan karier, bisa menjadi korban karena laporan yang tidak semestinya.[121]

---

[119] Wawancara dengan Zubaidi.

[120] Wawancara dengan anggota Hansip Bamunas.

[121] Wawancara dengan Badri, Ahmad Mubarok, Darno Wiwoho, Cuk Suwarno, dan narasumber lain.

Penangkapan yang dilakukan oleh Hansip Bamunas, Hanra Garuda Pancasila, Polisi, Aparat Desa maupun kelompok-kelompok masyarakat lain selalu diteruskan dengan penyerahan kepada aparat keamanan.[122]

Pembunuhan dan Eksekusi

Pembunuhan atau eksekusi terhadap anggota dan simpatisan PKI di Kabupaten Blora dimulai pada sekitar awal bulan November 1965. Kesimpulan ini didasarkan pada keterangan Suwondo yang menyebutkan bahwa ia ditangkap pada 11 November 1965 dan ketika masuk tahanan, ia sudah mendengar istilah 'di-*bon*', yaitu istilah yang di kalangan tahanan dipahami sebagai pengambilan orang-orang dari dalam tahanan untuk dibawa ke tempat eksekusi.[123] Istilah lain yang juga sering digunakan adalah '*dipindah*'. Sebagian besar tahanan yang dipindahkan langsung dibawa ke tempat eksekusi. Diperkirakan hanya sebagian kecil saja yang benar-benar dipindahkan ke tempat lain.[124]

Berbeda dengan penangkapan yang dilakukan oleh banyak kesatuan dan kelompok-kelompok masyarakat, eksekusi atau pembunuhan hanya dilakukan oleh kesatuan Hansip Bamunas di bawah koordinasi aparat keamanan. Anggota Hansip Bamunas yang terlibat dalam eksekusi juga memberi kesaksian bahwa tidak ada eksekusi atau pembunuhan anggota dan simpatisan PKI yang

---

[122] Wawancara dengan Sungudi, Suwaji, Isnawoto, dan Darno Wiwoho.

[123] Wawancara dengan Suwondo.

[124] Wawancara dengan Suparmin.

dilakukan masyarakat sipil murni. Keterlibatan kesatuan Hansip Bamunas sebagai salah satu kelompok eksekutor ini ditunjukkan oleh pengakuan sebagian anggota Hansip Bamunas, termasuk juga kesediaan sebagian dari mereka untuk menceritakan proses eksekusi itu. Di sisi lain mereka juga menjelaskan posisi kelembagaannya, yang mereka akui sebagai kelompok *elite* sipil dan mendapat kepercayaan dari pihak keamanan. Anggota Hansip Bamunas lainnya memandang bahwa semua yang mereka lakukan adalah atas insteruksi aparat keamanan.[125]

Sekalipun kesatuan Hansip Bamunas adalah salah satu elemen yang turut melaksanakan tugas eksekusi, tidak semua anggotanya melakukan tugas ini. Sebagian dari mereka hanya menerima tugas penjagaan tahanan, sopir, pengawal tahanan sampai lokasi eksekusi atau tugas-tugas lain yang tidak berhubungan langsung dengan eksekusi. Bahkan ada beberapa orang yang tercatat sebagai anggota Hansip Bamunas tidak tahu atau salah dalam menceritakan beberapa hal yang berhubungan dengan Hansip Bamunas.[126]

Dari beberapa anggota Hansip Bamunas dan masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi eksekusi, diperoleh keterangan tentang tempat-tempat yang digunakan sebagai lokasi eksekusi antara lain: Kalidari dan Bendo desa Nglanjuk yaitu di tepi Bengawan Solo. Dua tempat ini oleh sebagian narasumber anggota Hansip Bamunas disebut sebagai 'belakang stasiun kereta api'. Tempat lain adalah di Kali Wedi (anak sungai Bengawan Solo) desa Kapuan Kecamatan

---

[125] Wawancara dengan beberapa anggota Hansip Bamunas.

[126] Petugas investigasi data menemukan beberapa anggota Hansip Bamunas yang tidak mampu menjelaskan/menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan Hansip Bamunas dan kemungkinan besar orang tersebut tidak terlalu aktif dalam kegiatan Hansip Bamunas.

Cepu, *Bong Bunder* sekitar Pasar Sore wilayah Kecamatan Sambong, Semanggi, tengah hutan di sebelah barat desa Ngampel, Kedung Waru Kecamatan Kunduran, Bengawan Menden, Pengkol Wirosari dan Mantingan Rembang.[127]

Secara umum, proses eksekusi dimulai dengan pengambilan para tahanan dari tempat tahanan masing-masing untuk dibawa ke Kantor Kejaksaan di Jalan Pemuda (depan Kantor Pos sekarang). Para tahanan diangkut pada tengah malam dengan menggunakan truk Perhutani atau truk Kodim untuk dibawa ke lokasi eksekusi. Sebelum truk pengangkut tahanan bergerak, Jalan Pemuda sudah diblokade aparat sehingga kendaraan umum tidak bisa memasuki jalan tersebut. Di Kantor Kejaksaan itulah para tahanan diikat kedua ibu jarinya, matanya ditutup dengan kain, lalu dieksekusi.[128]

Pak Tamim salah seorang sopir Hansip Bamunas menyebutkan bahwa ia mengantarkan tahanan tidak sampai ke lokasi pembunuhan. Ia menurunkan tahanan yang akan dieksekusi di tengah hutan atau di tengah jalan. Untuk sampai pada lokasi, sudah ada petugas lain yang mengawal.[129]

Menurut kesaksian Suparmin, truk-truk pengangkut tahanan yang akan dieksekusi, sudah sampai di Cepu sekitar pukul 9 malam. Perjalanan dari arah Blora melalui jalur Wonorejo—Nglanjuk—Tuk Buntung—Stasiun Kereta Api langsung menuju Kalidari, tepi Bengawan Solo di dukuh Pilang, desa Nglanjuk. Terkadang truk-truk tersebut berhenti untuk menurunkan dan mengambil penumpang yang

---

[127] Wawancara dengan Supadi, Muksin, Suparmin, Wiji Mulyono, dan beberapa anggota Hansip Bamunas.

[128] Wawancara dengan anggota Hansip Bamunas.

[129] Wawancara dengan Tamim.

ditahan di gedung Baperki Janar, Cepu. Di sepanjang perjalanan, banyak tahanan di atas truk yang membaca *takbir* atau *istigfar* keras-keras. Ada juga suara perempuan yang terus menangis dan berteriak memangggil bapak atau ibunya dengan suara keras pula.[130]

Setelah sampai di tempat eksekusi, seperti yang terjadi di Bendo pada masa awal eksekusi, tahanan yang baru turun dari truk langsung *dibrondong* dengan senjata laras panjang. Penembakan dengan cara ini menjadi sangat tidak efektif karena ada beberapa tahanan yang lolos dari tembakan. Salah seorang anggota Hansip Bamunas menceritakan bahwa ketika tahanan mulai turun dari truk, ada seorang tahanan yang kebetulan mantan anggota CPM mencoba melarikan diri. Anggota Hansip Bamunas tersebut mengejar tahanan itu sampai terjadi perkelahian satu lawan satu. Perkelahian itu berakhir saat ia 'membunyikan' senjata *Stangun* yang dibawanya dan tahanan itu tewas tertembus belasan peluru dari tangannya.[131]

Karena lokasi pembunuhan di Bendo relatif dekat dengan perkampungan penduduk dan suara tembakan membuat bising suasana malam, alat yang digunakan untuk eksekusi pernah diganti dengan menggunakan belati. Menurut eksekutor anggota Hansip Bamunas yang lain, pergantian alat eksekusi ini didahului dengan pelatihan teknis penggunaan belati dan diberi contoh oleh aparat keamanan. Cara melakukan eksekusi yaitu dengan menusukkan belati tepat di tenggorokan para korban.[132]

Anggota Hansip Bamunas tersebut juga menceritakan pengalamannya ketika melakukan eksekusi di Kalidari. Eksekusi yang

---

[130] Wawancara dengan Suparmin. Keterangan tentang suara-suara dari atas truk dikuatkan dengan kesaksian *Modin* Balun Kesehatan, Cepu.

[131] Wawancara dengan anggota Hansip Bamunas.

[132] Wawancara dengan anggota Hansip Bamunas.

dilakukan dengan penembakan jarak jauh sering menimbulkan lolosnya beberapa tahanan, maka sebagai gantinya penembakan dilakukan dengan menempelkan *loop* senjata jenis *Garrand* yang dipegangnya, tepat di belakang kepala korban sehingga isi kepala korban berceceran.[133]

Informasi yang didapatkan dari pengakuan anggota Hansip Bamunas lain, ketika melakukan eksekusi di daerah Semanggi para tahanan dipekerjakan terlebih dahulu untuk mengali lobang dengan ukuran tertentu pada waktu siang hari. Layaknya pekerja biasa, para tahanan tersebut diberi makan dan minum secukupnya. Kemudian pada malam harinya para tahanan digiring menuju galian yang sama dengan tangan terikat di belakang punggung. Dengan posisi kepala menunduk menghadap lobang dan berjongkok dengan kedua lututnya, para tahanan ditembak tepat pada tengkuknya. Setelah para korban tersungkur ke dalam galian tersebut, masyarakat sekitar tempat eksekusi menutup kuburan massal tersebut.[134]

Soeleman, anggota Hansip Bamunas yang bertugas menjaga tahanan dan tidak pernah melakukan eksekusi, pernah ditugasi untuk mengikuti proses eksekusi di sekitar hutan di Mantingan. Setelah para korban dieksekusi petugas lain, ia ditugasi memasukan mayat para korban ke dalam galian berukuran sekitar 4 x 2,5 meter. Selain menyeret mayat para korban dari jarak beberapa meter, ia juga sebisa mungkin harus membersihkan darah yang tercecer. Akibat menjalankan tugas ini, ia pernah trauma beberapa bulan.[135]

---

[133] Wawancara dengan anggota Hansip Bamunas.

[134] Wawancara dengan anggota Hansip Bamunas.

[135] Wawancara dengan Soeleman.

Tentang peristiwa pembunuhan anggota PKI di wilayah Blora, tidak semua narasumber anggota Hansip Bamunas bersedia memberi gambaran secara lebih rinci. Tetapi sebagian besar dari mereka mengakui pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses eksekusi. Kesediaan anggota Hansip Bamunas untuk menerima tugas pembunuhan waktu itu, didasari atas beberapa alasan, antara lain keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah 'tugas negara'. Anggota yang lain menyebutkan bahwa pembunuhan yang dilakukan saat itu merupakan instruksi pemerintah atau 'Gerakan Pemerintah'.

Secara umum alasan yang disampaikan para anggota Hansip Bamunas adalah: *pertama,* melaksanakan tugas negara; *kedua,* di bawah komando militer; *ketiga,* karena PKI kafir/atheis; *keempat,* dibenarkan oleh para tokoh agama; dan *kelima,* anggota Hansip Bamunas masuk dalam daftar orang yang akan dibunuh PKI.[136]

Sekalipun kelompok pelaku dan tempat-tempat eksekusi di berbagai tempat di Blora sudah diketahui, tetapi belum ditemukan angka korban yang mendekati kepastian. Isnawoto memperkirakan jumlah korban di seluruh wilayah Kabupaten Blora bisa mencapai lebih dari 3.000 orang. Salah seorang anggota Hansip Bamunas menyebutkan bahwa pembunuhan dilakukan setiap malam sebanyak dua truk. Setiap truk terdiri lebih kurang 25 orang dan peristiwa ini berlangsung selama tiga bulan. Anggota Hansip Bamunas lain menyebutkan bahwa setiap malam pembunuhan dilakukan terhadap dua atau tiga truk yang terisi 15 sampai 25 orang. Angka yang lebih kecil juga disebutkan salah satu anggota Hansip Bamunas bahwa satu truk berisi maksimal 12 orang dan satu minggu terjadi tiga kali pemberangkatan. Masih menurut salah satu anggota Hansip Bamunas,

[136] Wawancara dengan beberapa anggota Hansip Bamunas.

pembunuhan anggota dan simpatisan PKI baru berhenti beberapa minggu setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 1966.[137]

Berdasarkan keterangan dan kesaksian itu, bila dilakukan penghitungan angka korban di wilayah Kabupaten Blora, muncullah perkiraan jumlah angka terendah yaitu kurang lebih 400 orang, disusul angka 3.000 orang, 3.750 orang dan perhitungan tertinggi mencapai 4.500 orang.

Tingginya jumlah korban di atas disebabkan para tahanan tidak semata-mata berasal dari wilayah Kabupaten Blora. Mereka juga berasal dari Purwodadi, Pati, Kudus, Semarang, dan Rembang. Informasi asal-asul para tahanan ini didapatkan dari para anggota Hansip Bamunas yang sebelum melakukan eksekusi juga sering menanyakan asal-usul para korban, baik kepada korban sendiri maupun kepada tentara yang mengawalnya.

Anggota dan simpatisan PKI yang ditangkap di wilayah Kabupaten Blora dikategorikan menjadi tiga golongan yaitu golongan A, B, dan C. Golongan A dieksekusi atau dibunuh langsung di sekitar Blora, Golongan B dikirim ke Nusakambangan atau Pulau Buru, dan Golongan C ditahan di Blora sampai akhir masa penahanan. Di antara mereka yang dimasukkan Golongan B terdapat Badri, yang dikirimkan ke Nusakambangan pada tanggal 24 Februari 1966 bersama 180 orang, dan Suwondo yang dikirim pada 26 Maret 1966 bersama kira-kira 300 orang.

Prosesi pengiriman para tahanan menuju Nusakambangan, dimulai dari pengiriman tahanan dari Blora menuju stasiun kereta api Cepu menggunakan kendaraan truk. Selanjutnya tahanan dibawa menuju Semarang dengan menggunakan gerbong kereta api barang. Jendela

---

[137] Wawancara dengan Isnawoto dan beberapa anggota Hansip Bamunas.

gerbong ditutup dengan kayu dan penumpang berdesak-desakan di dalamnya. Dari Semarang baru dibawa menuju Cilacap untuk selanjutnya menuju Nusakambangan.

Sampai Maret 1967, Kompi Hansip Bamunas bersama Batalyon 410, Batalyon 408, Batalyon 409, dan BP RPKAD masih bertugas melakukan pembersihan sisa-sisa anggota PKI di Padepokan Suro Nginggil, Kradenan, Menden.[138]

[138] *Mengabdi Kekaryaan*, hlm. 29-30.

Bab VI

Adu Kutut, Adu Jago dan Konflik Ekonomi-Politik

REVOLUSI sosial dan kemanusiaan yang meledak tahun 1965-1966 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Amuk politik dan kemanusiaan, yang menurut para sejarawan dipastikan memakan korban ratusan ribu anak bangsa Indonesia dan sebagian di antaranya adalah rakyat Blora itu, berdiri di atas pondasi dan puing-puing sejarah yang terbangun puluhan bahkan ratusan tahun sebelumnya.

Peristiwa 1965-1966, harus diletakkan dalam konteks konstalasi sosial, ekonomi, dan politik nasional serta internasional saat itu. Bahwa pada masa-masa tersebut telah terjadi perbenturan dua kutub yang saling berseberangan, yaitu antara Kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika dengan Sosialisme di Eropa Timur. Dalam hal ini, Indonesia adalah sebagian dari 'medan pertempuran' yang diwakili

oleh kelompok-kelompok yang secara sadar atau tidak, berdiri dalam posisi Kapitalis, dan di pihak lain Komunis dan kelompok-kelompok yang sehaluan dalam posisi Sosialis. Kepentingan asing yang sedang berebut dalam menentukan konstalasi sosial, politik dan ekonomi internasional inilah yang mewarnai *susunan organis konfliktual* saat itu. Dalam konteks nasional, peta konflik semakin rumit karena adanya faktor kemiskinan, pencarian formula bentuk negara yang belum selesai maupun perebutan kekuasaan dan penyaluran kepentingan antarkelompok masyarakat di Indonesia sendiri yang tidak dapat terselenggara secara sehat. Permasalahan lokal --wilayah Kabupaten Blora-- baik dari sisi kultural, kepemimpinan, konflik lokal maupun faktor luar daerah yang datang dari pusat maupun daerah lain, merupakan beberapa faktor kunci yang ikut memicu peristiwa serta skala konflik yang berbeda dengan daerah lainnya.

Pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, telah memberi jawaban awal atas pertanyaan seputar peristiwa 1965-1966 di Kabupaten Blora. Sekalipun belum mampu memberi gambaran utuh, setidaknya telah 'membunyikan' fakta sejarah yang sebelumnya tidak pernah menjadi wacana publik. Pembahasan dalam Bab ini akan mencoba mencari jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar yang tidak tercakup dalam bab-bab sebelumnya. Konsekuensi lain adalah pemunculan data atau analisis baru sebagai bagian dari isi jawaban atas peristiwa berdarah itu.

Dua pertanyaan mendasar adalah: *Pertama*, mengapa fase konflik tanpa kekerasan sebelum Peristiwa 30 September 1965 berubah arah menjadi konflik berkekerasan? *Kedua*, motivasi ekonomi dan politik apa yang mendasari konflik berkekerasan saat itu?

Adu Kutut Menjadi Adu Jago

Sekalipun suhu politik di Blora diwarnai persaingan keras antarpartai politik yang sedang melakukan konsolidasi menjelang pemilihan umum yang direncanakan dilaksanakan tahun 1965, namun sampai akhir bulan September 1965 tidak terjadi kekerasan politik --dalam bentuk fisik-- baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun oleh negara. Kondisi ini berbalik arah menjadi konflik berkekerasan pasca Peristiwa 30 September 1965. Gambaran perubahan yang disetujui para pelaku, korban dan saksi sejarah saat itu adalah perubahan dari *'adu kutut'* (adu suara) menjadi *'adu jago'* (adu fisik).

Sebagaimana terurai dalam bab-bab sebelumnya, perubahan pola relasi antara PKI dan non-PKI (partai-partai lain saat itu) yang semula berbentuk kompetisi tanpa kekerasan dan berubah menjadi kompetisi berkekerasan bahkan berupa penangkapan, pembunuhan dan pembasmian, tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya suhu politik nasional, baik akibat berita pembunuhan para jendral maupun tuntutan pembubaran PKI di Jakarta. Berita tersebut ketika sampai di Blora menjadi faktor yang meningkatkan suhu politik lokal Blora.

Dilihat dari kronologi waktu, kira-kira sampai dua minggu pertama pasca 30 September, wilayah Kabupaten Blora diliputi suasana mencekam akibat ketidakjelasan berita dan orang-orang lebih banyak menunggu informasi lebih lanjut dari pusat.[138] Setelah ada pengumuman resmi pemerintah dan diikuti demontrasi mahasiswa di Jakarta serta tuntutan beberapa pimpinan ormas dan partai politik,

---

[138] Dalam pelariannya dari Purwodadi menuju Cepu, Blora dan Ngawen pada 8 Oktober 1965, Sabar melihat kondisi daerah-daerah tersebut belum diwarnai penangkapan terhadap anggota PKI.

di antaranya PB (Pengurus Besar) NU, konsentrasi 'kemarahan' barulah mengarah kepada PKI. Fase ini pun belum secara nyata berakibat penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI.

Penangkapan yang ditujukan kepada para tokoh PKI --masih dalam skala kecil-- baru terjadi pada pertengahan Oktober 1965. Namun dalam perkembangannya, penangkapan berskala besar akhirnya terjadi dengan target tidak hanya para tokoh melainkan juga anggota atau simpatisan PKI. Proses penangkapan ini mulai dilakukan pada pertengahan November 1965. Awal waktu penangkapan berskala besar ini, sedikit terlambat jika dibandingkan dengan penangkapan di kota-kota lain di Jawa Tengah, semisal di Semarang, Salatiga, Magelang, Solo, Wonogiri, dan Klaten. Sementara eksekusi atau pembunuhan adalah puncak krisis berkekerasan yang mulai terjadi pada pertengahan November 1965 dan baru berakhir beberapa minggu setelah hari raya Idul Fitri atau bulan Januari 1966.

Perubahan fase-fase konflik di wilayah Blora, yang dimulai dari perseteruan antarpartai dalam membangun konsolidasi partai dan berpuncak pada pembunuhan, merupakan cerminan dari semakin tertutupnya komunikasi yang sehat antara PKI dengan partai-partai lain serta kelompok di luar PKI. Ditambah lagi dengan adanya isu baru, kejadian baru dan keterlibatan kelompok baru dalam medan konflik yang semakin memperkeruh suasana yang sudah rumit.

Momentum utama yang menjadi awal penangkapan secara massal adalah terjadinya kerusuhan di Blora kota. Acara *briefing* di Gedung Rajawali tanggal 10 November 1965 yang dihadiri Dandim 0721 Blora dan tokoh-tokoh masyarakat berakhir dengan perusakan dan pembakaran toko-toko milik anggota Baperki. Kejadian ini menjadi alasan bagi aparat keamanan baik Kodim, RPKAD ataupun Kesatuan Banteng Raiders yang sudah berada di Blora, untuk melakukan

penggorganisiran dan pelatihan kemiliteran terhadap warga masyarakat guna operasi penumpasan PKI.

Pola yang hampir sama terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah, di mana 'keberanian' masyarakat untuk melakukan penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI baru muncul setelah kehadiran RPKAD. Kehadiran RPKAD di Semarang, Salatiga, Magelang, Solo, Wonogiri, dan Klaten sejak 13 Oktober 1965 diawali dengan *show of force,* dan selalu diikuti kerusuhan dengan melakukan perusakan dan pembakaran terhadap pertokoan di sekitar kota dan penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI.[139] Untuk wilayah Jepara, penangkapan dimulai sekitar awal bulan November 1965 yang didahului dengan terjun payung pasukan RPKAD di alun-alun Kudus dan dilanjutkan *long march* menuju Jepara. Kehadiran RPKAD ini disambut meriah masyarakat Jepara dan merupakan suntikan mental menuju penumpasan PKI oleh masyarakat.[140] Gambaran demikian menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara penangkapan yang dilakukan masyarakat dengan kehadiran RPKAD atau kesatuan lain. Untuk wilayah Blora, penangkapan semakin terorganisir secara rapi setelah terbentuk wadah-wadah baru yang diprakarsai oleh Dandim 0721 Mayor Inf. Srinardi, pasca kerusuhan.

Kerasnya persaingan antarpartai politik di Blora, baik antara PKI, PNI ataupun NU yang diwarnai proses ideologisasi menghasilkan fanatisme kelompok dan anggapan bahwa kelompok lain merupakan ancaman. Pada fase ini mulai muncul garis pemisah antara masing-masing partai, sekalipun jarak di antara ketiganya tidak sama. Antara PNI dan NU masih terjadi koalisi-koalisi kecil. Hal ini sama sekali

---

[139] Lihat, Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid IV (Mabes ABRI, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI). hlm. 143-155.

[140] Data investigasi FSAS Jepara, belum diterbitkan.

tidak terjadi dengan PKI. Keberadaan PKI yang cenderung ofensif dengan isu-isu tuan tanah, *land reform* maupun UUPBH merupakan ancaman bagi PNI dan NU. Apalagi, pencitraan bahwa PKI adalah *atheis* membuat legitimasi nilai-nilai agama mendapatkan tempat yang dominan.

Akumulasi dari isu dan berita tentang ke-*ekstrem*-an PKI, mulai dari sebutan PKI pemberontak, PKI melakukan pembunuhan sadis tahun 1948, PKI atheis, PKI mempersiapkan pemberontakan dengan mengusulkan dibentuknya Angkatan V, PKI akan melakukan aksi sepihak, PKI melakukan penyerangan dan pembunuhan jemaah subuh di Kanigoro Blitar, PKI mempunyai daftar hitam orang-orang Islam yang akan dibunuh, PKI sudah mempersiapkan sumur-sumur untuk pembunuhan dan hal-hal lain dijadikan sebagai 'fakta' yang diterima secara kolektif. Kondisi semacam ini membuat jalan komunikasi tertutup sama sekali dan tinggal menunggu terbakarnya sumbu peledak.

Peristiwa G-30-S yang terjadi di Jakarta, di mana kepada publik ditunjukkan fakta-fakta, seperti ditemukannya jenazah para jendral di Lubang Buaya, keterlibatan Pemuda Rakyat dan Gerwani sebagai bagian dari gerakan tersebut, keberadaan beberapa pimpinan PKI di lapangan Halim Perdanakusuma dan pengumuman resmi pemerintah bahwa pelaku G-30-S adalah PKI, telah meruntuhkan tembok terakhir yang bisa mencegah konflik berkekerasan.

Uraian tersebut menunjukkan berpadunya faktor lokal dan supralokal yang mengubah ketegangan menjadi ledakan konflik berkekerasan. Ketegangan awal itupun sebenarnya terbangun dari derasnya arus informasi yang mengalami berbagai distorsi dan penambahan sehingga terbangun 'citra diri' PKI sebagai kelompok *ekstrem* yang mengancam keamanan dan eksistensi kelompok lain. Ketika keberadaan suatu kelompok sudah dianggap ancaman dan

mengganggu eksistensi kelompok lain, dalam waktu yang sama muncul alasan untuk melakukan pembelaan, maka dari titik inilah muncul kekuatan untuk bergerak melakukan 'pembelaan' berupa tindakan kekerasan.

Ledakan peristiwa 1965-1966 di wilayah Kabupaten Blora, jika dibandingkan dengan jumlah korban di beberapa daerah di Jawa Tengah, terhitung cukup tinggi. Sekalipun tidak sampai pada penyebutan angka pasti, jumlah korban di Blora dimungkinkan hanya diimbangi oleh korban dari Kabupaten Klaten. Perhitungan ini mengacu pada terjadinya tindakan penangkapan dan pembunuhan secara massal di beberapa tempat di dua kabupaten tersebut.[141]

Tentu akan muncul pertanyaan, mengapa jumlah korban --baik penangkapan maupun pembunuhan-- di wilayah Kabupaten Blora begitu besar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dikemukakan beberapa hal, di antaranya faktor pengorganisiran dan identifikasi anggota dan simpatisan PKI serta penggolongannya.

Penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI, selain dilakukan oleh aparat keamanan, juga dilakukan oleh lembaga atau wadah yang mempunyai tugas khusus untuk melakukan 'pembersihan' ini. Bahkan, beberapa di antaranya didirikan sebagai reaksi balik atas Peristiwa G-30-S. Salah satu contoh adalah Hansip Bamunas yang didirikan sebelum September 1965 dengan jumlah anggota lebih kurang 30 orang, akhirnya mengalami pembengkakan jumlah anggota sehingga mencapai 70 orang. Wadah ini menjadi kelompok sipil terorganisir --sebagian anggotanya juga terdiri dari veteran dan eks-prajurit-- yang paling dipercaya oleh aparat keamanan untuk

[141] Data Lakpesdam NU Klaten dan Gapura Blora.

melakukan tugas-tugas khusus. Pelatihan kemiliteran yang dijalaninya telah membentuk sistem kerja dan sistem komando yang efektif.

Hal yang sama juga terjadi pada Hanra Garuda Pancasila. Wadah yang didirikan pada November 1965 ini memiliki jumlah anggota yang jauh lebih besar jika dibanding dengan Hansip Bamunas. Beberapa narasumber memperkirakan jumlah anggota Hanra Garuda Pancasila mencapai angka ribuan. Kesatuan ini terdiri dari perwakilan partai-partai politik selain PKI, ormas maupun perseorangan. Tentu saja dengan jumlah anggota yang demikian, wilayah kerjanya menjadi sangat luas sampai ke berbagai pelosok Blora. Tetapi karena jumlah anggotanya banyak, sistem kerja dan komandonya lebih tidak seefektif Hansip Bamunas.

Keberadaan wadah-wadah ini, tidak lepas dari prakarsa pimpinan militer saat itu, yaitu Mayor Inf. Srinardi yang juga bertindak sebagai pelindungnya. Dalam hal ini terlihat sekali posisi Militer, terutama Kodim, dalam melakukan pengorganisasian terhadap kekuatan kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka gerakan penumpasan PKI di Kabupaten Blora.

Besarnya korban dari pihak PKI, juga tidak lepas dari proses identifikasi. Kesaksian atau laporan masyarakat tentang siapa saja yang bisa dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI, sudah cukup sebagai bukti untuk melakukan penangkapan. Karena mekanisme yang demikian longgar, tidak jarang terjadi penangkapan terhadap seseorang karena sentimen pribadi atau konflik kepentingan antarpribadi masyarakat. Proses interogasi yang cenderung menggunakan pendekatan fisik semisal pemukulan, juga menghasilkan informasi daftar target operasi penangkapan yang lebih banyak lagi.

Keterlibatan kelompok sipil, di mana militer sebagai fasilitator terbentuknya wadah-wadah baru dan memberikan pelatihan semi militer, bukanlah fenomena khas Blora, karena Hanra Garuda

Pancasila juga berdiri di Jepara. Dalam hal ini terlihat adanya pola operasi yang sama yang dipakai oleh militer dalam mengorganisir masyarakat untuk melawan PKI. Dan pada tataran ini, terjadi titik temu antara kepentingan kelompok sipil dan kepentingan militer yaitu penumpasan anggota dan simpatisan PKI.

Motivasi Ekonomi dan Politik

Tahun-tahun menjelang 1965, kondisi perekonomian nasional mengalami puncak kemerosotan. Nilai tukar rupiah menurun tajam hingga mencapai 500%. Pada saat yang sama harga komoditas pokok yang dibutuhkan masyarakat melambung tinggi dan sulit didapatkan di pasar. Untuk mendapatkan bahan-bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak tanah, masyarakat harus antre panjang. Keadaan ini merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di Kabupaten Blora sendiri, pada 1963 terjadi zaman tikus yaitu mewabahnya hama tikus dan hama-hama lainnya yang mengakibatkan 15.788 Ha tanaman padi gagal panen. Kerugian saat itu diperkirakan mencapai 18.848 ton beras.[142] Kondisi ini masih diperparah dengan belum pulihnya sarana prasarana umum, seperti jalan dan jembatan akibat perang zaman revolusi fisik.

Pada saat yang sama, di Kabupaten Blora sudah terdapat beberapa pengusaha sukses, di antaranya adalah anggota Bamunas. Anggota Bamunas ini terdiri dari pengusaha-pengusaha pribumi maupun Tionghoa. Di antara mereka, terdapat beberapa pengusaha yang mendapat 'hak monopoli' sebagai distributor produk-produk penting

[142] Laporan Tahunan Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Tengah tahun 1966, hlm. 43-47.

yang dibutuhkan masyarakat, misalnya minyak dan gula. Soegeng Hoetomo, Djasmani, dan Ilyas adalah pengusaha-pengusaha yang mempunyai hak distribusi minyak dan gula.

Contoh lain tentang monopoli adalah usaha bisnis yang dijalankan Isnawoto (bukan anggota Bamunas). Waktu itu ia satu-satunya distributor *jarik* (kain batik) di Kabupaten Blora. Dalam satu bulan ia bisa memasarkan satu truk *jarik*.[143]

Rusaknya kondisi ekonomi yang disebabkan oleh faktor alam, melemahnya nilai tukar rupiah, tidak tertatanya sistem ekonomi maupun konflik partai-partai politik saat itu, berakibat pada kemiskinan masyarakat. Daya beli masyarakat menjadi sangat rendah. Semua itu turut berperan memperpendek 'sumbu kemarahan' masyarakat. Di sinilah PKI menemukan lahan subur bagi perkembangannya. Kemiskinan masyarakat telah berhasil dieksploitir untuk membangun perang antarkelas yang berarti dukungan besar bagi PKI dan ancaman bagi para pengusaha.

Di tengah gencarnya konsolidasi politik saat itu dan rusaknya ekonomi nasional, muncul pula gerakan 'politik' dengan pola depolitisasi. Gerakan ini merupakan ekspresi dari titik jenuh terhadap dunia politik yang dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan kenegaraan dan kebangsaan. Di sinilah tercapai titik temu antara kekuatan depolitisasi dengan kekuatan ekonomi yang terancam oleh kekuatan-kekuatan partai politik yang ada, terutama PKI.

Bentuk dari gerakan depolitisasi yaitu apa yang dilakukan ABRI dengan mengadakan penggalangan kekuatan-kekuatan fungsional yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Maka saat itu secara nasional terbentuk badan-badan kerja sama (BKS) di antaranya

---

[143] Wawancara dengan Isnawoto.

badan kerja sama buruh, tani, pemuda, wanita, dan ulama. Dari badan-badan kerja sama ini terjalin hubungan fungsional dengan militer.

Golongan fungsional ini pada akhirnya secara hukum setara dengan partai politik setelah terbit Surat Keputusan Presiden Nomor 193 tahun 1964. Saat itu di Kabupaten Blora, Golongan Fungsional, dan Golongan Karya ABRI telah mampu mendudukkan wakilnya di DPRD II Blora.[144] Pada saat yang sama keanggotaan Front Nasional terbagi menjadi dua, yaitu Golongan Politik dan Golongan Karya yang di dalamnya terdiri dari golongan fungsional yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Atas bantuan ABRI yaitu dengan memfasilitasi pertemuan-pertemuan,[145] pada 20 Oktober 1964 keberadaan Golongan Fungsional ini menghimpun diri dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Sejalan dengan proses perkembangannya, Sekber Golkar inilah yang digunakan sebagai kendaraan politik militer dengan kebijakan depolitisasinya.

Dalam kasus lokal Blora, benang merah antara proses penumpasan PKI dengan gerakan depolitisasi yang dimotori militer dan keterlibatan kelompok berkepentingan ekonomi, adalah pengorganisasian Hansip Bamunas. Sebagai tangan panjang dari para pengusaha yang tergabung dalam Bamunas, Kompi Hansip Bamunas menjadi kelompok yang paling terorganisir dan efektif dalam penumpasan PKI. Keterlibatan kelompok agama, veteran dan eks-prajurit dalam kesatuan ini, pasca 30 September 1965, merupakan permasalahan lain karena anggota-anggota baru tersebut tetap dalam komando para pembina Hansip Bamunas dan militer.

Benang merah tersebut semakin jelas ketika para tokoh pengusaha yang tergabung dalam Bamunas yaitu Soegeng Hoetomo dan

---

[144] *Mengabdi Kekeryaan*, hlm. 8-9.

Djasmani akhirnya menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah Sekber Golkar yang baru dibentuk di Blora tanggal 6 Juni 1966, atas intruksi Pangdam VII/Diponegoro.

Pertanyaan yang muncul, apakah PNI dan NU tidak mempunyai kepentingan politik untuk 'menyingkirkan' PKI sebagai kompetitor utama?

Tentu saja, dua partai politik ini mempunyai kepentingan yang sama untuk 'menyingkirkan' PKI. Apalagi bagi NU, keberadaan PKI yang dianggap *atheis* tidak semata-mata sebagai ancaman politik tetapi juga ancaman nilai-nilai agama. Tetapi justru karena kepentingan inilah, PNI dan NU berhasil masuk dalam proses penumpasan PKI yang diorganisir dan dimotori oleh tentara.

Bab VII

Luka yang Tersisa

Kayat bin Kasto Kasban: Pengawal Presiden yang Tukang Dawet[145]

"*YANG aku tunjuk dengan tongkat komando, keluar dari barisan!*" Kalimat pendek yang diucapkan Jendral Ahmad Yani inilah yang mengantarkan Kayat masuk Resimen Cakrabirawa. Sebelumnya ia anggota RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.

Dalam upacara Hari ABRI tahun 1962, Kayat berdiri nomor urut empat setelah tiga orang kawannya yang tidak dihampiri 'tongkat sakti' Jendral Ahmad Yani.[146] Proses *screening* yaitu tes psikologi, fisik

[145] Wawancara dengan Kayat bin Kasto Kasban tanggal 29 Januari 2003.

dan Bahasa Inggris dilewatinya dengan lancar dan Kayat resmi menjadi anggota Kesatuan Pengamanan Kepresidenan Cakrabirawa, yaitu Batalyon I Kawal Kehormatan (Yon I/KK). Kemampuan Bahasa Inggris Kayat, semakin bertambah setelah mengikuti kursus Bahasa Inggris selama enam bulan dengan tutor seseorang berkewarga-negaran India. Waktu itu, Kayat juga baru saja lulus pendidikan Calon Perwira.

Tahun 1964, Kayat dikirim ke Aljazair untuk misi perdamaian CONEFO (Conference New Emergency Force). Setelah tiga belas bulan di Aljazair, tanggal 7 Oktober 1965, seluruh pasukan diminta pulang ke tanah air. Namun sesampainya di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, seluruh senjata dilucuti dan tanpa interogasi sedikit pun, ia langsung dimasukkan ke LP (Lembaga Pemasyarakatan) Salemba.

Satu tahun terlewati di LP Salemba, tanpa interogasi, tanpa ada kejelasan sampai kapan selesai masa tahanan. Ketika Kayat dipanggil personil Angkatan Laut bernama Davi, dengan sopan Davi menjelaskan bahwa ia hanya melaksanakan tugas. Davi mengajukan dua pertanyaan sederhana yaitu kabar kesehatan dan asal-usul kesatuan. Kayat menjelaskan bahwa dirinya dari Resimen Cakrabirawa dan sebelumnya dari RPKAD di bawah komando Sarwo Edhie Wibowo. Davi pun menyarankan Kayat menghadap Sarwo Edhie guna meminta tanda tangan sebagai bukti atas penjelasan lisannya. Hari itu juga Kayat dilepas tanpa pengawalan untuk menghadap Sarwo Edhie Wibowo.

---

[146] Salah satu ciri khas personil Resimen Cakrabirawa adalah berkumis. Kebetulan Pak Kayat juga berkumis. Apakah ini alasan Jendral Ahmad Yani memilih Pak Kayat?

Adalah hal yang tidak sulit untuk mendapatkan tanda tangan Sarwo Edhie yang saat itu sudah berpangkat Brigadir Jendral.

"*Lho kowe Yat? Saiki kowe nang endi?*" tanya Brigjen Sarwo Edhie Wibowo saat Kayat menghadap mantan atasannya itu.

Kayat menceritakan apa yang dialami dan bermaksud meminta tanda tangan mantan komandan sebagai bukti asal-usul kesatuannya.

Berbekal tanda tangan Brigjen Sarwo Edhie Wibowo, tanpa berprasangka Kayat kembali ke LP Salemba, tetapi nasib baik belum berpihak padanya. Tanpa mendapat tanggapan, Kayat masih harus meringkuk di Salemba. Tanda tangan Sarwo Edhie tidak juga menolongnya.

* * *

Kayat adalah tipe tentara *tulen* yang hanya mengikuti komando dan setia pada Sapta Marga Prajurit. Ia pun mengaku tidak faham politik, karena baru mengenal berbagai partai politik justru dari dalam penjara. Sekalipun sudah tiga belas bulan di negeri seberang sebelum terjadi peristiwa 30 September 1965, bukan alasan untuk bisa menghirup udara merdeka. Keanggotaannya sebagai Resimen Cakrabirawa adalah *'tiket'* untuk menjalani hukuman sebagai tahanan politik. *"Kulo pasrah Mas, amargi sedinten sumpah ping sewu nggih mboten diperchaos."* (Saya pasrah Mas, sebab walaupun sehari bersumpah seribu kali, tetap tidak dipercaya).

Setelah dari LP Salemba, Kayat dipindah ke Rutan Tentara Militer (RTM) Pasar Senin. Di sana, ia ditahan sekitar satu tahun. Kemudian dipindah ke LP Pamekasan, Madura sampai tahun 1974. Di Madura inilah oleh Kepala LP, Kayat diberi kesempatan bekerja di luar sebagai sopir *Selender*. Kayat juga pernah diangkat menjadi sopir pribadi Komandan CPM Pamekasan (Haji Arum Alamsyah), asal Aceh.

Pembebasan atas dirinya tahun 1974, dimanfaatkan untuk segera menemui anak dan istrinya di Jakarta. Sayang, keluarga yang sudah delapan tahun ditinggalkan, telah kembali ke kampung halaman di Rembang. Kayat pun segera menyusul ke Rembang, menemui istrinya yang sudah udzur karena penderitaan. Di Rembang ini pula Kayat pertama kali menatap wajah anaknya yang ketiga. Bersama keluarga, selama lebih kurang satu tahun, Kayat tinggal di Rembang. Untuk sekedar menyambung hidup, mantan pengawal Presiden itu, harus rela kerja serabutan, termasuk jualan dawet keluar masuk kampung.

Di mana pun berada, selalu ada orang baik yang rela menolong sesama. Dialah Tasno, Lurah Geneng Juwana, yang memberi seperempat hektar tambak garam untuk dimiliki dan dikerjakan Kayat. Ia juga dibangunkan sebuah rumah yang relatif bagus untuk ditempati.

Enam tahun dalam pertolongan Lurah Geneng, membuat Kayat tidak enak hati. Lalu ia mencoba mencari pekerjaan sendiri sebagai sopir bus di Cepu dan kemudian berpindah ke Jepon, Blora sampai tahun 90-an.

Guna memperjuangkan hak-haknya, Kayat dan kawan-kawan senasibnya, pernah menghadap Presiden Habibie di rumah dinas Kepresidenan, menghadap Gus Dur di jalan Tebet dan di Cipanas, dan pernah pula menghadap Megawati di Kebagusan. Semua menyambut baik dan menyanggupi rehabilitasi nama baik, walaupun bentuknya belum dirasakannya.

Karena usianya yang mulai lanjut dan fisiknya yang tidak sekuat dulu, kini Kayat tinggal di rumah saja, menghabiskan masa tuanya. Baginya masa tua adalah sisa usia untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Harapan-harapan yang pernah ia punya, diserahkan pada generasi muda. "Yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus disalahkan. Kalau mau berpolitik, berpolitiklah yang baik."

Ketika ditanya tentang hikmah apa yang bisa diambil dari Peristiwa '65? Kayat menjawab, "Saya ini orang bodoh tidak tahu apa-apa. Tetapi setidaknya karena peristiwa itulah saya pernah merasakan sebagai Pengawal Presiden, tukang batu, sopir bus, dan *bakul* dawet."

Sejarah terus berlalu. Mantan anggota Resimen Cakrabirawa yang pernah ikut *ngawasi* masa remaja Presiden Megawati Soekarnoputri itu, saat ini menempati rumah sederhananya di salah satu gang di desa Sawahan, Kecamatan Blora kota.

Pak Sabar dan Bu Sabar: Sabar Dalam Pengharapan[147]

"TOK..TOK..TOK..!" Pukul 04.00 pagi pintu rumah digedor dari luar. Waktu itu, 6 November 1965. "Ya, sebentar", jawab keluarga Pak Sabar dari dalam. Mendengar ramai-ramai di luar dan gelagat tidak baik, Bu Sabar yang menemui tamunya, sementara Pak Sabar paham kondisi dan segera melarikan diri dari pintu belakang.

"Saya sembunyi di sungai belakang rumah sampai semalam. Pagi harinya saya kembali ke rumah dan anak istri katanya sudah dibawa tentara," tuturnya mengawali cerita sambil menghisap rokok kretek yang dibeli dengan uang empat ribu rupiah. "Uang saya *ya* tinggal ini," ujarnya memelas.

1965 adalah tahun yang kejam buat Pak Sabar sekeluarga. Mulai tahun itu ia dipaksa berpisah dengan anak dan istri selama sebelas tahun. Bu Sabar mulai menghuni LP Bulu, Semarang, mulai Oktober 1965 sampai Desember 1971. Sementara anaknya yang berumur 2 bulan harus ikut meringkuk dalam bui.

"Saya ditangkap ketika masih menjalani cuti melahirkan. Waktu itu, saya seorang guru dan anggota Gerwani Purwodadi. Dalam LP saya terpaksa membawa anak saya yang masih berumur dua bulan. Setelah beberapa bulan, air susu saya tidak keluar karena minimnya jatah makan. Sehingga anak saya dibawa pulang oleh neneknya," Bu Sabar mencoba mengingat-ingat kembali peristiwa kelam itu.

---

[147] Wawancara dengan Pak Sabar dan Bu Sabar Ngawen.

Bu Sabar menceritakan peristiwa jebolnya Bengawan Solo tahun 1966, yang berakibat para tapol tidak bisa dibesuk dari luar. Akibatnya tidak ada lagi kiriman makanan dari keluarga. Jatah makan dari LP hanya 1 ons nasi untuk sehari semalam. Padahal, saat itu dia masih harus menyusui anaknya yang belum genap tujuh bulan. Bayi merah yang tidak tahu apa-apa itu harus ikut menanggung penderitaan orang tuanya.

Sementara, setelah istrinya diciduk, Pak Sabar turut pula meninggalkan rumahnya di Purwodadi. Malam itu, 7 November 1965, Pak Sabar mengungsi dengan menumpang kereta KLB di bawah guyuran hujan. Ia bisa meloloskan diri setelah sehari sebelumnya, satu hari penuh, ia *ngumpet* di rumah tetangga sebelah. Menjelang subuh, kereta KLB sampai di Cepu, kemudian langsung menuju Blora.

"Terpaksa saya meninggalkan rumah, karena situasi sangat mencekam. Sesampainya di Cepu, saya melanjutkan perjalanan ke Blora dengan kereta yang sama. Siangnya, saya berjalan kaki ke Ngawen melewati rel kereta api."

Hanya sehari semalam ia berhenti di Ngawen, di tempat orangtuanya, sebelum akhirnya menuju Semarang. Saat itu, belum ada gejolak yang berarti di daerah Ngawen, namun karena Peristiwa '65 adalah gejolak nasional, ia merasa tidak aman tinggal di rumah orang tuanya.

Beberapa hari Pak Sabar tinggal di Semarang dengan harapan dapat bertemu dengan istrinya. Namun harapannya tinggal harapan. Dengan berat hati ia pun berangkat ke Jakarta. Meninggalkan Jawa Tengah, meninggalkan saudara, orang tua, bahkan anak dan istri yang entah bagaimana nasibnya. Meninggalkan semua.

Jakarta merupakan tempat baru baginya. Tidak ada sanak saudara atau handai taulan di sana. Semua serba asing. Lapangan di dekat

Tanjung Priok pun menjadi rumah baginya. Berlantaikan bumi, beratapkan langit, beralaskan kertas semen dan berhias bintang. Berhari-hari tanpa kepastian. Di siang hari ia mencari makan sebisanya, malamnya Pak Sabar mencoba mencari-cari wajah anaknya di antara bintang di langit.

Kertas semen yang berlapis enam itu, menjadi nafkah untuk kehidupannya di Jakarta. Malam hari dibuatnya tidur, siangnya ia jual kepada pengunjung pelabuhan yang butuh kantong. Hasilnya lumayan, bisa untuk makan.

"Satu sak kertas semen yang berlapis-lapis itu saya pisah menjadi enam dan saya jual kepada pengunjung pelabuhan untuk wadah *bulgur* atau terigu. Hasilnya bisa untuk makan dan membeli tempat berteduh," ceritanya. Walau tidak luas, Pak Sabar akhirnya punya tempat untuk berteduh dari terik dan hujan. Tempat baru itu, terletak di sekitar Pasar Mambu.

Di tempat barunya itu, ia bergaul baik dengan masyarakat. Ia berinteraksi layaknya masyarakat yang sudah lama bermukim. Besar-kecil, tua-muda, semua ia hormati. Sikap baiknya terhadap warga sekitar, membuat masyarakat mempercayakan jabatan Sekretaris RW (Rukun Warga) kepadanya. Bersama masyarakat ia bangun musholla dan kios-kios di wilayah Pasar Mambu. Ia abdikan dirinya pada orang-orang Jakarta, orang-orang yang tiada mengetahui asal usul dan latar belakangnya.

Untung tak dapat diraih. Malang tak dapat ditolak. Di Pasar Mambu telah lama bersembunyi seorang pelarian kriminal dari Sulursari, Grobogan. Darno namanya, anak pemilik *Sakrai* (penggergajian kayu). Entah karena apa, ia kembali ke daerahnya dan mewartakan perihal Pak Sabar.

"Saya tidak pernah berbuat aniaya terhadap Darno, tapi saat pulang, ia bilang kepada banyak orang kalau saya di Jakarta. Beberapa

hari setelah itu, dua intel mendatangi saya dan membawa saya meninggalkan Jakarta," tutur Pak Sabar mengingat masa lalunya. Pak Sabar dipaksa meninggalkan Pasar Mambu, meninggalkan musholla dan kios-kios yang berhasil dibangunnya. Meninggalkan masyarakat yang sudah menerimanya.

Aparat membawanya ke LP Jakarta Utara, untuk dititipkan semalam. Lalu bersama dua intel itu, Pak Sabar dengan tangan terborgol, dibawa menuju Semarang naik kereta api. Dari Semarang langsung ke Purwodadi.

Tahun 1971 Pak Sabar menjalani interogasi dan *screening*, ia "lulus" dan ditempatkan di LP Purwodadi, bagian luar. Dijalaninya kehidupan dalam bui, berhari-hari dan berhari-hari. Ransum makan yang didapatkan dalam LP sangatlah buruk. Lebih buruk dari hasil makan yang diperolehnya dengan berjualan kertas semen.

"Sungguh tidak manusiawi," kutuknya. "Kalau Bung Karno dulu tidak pernah memperlakukan tapol seperti ini," tambahnya.

Setelah berbulan-bulan, pagi itu datang. Pagi yang tidak pernah dibayangkannya. Bu Sabar datang membesuknya. Rupanya istrinya telah bebas. Namun badannya tinggal tulang dimakan derita. Ditanyakannya ihwal anaknya. Ia bersyukur, anaknya tidak kurang suatu apa, hanya kasih sayang yang tak didapatkannya.

"Waktu istri saya datang membesuk, saya kaget, tidak menyangka ia telah bebas. Tangis bahagia tumpah berdua, tidak peduli pada orang sekeliling," kenang Pak Sabar hampir meneteskan air mata.

Lama Pak Sabar mendiami LP Purwodadi. Namun peraturan di LP Purwodadi tidak seketat LP di daerah lain. Jika Pak Sabar kangen dengan anak dan istrinya, *disogoknya* penjaga LP dengan uang dua ribu rupiah, supaya dia bisa 'cuti' barang satu minggu. Waktu satu minggu bersama keluarga, ia gunakan untuk berbagi kasih dengan anak dan istri. Setelah itu, ia kembali menjadi tahanan politik yang

terkungkung dalam bui. Dan apabila sudah kangen lagi, kembali uang dua ribu dibayarkan sebagai ongkos cuti satu minggu.

Berkali-kali ia dipindahkan ke LP Rembang, Pati, dan Kudus. Berdasarkan pengalamannya, LP Pati merupakan LP yang paling tidak memanusiakan manusia. Jatah makan bagi tapol adalah jagung satu kaleng *detergent* dan sayur kangkung tanpa garam. Tiap hari selalu begitu. Akhirnya, muncul inisiatif dari penghuni LP untuk menanami halaman LP dengan bayam. Bayam inilah yang menjadi menu tambahan yang sangat berarti.

Lama menunggu, ternyata hari itu tiba. 19 Januari 1976, Pak Sabar dinyatakan bebas. "Lima tahun saya selalu berpindah-pindah tempat penahanan, mulai Purwodadi, Rembang, Pati, dan Kudus, akhirnya saya bebas juga." Kini Pak Sabar dapat berkumpul lagi dengan keluarga, termasuk anaknya yang lahir ketika ia masih di tahanan. Masa cutinya semasa di LP Purwodadi itu ternyata membuahkan hasil. Seorang anak kecil yang mungil dan lucu.

Namun tantangan yang lain masih menunggunya. Tantangan yang lebih berat, tantangan ekonomi keluarga dan tantangan masyarakat. Sebelas tahun telah dilewatkan suami-istri itu di tempat terpisah. Mereka harus kehilangan pekerjaan sebagai seorang guru tanpa mendapatkan ganti rugi walau telah diurus beberapa kali. Tapi itulah kenyataan yang harus ditanggung Pak Sabar dan Bu Sabar. Mereka harus lebih bersabar menjalani kehidupan selepas masa penahanan.

Kini Pak Sabar dan istrinya tinggal di Ngawen, Blora, menempati rumah peninggalan orang tuanya. Dalam bergaul dengan masyarakat, Pak Sabar selalu menjaga sikap. Ia selalu memakai *boso kromo* (bahasa Jawa halus) saat berbicara dengan siapa pun, tidak peduli kecil atau dewasa. Di usianya yang senja, mereka mengabdikan diri kepada Kristus dengan ikhlas. Tiap pagi Bu Sabar berjualan *karak* (krupuk), daun pisang, dan krupuk gendar di Pasar Ngawen. Hasilnya pun hanya

cukup untuk makan sehari-hari. Pak Sabar sebenarnya ingin mencari penghasilan lain, namun sepertinya orang lain enggan mempekerjakannya.

Di akhir ceritanya tentang masa lalu, Pak Sabar berpesan, "Tempuhlah langkah untuk menuntaskan revolusi yang sebenarnya. Toleransilah kepada semua pihak, tapi jangan lupakan prinsip." Pesan dari seorang Sabar yang telah merasakan pahit getir kehidupan. *Wallahu a'lam.*

Kang Leman :
"Sekarang saya dilupakan" [147]

MENDUNG berjari gerimis mengantar Kang Leman pulang dari sawahnya di sebelah Utara perkampungan Dusun Sukorame. Dengan menenteng sebilah *arit* dan tas plastik berisi *janggleng* (bibit pohon jati), dipadu celana selutut, kaos berkerah, dan topi yang ketiganya kumal, Kang Leman menuju rumahnya pukul 2 siang itu. Penampilan seperti itu, sangat berbeda saat ia masih berseragam lengkap pada 38 tahun silam. Waktu itu, lelaki bernama lengkap Soeleman ini berpakaian PDL coklat, sabuk kopel, helm baja tentara, dan sepatu laras, khas seragam kehormatan Kompi Hansip Bamunas.

Kang Leman memang mantan anggota Hansip Bamunas yang dulu pernah tersohor sampai ke negeri Cina. Waktu itu, penyiar Radio Peking yang berbahasa Melayu, menyebutnya Tentara Kuning yang sedang mengamuk.

Keterlibatan Kang Leman sebagai anggota Hansip Bamunas berawal dari pekerjaannya sebagai buruh *sakre* (penggergajian kayu) milik seorang Tionghoa yang bertempat di seberang Markas Kodim Blora. Bersama salah satu rekan sekerjanya, Kang Leman mewakili perusahaan itu mengikuti pelatihan kemiliteran selama tiga bulan sampai 25 September 1965.

---

[147] Wawancara dengan Soeleman, 2 Februari 2003 dan wawancara sebelumnya. Agar tidak terjadi distorsi makna, perkataan narasumber yang disajikan dalam kalimat langsung tetap menggunakan bahasa Jawa.

"Yo ora weruh, wong poko'e soko perusahaan ditugasi melu latihan. Nganti latihan bola-bali yo ora ngerti kanggone opo (Ya tidak tahu, pokoknya dari perusahaan memberikan tugas ikut latihan. Sampai latihan berkali-kali ya tetap tidak tahu untuk apa)," jawab Kang Leman ketika diajukan pertanyaan tetang tujuan awal diadakannya pelatihan kemiliteran itu. Sampai akhir pelatihan pun, Kang Leman merasa tidak diberitahu oleh para pelatihnya.

Kang Leman memberi kesaksian bahwa pelatihan kemiliteran selama 3 bulan itu hanya diikuti oleh para karyawan perusahaan swasta, jumlahnya lebih kurang hanya 30 orang. Baru setelah terjadi Peristiwa 30 September di Jakarta, anggota Hansip Bamunas bertambah karena anak-anak muda dari unsur agama dan para veteran serta eks prajurit turut bergabung dalam kesatuan Hansip Bamunas.

Sebagai anggota Hansip Bamunas, tugas Kang Leman 'tidak terlalu berat' jika dibanding dengan tugas beberapa anggota lainnya. Ia tidak harus memegang senjata dan melakukan eksekusi terhadap para tahanan. Ia hanya bertugas menjaga dan mengawal para tahanan yang digiring menuju sungai untuk memenuhi hajatnya setiap hari. Namun, pernah juga ia dipaksa mengikuti proses eksekusi. Setelah para korban mati ditembak, Kang Leman diperintah untuk menyeret mayatnya dan memasukkan ke liang kubur massal. Kang Leman juga harus membersihkan sisa-sisa darah yang tercecer di antara ranting dan dedaunan hutan Ngampel. Tugas terakhir inilah yang pernah membuat Kang Leman sangat tertekan beberapa bulan.[148]

Sambil duduk di pinggir jalan setapak, menunggu hujan yang belum jatuh, Kang Leman sedikit kesulitan membahasakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepadanya.

---

[148] Gambaran tertekan yang diceritakan Kang Leman, misalnya menggigil, panas dingin, dan terbayang-bayang warna darah.

"Hikmah opo ...? Wong nyatane nganti sa'iki aku ya isih koyo ngene. Sak bare peristiwa penting iku rampung, wong-wong cilik kaya aku iki wis dilalekke blas. Mergo wis ora dibutuhke maneh. Delok iku... (Kang Leman menyebutkan beberapa nama anggota Hansip Bamunas) *Wong-wong ngono iku enthuk opo? Podho, ora entuk opo-opo!"* (Hikmah apa ...? Kenyataannya sampai sekarang aku ya masih seperti ini. Setelah peristiwa penting itu selesai, orang-orang kecil seperti aku ini sudah benar-benar dilupakan. Sebab sudah tidak dibutuhkan lagi. Lihat itu ...Orang-orang seperti itu dapat apa? Sama, tidak dapat apa-apa!)

"Lho... hikmah *kan* tidak harus materi?" pertanyaan kembali mengejarnya.

"Yoo... Sak bare iku, aku yo tani iki. Ngopeni sawah, ngingoni sapi, ngopeni anak bojo. Mulane, sakjane melu-melu ngono iku wegah! Sing penting, wong urip iku dilakoni sak titahe." (Yaa... Sehabis itu, aku ya bertani ini. Ngerjakan sawah, memelihara sapi, menjaga anak istri. Makanya, sebenarnya aku nggak mau ikut-ikut seperti itu! Yang penting, orang hidup itu dijalani apa adanya)

'Kekecewaan' mungkin adalah kata yang paling pantas untuk menyimpulkan apa yang dirasakan Kang Leman saat ini. Ia merasa sudah melakukan banyak hal untuk bangsanya. Tidak peduli siang, malam dan di mana pun.

Soeleman tidak pernah tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Ia tidak lebih hanya melakukan perintah *dooke* berdasar keyakinan kolektif yang dilembagakan.

"Nek kudune yo ono penghargaan, wong gaweane rino wengi. Ngeri meneh." (Seharusnya ya ada penghargaannya, karena kerjanya siang malam. Ngeri lagi.)

Sampai sekarang pun sisa-sisa keyakinan kolektif itu masih jelas terlihat. Tapi apa pun adanya, itulah yang ditangkap dan tersisa di benak Kang Leman yang mengalami sendiri sejarah '65 di Blora.

Bab VIII

Penutup

PEMBUNUHAN massal yang terjadi tahun 1965-1966 di Kabupaten Blora, tidak bisa dilepaskan dari peristiwa nasional, yaitu gerakan sekelompok orang yang oleh pemerintah Orde Baru disebut kudeta G-30-S. Peristiwa besar itu menggelinding liar, menjadi bola salju dan menelan korban ratusan ribu anak bangsa Indonesia, ribuan di antaranya rakyat Blora. Kuatnya arus balik yang datang dari Jakarta itu, telah mengubah pola relasi antarkelompok yang sebelumnya mampu bertahan untuk saling menjaga, berubah menjadi pengejaran, penangkapan, penganiayaan dan pembunuhan tiada ampun. Sungguh *mubadzir* rasanya apabila upaya menghapus keberadaan sebuah partai yang pernah menjadi pemenang dalam pemilu di Kabupaten Blora, harus dengan melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap para anggota dan simpatisannya. Kalaupun dipandang sebagai 'pemberian hukuman' atas pemberontakan dan pembunuhan terhadap

tujuh jenderal Angkatan Darat, apakah benar PKI sebagai pelaku atau satu-satunya pelaku G-30-S 1965? Bukankah sejarah sebelumnya, yaitu pemberontakan DI/TII atau pemberontakan-pemberontakan lain, tidak diselesaikan dengan pembunuhan massal semacam itu?

Sebagai bagian dari wilayah yang terpaksa menanggung 'dosa' perbuatan orang lain --setidaknya tanggung jawab secara personal-- peristiwa berkekerasan yang terjadi di Blora juga mengikuti pola umum gerakan penumpasan PKI, di antaranya pengorganisiran kelompok sipil oleh aparat militer, pembentukan organ-organ semi militer, pelatihan kemiliteran, pemberian persenjataan, dan suntikan-suntikan semangat, sehingga memungkinkan tindakan berkekerasan itu terwujud.

Lokalitas peristiwa yang terjadi di Blora, memunculkan ciri khas yang hanya terjadi di daerah ini. Pelaku pembunuhan merupakan kelompok tersendiri, berbeda dengan masyarakat umum non-PKI yang sebatas melakukan pengejaran dan penangkapan. Sama sekali tidak ditemukan adanya kelompok masyarakat sipil murni yang turut melakukan pembunuhan. Hal ini berbeda dengan pembunuhan-pembunuhan di Jawa Timur yang banyak melibatkan masyarakat umum, bahkan anak-anak, dengan menggunakan senjata seadanya. Pembunuhan yang menimpa ribuan korban di Blora, menjadi operasi yang sangat rapi, rahasia, dilakukan oleh kelompok kecil pada malam hari, menggunakan senjata tertentu --senjata laras panjang otomatis atau belati-- dan terjadi di tempat-tempat khusus yang tidak disaksikan masyarakat umum. Penutupan Jalan Pemuda oleh aparat keamanan sebelum para korban diberangkatkan ke tempat-tempat eksekusi adalah gambaran dari sebagian sekenario yang sangat sistemis.

Jika dibanding dengan apa yang terjadi di Kabupaten Jepara, daerah yang 'lebih pesisir', keterlibatan masyarakat dan tingkat

kekejaman para eksekutor di Kabupaten Blora lebih tinggi. Di Jepara para tokoh masyarakat yang diharuskan menyetorkan anggota PKI dalam jumlah tertentu kepada aparat keamanan, mengambil inisiatif untuk menyerahkan orang-orang yang dinilai sebagai sampah masyarakat dengan standar kriminalitas, misalnya pencuri atau yang lainnya. Adanya inisiatif masyarakat setelah para tokoh utama PKI habis, membuat jumlah korban 'hanya' ratusan orang.[149] Kreativitas ini tidak terjadi di Blora. Sebaliknya banyak terjadi laporan tentang keterlibatan seseorang sebagai anggota dan simpatisan PKI lebih didasarkan pada sentimen pribadi dan mengandung unsur fitnah.

Secara umum, tidak ada korelasi yang signifikan antara kultur lokal dengan besarnya jumlah korban dalam tragedi kemanusiaan di Blora saat itu. Faktor supralokal, yaitu Peristiwa 30 September 1965 dan semua yang melingkupinya di Jakarta, menjadi kunci utama bagi terbukanya pintu menuju ruang gelap sejarah 1965-1966. Faktor lokal Blora, seperti konsolidasi dan perang isu antarpartai, hanyalah roda-roda yang bisa diarahkan ke mana pun sesuai keinginan para penunggangnya.

Setelah berlalu 38 tahun lamanya, peristiwa-peristiwa itu pun tidak bisa terungkap secara adil dan jujur. Kendala keamanan, politik, psikologis, informasi, penafsiran, keberanian untuk berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, pertanyaan tentang *manfaat* atau *madlorot*, dan kendala-kendala lain, masih menjadi batu sandungan bagi historiografi kita.

Dan selagi permasalahan di atas belum teratasi, yang bisa dilakukan adalah kejujuran dan pengakuan bahwa Peristiwa 1965-1966 adalah kenyataan sejarah yang tidak hanya menghilangkan ribuan

[149] Data FSAS Jepara.

nyawa atau kerugian material semata, tetapi juga meninggalkan kerusakan yang lebih mendalam. Ia tidak terlihat di permukaan tetapi tersembunyi dalam akal pikir manusia, bersamaan dengan bergesernya nilai-nilai, hancurnya hubungan antarpribadi dan digantikan dengan 'etika perang': Bertahan tetap 'hidup' dengan 'kematian' orang lain.

Kekerasan, sesungguhnya bukan merupakan bagian dari struktur masyarakat yang sehat. Kekerasan merupakan pola *abnormal* yang membuat kacau dan menghancurkan sistem tradisi perilaku dan interaksi manusia, memaksa masyarakat merasakan trauma dan penderitaan. Banyak di antaranya kehilangan teman atau anggota keluarga, atau harus menjadi saksi bahkan pelaku aksi kekerasan yang dalam kondisi 'sadar' sebenarnya tidak dikehendaki.

Penelusuran sejarah ini tidak bermaksud semata-mata mengungkit luka perih masa lalu ataupun membakar dendam yang merusak. Bukan pula *euphoria* 'menyalahkan' dengan mengandalkan kemampuan pandang pada 'potret' yang sebagian warnanya pudar dimakan usia. Ini hanyalah mencari kejelasan tentang kebenaran masa-lalu, yang harus diakui secara jujur dan transparan dengan berpegang pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam rangka pemulihan hak-hak manusia. Memaafkan atau tidak memaafkan adalah masalah lain yang harus dicari solusi dan titik temunya. Karena membohongi diri sendiri bahwa luka-luka itu tidak ada hanyalah menghasilkan ketidakwaspadaan akan kemungkinan tragedi lain di waktu dan tempat lain dari organ kebangsaan kita sendiri.

Sebagaimana diutarakan di muka, apa pun hasil dari penelusuran sejarah ini bukanlah kebenaran mutlak yang akan mengganti 'kebenaran' yang lain. Ia harus ditempatkan sebagai realitas yang bisa dibandingkan dan digali lebih lanjut bersama dengan temuan-temuan lain yang akan muncul di mana dan kapan saja. Dialektika sejarah

inilah yang diharapkan memaksimalkan perannya sebagai 'Kaca Benggala' untuk meniti masa depan.

Akhirnya, biarlah dengan 'selesainya' penelitian dan penyusunan ini, mampu memberi arti bagi rasa kemanusiaan pada mereka yang rela dan berani mengambil peran sebagai manusia yang sesungguhnya. *Wallahu A'lamu bish Showab.*

Bahan Bacaan

Sanit, Arbi, *Badai Revolusi, Sketsa Kekuatan PKI di Jateng dan Jatim.* (Pustaka Pelajar, 2000)

Bahaya Laten Komunisme di Indonesia (Mabes ABRI, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995)

Anderson, Benedict dan Ruth T McVey, *Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Analisis Awal.* (LKPSM/Syarikat. Yogyakarta, 2001)

Anderson, Benedict, *"Jangan Terjadi Lagi, Benedict Anderson tentang Pembunuhan Massal 1965"* (Narasi wawancara, belum diterbitkan)

Nafi', Dian, *"Anatomi Konflik Berkekerasan di Indonesia".* (Makalah disampaikan dalam Pelatihan Jurnalistik Damai. Diselenggarakan oleh LKiS Yogyakarta, 2002)

Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya. (Sekretarisat Negara Republik Indonesia Jakarta, 1994)

Sulistiyo, Hermawan, *Palu Arit (Pembantaian di Ladang Tebu), Peristiwa 1965-1966 di Jombang dan Kediri.* (Penerbit, tahun)

Herman, *Menuju Dalam Perjalanan, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Kabupaten Blora.* (Dewan Harian Cabang Angkatan '45 Kabupaten Blora, 1994)

Panitia Penelitian Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Blora, *Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Blora.* (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, 1987)

Cribb, Robert, *"Problem-Problem Penulisan Sejarah Pembunuhan di Indonesia".* Monash Papers on Southeast Asia-No. 12, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Clayton, Victoria, Australia, 1990)

Fisher, Simon, dkk., Edisi Indonesia, *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak.* (The British Indonesia, 2001)

Hutomo, Suripan Sadi, *Tradisi dari Blora.* (Citra Almamater, Semarang, 1996).

Tim Penyusun Buku Sejarah Perkembangan Golongan Karya Kabupaten Blora, *Mengabdi Kekaryaan, Perjalanan Sejarah Golongan Karya Kabupaten Blora.* (DPD II Golongan Karya Kabupaten Blora, 1993)

Tim Penyusun, *100 Tahun Perminyakan di Cepu.* (Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi, PPT Migas, 1994)

Tim Penyusun, *Mengenal Akademi Minyak dan Gas Bumi, AKAMIGAS.* (Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi PPT Migas, 1993)

Warto, *BLANDONG, Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang Abad Ke 19.* (Pustaka Cakta Surakarta, 2001)

Data penelitian FSAS Jepara.

Data Penelitian Lakpesdam NU Klaten.

Daftar Singkatan

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AKBP	Ajun Komisaris Besar Polisi
Bamunas	Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta
Banser	Barisan Ansor Serbaguna
Baperki	Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
BPII	Badan Permusyawaratan Islam Indonesia
BPRI	Barisan Pejuang Rakyat Indonesia
Briefing	diberi petunjuk singkat
Brimob	Brigade Mobil
BTI	Barisan Tani Indonesia
CPM	Corps Polisi Militer
CS PKI	Comite Seksi PKI
DI/TII	Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DMI	Djamiatul Muslimin Nasional Indonesia
DPD	Dewan Pemerintah Daerah
DPRS	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
Eks-Tapol	Eks Tahanan Politik
Expra	Ex Prajurit
FDR/PKI	Front Demokrasi Rakyat/PKI
Gapero	Gabungan Pemuda Royal
Gerwani	Gerakan Wanita Indonesia
GP Ansor	Gerakan Pemuda Ansor
GPM	Gerakan Pemuda Marhaenis
GWM	Gerakan Wanita Marhaenis

GSNI	Gerakan Siswa Nasionalis Indonesia
G-30-S	Gerakan 30 September 1965
Hanra Garuda Pancasila	Pertahanan Rakyat Garuda Pancasila
Hansip Bamunas	Pertahanan Sipil Bamunas
IPPI	Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia
IPNU	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
IPPNU	Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
KBKKBM	Kesatuan Buruh Kehutanan Kesatuan Buruh
KBKI	Kesatuan buruh Kerja Indonesia
Kiwal	Kompi Pengawal
KNIP	Komite Nasional Indonesia Pusat
Kodim	Komando Distrik Militer
Lekra	Lembaga Kebudayaan Rakyat
Lesbumi	Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia
LKN	Lembaga Kesenian Nasional
Masyumi	Majelis Syuro Muslimin Indonesia
NU	Nahdlatul Ulama
Pangkopkamtib	Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Pangkostrad	Panglima Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat
Pergunu	Persatuan Guru NU
Permigan	Perusahaan Minyak dan Gas Nasional
Pertani	Persatuan Tani Nasional Indonesia
Pertanu	Persatuan Tani NU
Pesindo	Pemuda Sosialis Indonesia
PGRI Non-Vaksentral	Persatuan Guru Republik Indonesia Non-Vaksentral
PJKA	Perusahaan Jawatan Kereta Api
PKI	Partai Komunis Indonesia

PNI	Partai Nasional Indonesia
PNI ASU	PNI Ali Surachman
PR	Pemuda Rakyat
PSII	Partai Sarikat Islam Indonesia
RCR	Regu Central Rahasia
RPKAD	Resimen Para Komando Angkatan Darat
Sarbumi	Serikat Buruh Muslimin Indonesia
Sekber Golkar	Sekretariat Bersama Golongan Karya
SI	Sarekat Islam
SOBSI	Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SOKSI	
SR	Sarekat Rakyat
TNI	Tentara Nasional Indonesia
Unra	Universitas Rakjat
UU PBH	Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil
VOC	Verenigde Oost-Indische Compagnie
Yon Ved Be 17	Batalyon Veteran dan Demobilisasi Brigade 17

Lampiran :

Daftar Nama Anggota
Hansip Bamunas
BP Komando Distrik Militer 0721*

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Soedardjo	Dan. Kie	
2.	Wiyono	Wa. Dan. Kie.	
3.	Is Noerhadi	Bag. Administrasi	
4.	Koentoro	Pergudangan	
5.	Soeratman	P. H. B.	
6.	Harmono	Pengibar Bendera	
7.	Slamet	Pem. Genderang	
8.	Soekanto	Pok. Pen. Mahir	
9.	Bambang Soenaryo	Humas	Anggota Veteran
10.	Soehardi	Dan Ton	
11.	Karmidjan	Dan Ton	
12.	Harsono	Dan Ru	
13.	Taksisman	Dan Ru	Anggota Veteran
14.	Syumar	Dan Ru	
15.	Sorry	Dan Ru	
16.	Soeharso BA	Wa Dan Ru	
17.	M. Soeleman	Wa Dan Ru	
18.	Soetjipto	Wa Dan Ru	
19.	Herman Para	Wa Dan Ru	
20.	Heru Sunarto	Wa Dan Ru	
21.	Soedarman	Anggota	
22.	Soenar	Anggota	

* Dikutip dari *Mengabdi Kekaryaan, Perjalanan Sejarah Golongan Karya Kabupaten Blora* (DPD II Golongan Karya Kabupaten Blora, 1993).

23.	Syobirin	Anggota	
24.	Moelyono	Anggota	
25.	Syakkur	Anggota	
26.	Badrah	Anggota	
27.	Soemadi I.N.	Anggota	
28.	Roesman	Anggota	
29.	Soekardjo A	Anggota	
30.	Bambang Sarodjo	Anggota	
31.	Soepomo	Anggota	
32.	Na'iman	Anggota	
33.	Soekardjo A	Anggota	
34.	Dasyim	Anggota	
35.	Sanoesi	Anggota	Anggota Veteran
36.	Soekarno	Anggota	
37.	Walimin	Anggota	
38.	Soejoedi	Anggota	
39.	Soengeb	Anggota	
40.	Joehadi	Anggota	
41.	Basoeki	Anggota	
42.	Alimah (Pi)	Anggota	
43.	Soetiah (Pi)	Anggota	
44.	Mastiah (Pi)	Anggota	
45.	Kasmirah (Pi)	Anggota	
46.	Ali Akrom	Anggota	
47.	M. Jasin	Anggota	
48.	Jasin Efendi	Anggota	
49.	Djoeniarto	Anggota	
50.	Dja'far Sodik	Anggota	
51.	Hardjono	Anggota	
52.	Fakih	Anggota	
53.	Hadi	Anggota	Anggota Veteran
54.	Soewadji	Anggota	Anggota Veteran
55.	Sanidi	Anggota	Anggota Veteran
56.	Soebiyandono	Anggota	Anggota Veteran
57.	S. Hadiwardoyo	Anggota	Anggota Veteran
58.	Soewardiyo	Anggota	Anggota Veteran

59.	Tasmin	Anggota	Anggota Veteran
60.	Boedisukarto	Anggota	Anggota Veteran
61.	Soewadi	Anggota	Anggota Veteran
62.	Moehadi	Anggota	Anggota Veteran
63.	Tamin	Anggota	Anggota Veteran
64.	Ngadiran	Anggota	Anggota Veteran
65.	Soekilo	Anggota	Anggota Veteran
66.	Soekardjan	Anggota	Anggota Veteran
67.	Karsan	Anggota	Anggota Veteran
68.	Koesman	Anggota	Anggota Veteran
69.	Kadjoeri	Anggota	Anggota Veteran
70.	Kartono	Anggota	

Daftar Pengurus Partai dan *Underbouw* Partai-Partai Politik di Kabupaten Blora Tahun 1965*

PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI)

1. Ketua CS PKI Kabupaten Blora	: Kusman (Bangkle)
2. Ketua CSS Kecamatan Blora	: Sarmijan
3. Ketua Pemuda Rakyat Kabupaten Blora	: Margono (Kamolan)
4. Ketua Pemuda Rakyat Kecamatan Tunjungan	: Kardi (Nglarangan)
5. Ketua Gerwani Kabupaten Blora	: Ibu Yoso (Kunden)
6. Ketua Gerwani Kecamatan Tunjungan	: Supatmi
7. Ketua BTI Kabupaten Blora	: Yoso
8. Ketua Lekra Kabupaten Blora	: Sarpin (Medang)
9. Ketua SOBSI Kabupaten Blora	: Hardiman (Jetis)
10. Ketua PGRI Non-Vaksentral	: Parman Jati Purnomo (Jetis)
11. Sekretaris PGRI Non-Vaksentral	: Soekardi

*Wawancara dengan Soewondo, Isnawoto, Darno Wiwoho, Iskandar Abdul Halim, dkk.

PARTAI NASIONALIS INDONESIA (PNI)

1. Ketua Umum	: Soecipto (Kepala Penerangan Kabupaten Blora)
2. Ketua I	: Kasturi (Ka Dinas P dan K Kabupaten Blora)
3. Sekretaris	: Welas Raharjo (Kabag Pemerintahan Kabupaten Blora)
4. Bendahara	: (Ajun Perhutani
5. Ketua Umum GPM	: Munawan
6. Ketua I GPM	: Karsono
7. Ketua Umum GWM	: Ibu Soecipto (Sekwilda)
8. Ketua Pertani	: (Kepala Agraria Blora)

NAHDLATUL ULAMA (NU)

1. Ro'is Syuriyah PC NU	: K.H. Ikhsan Fadlil
2. Ketua Tanfidhiyah PC NU	: Basuki Rustam
3. Ketua PC GP Ansor	: Iskandar Abdul Halim
4. Ketua PC IPNU	: Amin Sukaji
5. Ketua PC IPPNU	: Maryam
6. Ketua PC Muslimat NU	: Siti Masfu'ah Saimuri
7. Ketua PC Fatayat NU	: Munawaroh
8. Ketua PC Sarbumusi	: Soekarno
9. Ketua PC Lesbumi	: Imam Mujtaba
10. Ketua PC Pertanu	: Iskha' Siswo Pranoto

Daftar Narasumber Lisan

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	**Darno Wiwoho**	☞ Aktivis GSNI (Ketua Cabang) Kabupaten Blora tahun 1967 ● Umur 60 tahun ● Alamat: Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan
2.	**Amin Sukaji**	☞ Ketua PC IPNU Kabupaten Blora tahun 1965 ● Anggota Presidium KAPPI Konsulat Blora tahun 1966 ● Alamat: Desa Sonorejo, Blora
3.	**Iskandar Abdul Halim**	☞ Ketua PC GP Ansor Kabupaten Blora tahun 1965 ● Ketua Presidium KAPPI Konsulat Blora tahun 1966 ● Umur: 69 tahun ● Alamat: Jl. Rajawali, Blora
4.	**Suwaji**	☞ Anggota Ansor tahun 1965 ● Alamat: Wado, Kedungtuban
5.	**Ja'far Shodiq**	☞ Mantan Anggota Hansip Bamunas ● Umur: 69 tahun ● Alamat: Desa Tutup, Tunjungan

6.	**Isnawoto**	☞ Aktivis GMNI Yogyakarta tahun 1960 ● Aktivis PNI Blora tahun 1965 ● Umur: 70 Tahun ● Alamat: Tamanrejo, Tunjungan
7.	**Sungudi**	☞ Mantan anggota Hansip Bamunas ● Umur: 63 tahun ● Alamat: Mlangsen, Blora
8.	**Yudi Sancoyo**	☞ Anggota Tim Penyusun Buku *Mengabdi Kekaryaan, Perjalanan Sejarah Golongan Karya* Kabupaten Blora ● Alamat: Jl. Tentara Pelajar, Blora
9.	**Badri**	☞ Mantan Pegawai PUK ● Mantan Anggota Pemuda Rakyat ● Eks Tapol di Nusakambangan ● Alamat: Tamanrejo, Tunjungan
10.	**Sulistijono**	☞ Eks Tapol (Angkatan Laut) ● Umur: 66 tahun ● Alamat: Bangkle, Blora
11.	**Naiman Samanhudi**	☞ Mantan Anggota Hansip Bamunas ● Alamat: Mlangsen, Blora
12.	**Yasin Ma'ruf**	☞ Mantan Anggota Hansip Bamunas ● Alamat: Jetis, Blora

13.	**Soeleman**	☞ Mantan Anggota Hansip Bamunas ● Umur: 61 tahun ● Alamat: Desa Tutup, Tunjungan
14.	**Ahmad Mubarok**	☞ Ketua IPPI Cabang Blora tahun 1963-1964 ● Eks Tapol (4 tahun ditahan di kantor CPM Blora) ● Umur: 61 tahun ● Alamat: Kauman, Blora
15.	**Soeparmin**	☞ Anggota PNI ● Eks Tapol (dituduh anggota Lekra, ditahan di Blora ● Alamat: Biting Sambong
16.	**Ahmad Sungeb**	☞ Mantan Anggota Hansip Bamunas ● Pengurus Sarbumusi Blora ● Umur: 60 tahun ● Alamat: Mlangsen, Blora
17.	**Soewondo**	☞ Pengurus PGRI Non-Vaksentral Cabang Blora ● Eks Tapol (Nusakambangan dan Pulau Buru) ● Umur: 74 tahun ● Alamat: Sendang Klam-pok. Tempurejo, Blora
18.	**Raden Mas Prapto**	☞ Eks Tapol (ditahan di Blora) ● Umur: 70 tahun ● Alamat: Desa Tutup, Tunjungan

19.	**Warasyanto**	☞ Bendahara Ranting Pemuda Rakyat Desa Tutup ● Eks Tapol (ditahan di Blora) ● Saksi kerusuhan di desa Tutup ● Alamat: Desa Tutup, Tunjungan
20.	**Cuk Suharmono**	☞ Saksi kerusuhan/pengrusakan rumah anggota PKI di desa Tutup ● Alamat: Desa Tutup, Tunjungan
21.	**Zuabaidi**	☞ Anggota IPNU Cabang Blora tahun 1965 ● *Mayoret Marching Band* IPPNU ● Alamat: Kauman, Blora
22.	**Wiji Mulyono**	☞ Anggota Gerakan Pemuda Marhaenis Desa Balun, Cepu tahun 1964 ● Alamat: Desa Tutup, Tunjungan
23.	**Suparmin (Tamin)**	☞ Sopir Hansip Bamunas ● Umur: 64 tahun ● Alamat: Jetis, Blora
24.	**Salamun**	☞ Pemilik KTA PNI ASU dan KBKI ● Eks Tapol (ditahan di Blora) ● Umur: 80 tahun ● Alamat: Bradak, Ngawen
25.	**Ahmad Suji**	☞ Ketua MWC NU Ngawen tahun 1965 ● Umur: 69 tahun

		● Alamat: Desa Ngawen
26.	**Maskun**	☞ Mantan Anggota Hansip Bamunas ● Alamat: Banjarejo
27.	**Kayat bin Kasto Kasban**	☞ Mantan anggota RPKAD ● Mantan Anggota Resimen Cakrabirawa ● Eks Tapol (ditahan di Jakarta dan Madura) ● Alamat: Sawahan Blora
28.	**Pak Sabar**	☞ Anggota Pemuda Rakyat Purwodadi ● Eks Tapol (ditahan di Purwodadi, Pati dan Kudus) ● Alamat: Ngawen
29.	**Ibu Sabar**	☞ Anggota Gerwani Purwodadi ● Eks Tapol (ditahan di Semarang) ● Alamat: Ngawen
30.	**Supadi**	☞ Anggota Banser tahun 1965 ● Alamat: Mojorembun, Kradenan
31.	**Mukhsin**	☞ Anggota Banser tahun 1965 ● Alamat: Mojorembun, Kradenan
32.	**Cuk Sudibyo**	☞ Aktivis GSNI tahun 1965 ● Alamat: Randublatung

33.	**Sarmidi**	☞ Mantan anggota DPD Kabupaten Blora dari PKI tahun 1965 ● Alamat : Jl. Arum Dalu, Mlangsaen, Blora
34.	**Beberapa Anggota Hansip Bamunas**	

Dokumen Foto-Foto

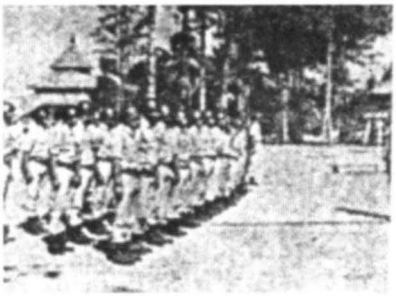

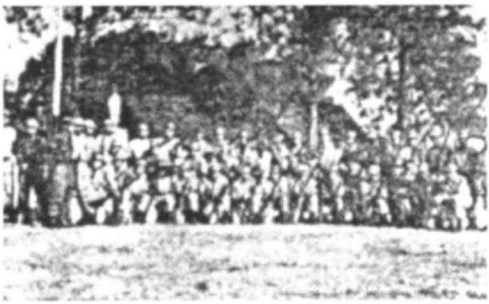

Latihan Dasar Kemiliteran Hansip Bamunas (foto repro)

Hansip Bamunas di sekitar alun-alun Blora (foto repro)

Dan Ton. Bamunas Soehardi nomor 2 dari kiri dan Wa Dan Ki. Wijono, nomor 4 dari kiri foto bersama pada tanggal 17 Agustus 1965 (foto repro).

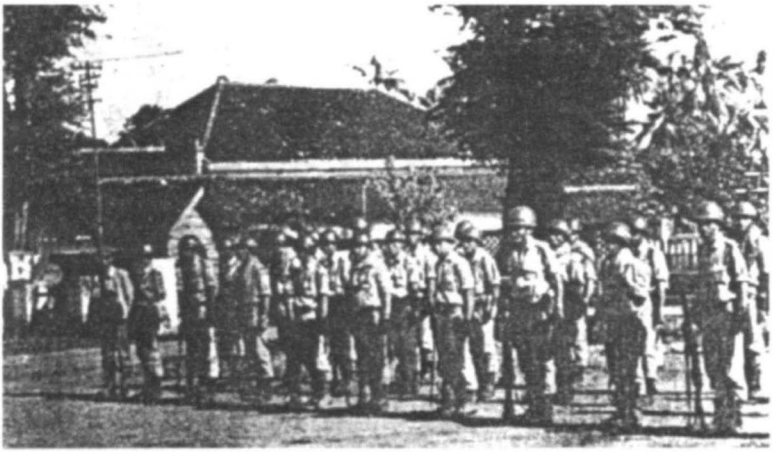

Kompi Hansip Bamunas Blora (foto repro)

Pasukan Yon Ved Brigade 17 di depan gedung
Kejaksaan Negeri Blora tahun 1965 (foto repro).

Demonstrasi Massa KAPPI Konsulat Blora (foto repro)

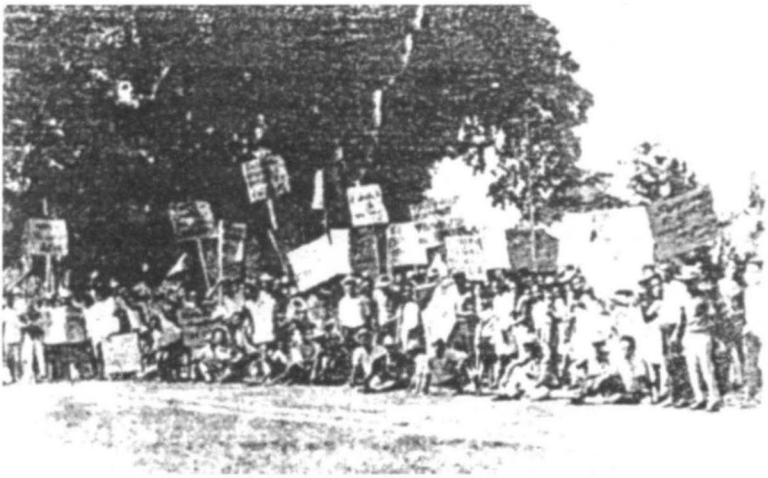

Demonstrasi Massa KAPPI Konsulat Blora (foto repro)

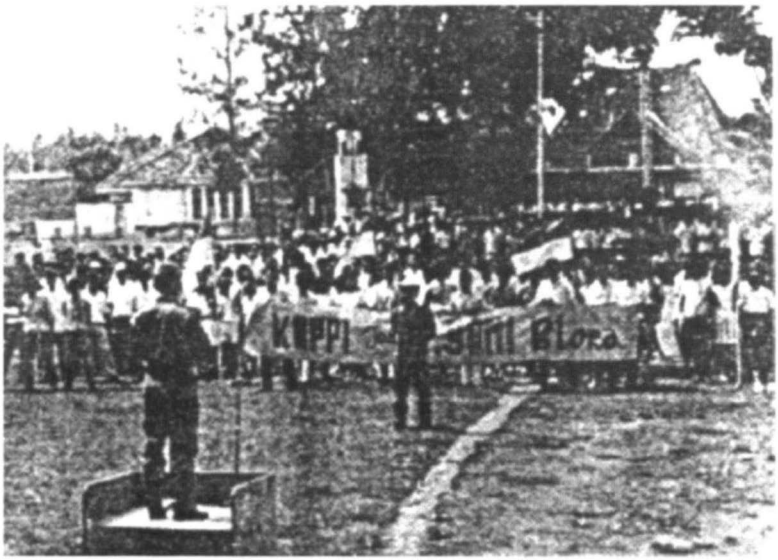

Demonstrasi Massa KAPPI Konsulat Blora (foto repro)

Panca Tunggal TK. II Blora mengikuti Apel Siaga Massa KAPPI Konsulat Blora. Tampak dari kiri ke kanan: Mayor Srinardi-Dandim 0721, R. Soekirno Sastrodimedjo-Bupati KDH, R. Soekandar - Danres Kepolisian 945, Soehardjo - Kejaksaan Negeri, dan Soetadi Ramli - Ketua Pengadilan Negeri (foto repro).

Dari kiri: Srinardi (Dandim), Danyon 452, R. Soekandar (Danres 945), tidak dikenal (foto repro)

Apel Banser Blora dalam rangka penyerahan anggota Banser kepada Dandim sebagai anggota Hanra Garuda Pancasila tahun 1965. (foto repro)

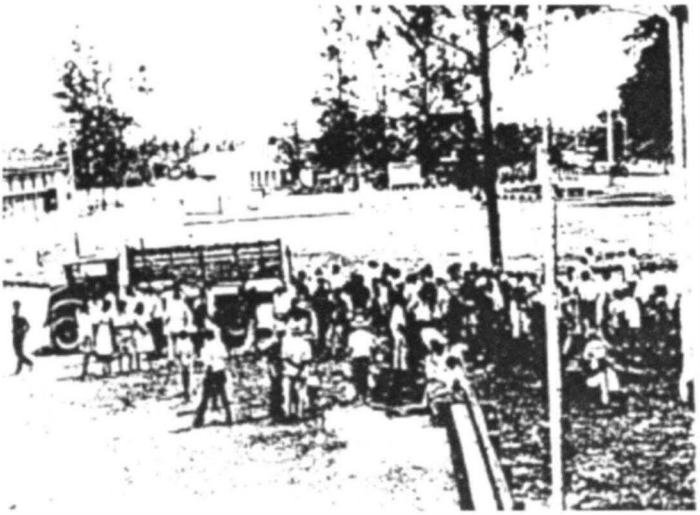

Alun-alun Blora tahun 1965 (foto repro)

Tentang Penulis

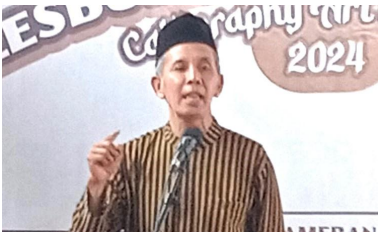

Dalhar Muhammadun, lahir pada 10 Maret 1971 di Blora, Jawa Tengah. Terlahir dari keluarga santri desa, anak seorang *Modin* (Pamong Desa). Selain menempuh pendidikan umum, sempat belajar di beberapa pondok pesantren. Pendidikan terakhir dijalani di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tetapi tidak sempat menyelesaikannya. Tahun 1998 pulang kampung dan bergelut dengan urusan lokal Blora dan sejak 2001 menekuni dunia penelitian di kota yang sama.

Profil Lembaga

Yayasan ATMA (Advokasi Transformasi Masyarakat) didirikan oleh sekelompok aktivis intelektual pro-demokrasi pada tanggal 7 April 1996 di Surakarta, berangkat dari keprihatinan dan kegalauan terhadap kondisi berbangsa, bermasyarakat, bertanahair, dan bernegara di tengah-tengah arus globalisasi, pertarungan ideologi-ideologi, pelanggaran hak asasi manusia yang *massive*, tiupan angin demokrasi, penindasan rezim otoriter, dsb.

Masyarakat Indonesia yang dicita-citakan **Yayasan ATMA** adalah masyarakat yang demokratis, mempromosikan hak asasi manusia, tegaknya supremasi hukum dan terwujudnya hidup berdampingan secara damai.

Dalam masyarakat seperti itu, terdapat: Pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mendahulukan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; Masyarakat sipil yang tumbuh berkembang dengan kuat serta menjalankan fungsinya secara aktif, kreatif dan kritis; Ada proses-proses politik yang benar didasarkan pada prinsip, norma dan mekanisme demokrasi; Berfungsinya lembaga-lembaga penegak keadilan secara benar; Ada penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia yang tampak pada peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia.

Untuk mencapai tujuannya, **Yayasan ATMA** memfokuskan programnya pada empat (4) isu besar, yaitu: **Hak Asasi Manusia**, **Demokrasi**, **Supremasi Hukum**, dan **Koeksistensi**. Setiap isu dijabarkan lebih spesifik sesuai dengan perkembangan atau kecenderungan yang terjadi pada masyarakat. Metode kerja yang digunakan **Yayasan ATMA** untuk mengimplementasikan programnya

adalah advokasi, yang dipahami sebagai keterpaduan aktivitas di bidang investigasi, aksi, studi, dan kampanye.

Alamat:
Jl. Ir. Sutami 88c, Jurug, Solo 57125
Telp/Fax. (0271) 638 307
e-mail: atma@indo.net.id

Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) adalah wadah yang merupakan kristalisasi dari laku ekspresi, eksplorasi, koreksi dan advokasi permasalahan-permasalahan lokal Kabupaten Blora selama beberapa tahun terakhir.

Fenomena 'Boom LSM' di daerah yang merupakan gejala umum Indonesia pasca reformasi, melahirkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam jumlah besar tetapi tidak diimbangi visi-misi yang terekspresi dalam tindak nyata, sehingga akan mudah tercerabut dari akar visionernya. Sebagai jawaban dialegtik, **LPAW** yang bervisi demokrasi, keadilan, inklusifitas dan pruralitas, akan menempatkan penelitian, kajian-kajian, penerbitan, pelatihan, dan pendampingan sebagai basis setiap program dan kegiatannya.

Dalam melakukan kegiatan, **LPAW** bekerja sama dengan lembaga-lembaga sevisi, komunitas pemuda, mahasiswa dan pelajar, kalangan agamawan, kelompok-kelompok masyarakat dan pesantren.

Alamat:
Jl. Reksodiputro No. 13 Blora
Telp. (0296) 533 280
e-mail: lpaw@bloraonline.com

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*) yang disingkat **ELSAM**, adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan. memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak asasi manusia pada umumnya –sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

Alamat:
Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510
Telp. (021) 797 2662, 7919 2519, 7919 2564
Fax. (021) 7919 2519
e-mail: elsam@nusa.or.id dan advokasi@rad.net.id
Website: www.elsam.or.id

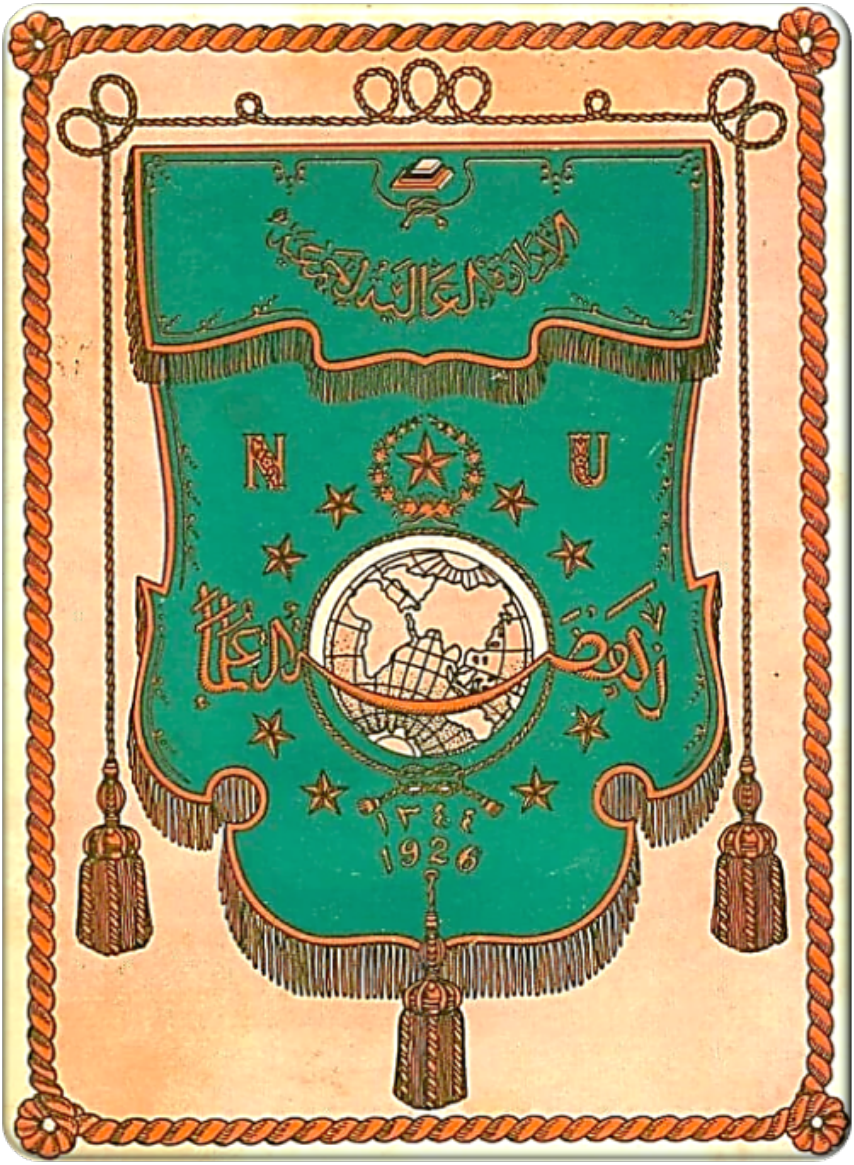
الأمم المتحدة
N U
١٣٤٤
1926

ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

Dalam persoalan menulis naskah ini, khususnya peristiwa 1965, adalah suatu keberanian. Tanpa keberanian tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi. Karena itu buku ini sesuai dengan semangat yang menulisnya yakni para pemuda. Dan sebagaimana sering saya nyatakan, pemuda, angkatan muda tanpa keberanian adalah ternak semata karena faalnya dalam hidup beternak diri semata.

Pramoedya Ananta Toer

Editor : Johny Simanjuntak, Sukendri Siswanto, Eddie Riyadi Terre
Penerbit : Yayasan ATMA, LPAW, Perkumpulan ELSAM

ISBN 979-98433-0-8